

**Peraturan Bupati Balangan No. Tahun 2017
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Balangan Tahun 2018**



Tema :

***"Pengembangan dan Pemantapan Infrastruktur Daerah
Untuk Percepatan Peningkatan Kualitas SDM dan
Ketahanan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kewilayahan yang Berkeadilan"***

**Pemerintah Kabupaten Balangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2017**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 adalah merupakan tahun perencanaan pertama dari RPJMD tahun 2016-2021. Sebagai tahun pertama, maka rujukan utama dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 adalah Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 dengan Visi **Terwujudnya Kabupaten Balangan yang maju dan sejahtera melalui pembangunan Sumber Daya Manusia**. Sedangkan basis penyusunan adalah merujuk pada target Rancangan RPJMD di tahun 2018, bersifat mengakomodir Visi dan Misi Bupati Terpilih dengan mengedepankan hasil evaluasi terhadap capaian target kinerja daerah tahun 2015-2016 dan kondisi akhir tahun 2016.

RKPD Kabupaten Balangan tahun 2018 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan. RKPD Tahun 2018 ini selain berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD tahun 2016-2021, juga mengacu pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 serta memperhatikan RKP Nasional Tahun 2018 dengan program Tri Sakti dan Nawacita Presiden Jokowi. Pedoman RKPD Tahun 2018 memuat langkah-langkah untuk mendukung upaya percepatan pembangunan Kabupaten Balangan melalui akselerasi peningkatan IPM.

Sebagai RKPD tahun pertama RPJMD 2016-2021, maka dasar penentuan prioritas dan target kinerja adalah mengacu pada Program dan Kegiatan Prioritas RPJMD tahun 2016-2021 di tahun 2018. Secara umum tema pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2018 adalah suatu upaya untuk bergotong royong dan bersinerginya semua pihak dalam pembangunan dengan tema yaitu **“Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menuju Balangan yang lebih maju dan sejahtera”**. Selanjutnya tema ini mewarnai RKPD 2018 sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD, bahan Pra Musrenbang, Musrenbang, dan pasca Musrenbang.

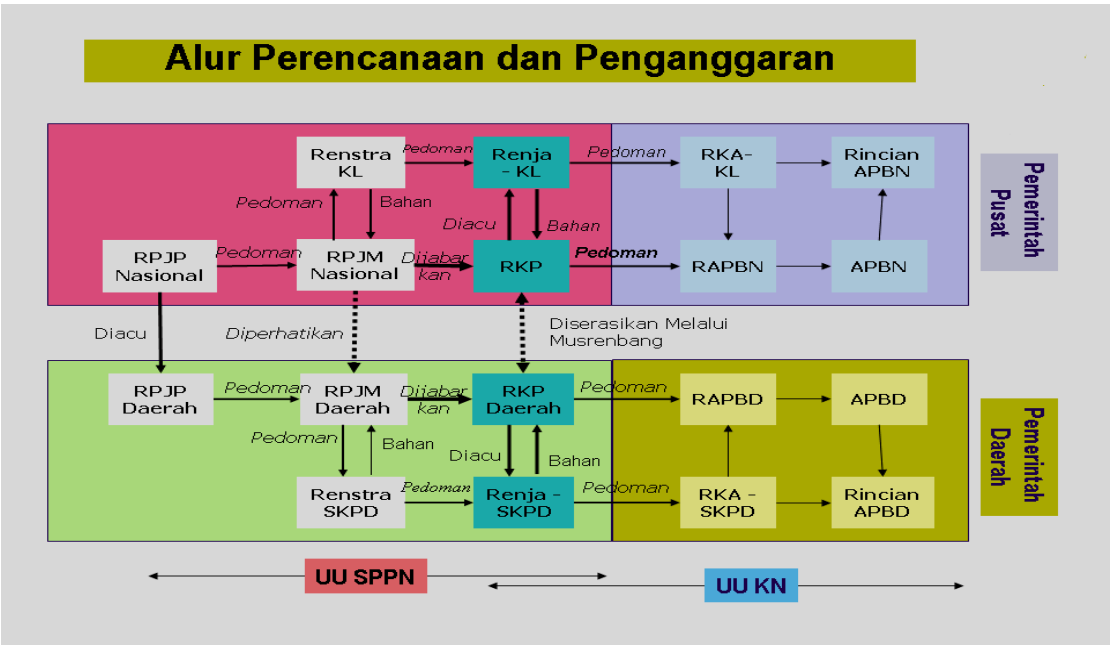
1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rancangan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2018 disusun dengan landasan hukum: 1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Rancangan RKPD Tahun 2018 Kabupaten Balangan merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2016-2021 yang diselaraskan dengan Rancangan RPJMD Provinsi Tahun 2016-2021 dan RPJMN 2015-2019.

Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2018 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan

1.4. Sistematika Rancangan RKPD

Mengacu pada Lampiran V Permendagri Nomor 54 tahun 2010, maka penyusunan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

- 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud

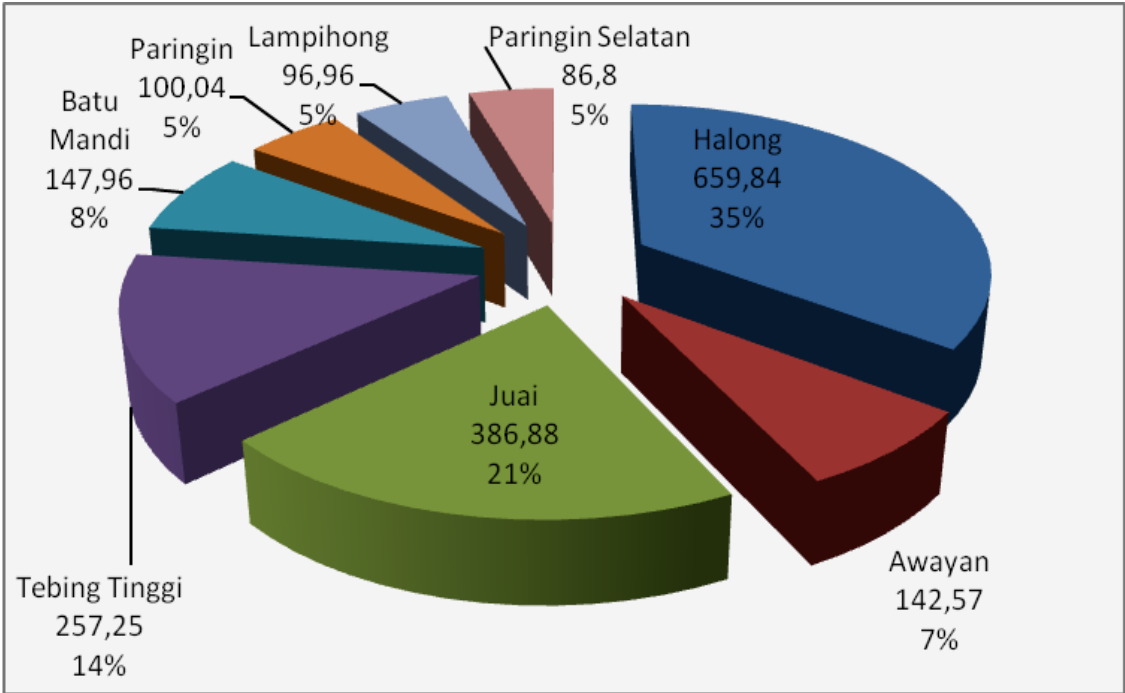
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2018 dimaksudkan sebagai perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dengan mempertimbangkan perkembangan terakhir pada tahun 2016.

1.5.2 Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2018 ditujukan untuk memfasilitasi dan menjalankan Misi pemerintahan dan pembangunan serta mewujudkan Visi Daerah secara bertahap.

Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Halong yaitu 659,84 km² (35,13 persen), Kecamatan Juai 386,88 km² (20,59 persen), Kecamatan Tebing Tinggi 257,25 km² (13,70 persen), Kecamatan Batumandi 147,96 km² (7,88 persen), Kecamatan Awayan 142,57 km² (7,59 persen), Kecamatan Paringin 100,04 km² (5,33 persen), Kecamatan Lampihong 96,96 km² (5,16 persen), dan Kecamatan Paringin Selatan 86,80 km² (4,62 persen). Kabupaten Balangan terdiri atas 149 desa dan 3 kelurahan (berdasarkan Perda No. 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur dan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Tabel 2.1. berikut ini

Gambar 2.2. Luas Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Balangan dalam Satuan Km²



Tabel 2.1. Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan

Kecamatan	Kelurahan (Buah)	Desa (Buah)
Lampihong	-	27
Paringin	2	14
Juai	-	21
Halong	-	24
Batu Mandi	-	18
Paringin Selatan	1	15
Awayan	-	23
Tebing Tinggi	-	12
Jumlah	3	154

Sumber : Bappeda 2016

b. Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah kabupaten Balangan terletak antara 2° 02'25,99" sampai dengan 2° 31'57,96" Lintang Selatan dan 115°18'45,03" sampai dengan 115°50'11,70" Bujur Timur. Kabupaten Balangan terbagi menjadi 8 kecamatan, dengan 157 desa/kelurahan.

1) Topografi

Kabupaten Balangan memiliki kondisi topografi yang cukup variatif. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Balangan berada di ketinggian antara 25-100 m dpl (38 persen). Ketinggian yang paling kecil adalah ketinggian 0-7 meter, yaitu hanya 19 persen. Ketinggian 0-7 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi sedangkan ketinggian di atas 500 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Awayan, Tebing Tinggi dan Halong. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 meter dpl merupakan wilayah yang jika digunakan untuk budidaya pertanian memerlukan tindakan-tindakan khusus karena pada ketinggian tersebut banyak lereng yang terjal dan mudah erosi. Ketinggian kurang dari 500 meter sangat cocok untuk budidaya pertanian dan harus tetap memperhitungkan bahwa pada ketinggian tersebut juga masih banyak lereng yang terjal.

Kemiringan lahan di Kabupaten Balangan bervariasi dalam enam kelas kemiringan, yaitu < 2 persen, 2-8 persen, 8-15 persen, 15-25 persen, 25-40 persen dan lebih besar dari 40 persen. Hal ini sangat jelas terlihat dari kondisi fisik lingkungan yang cukup bergelombang di beberapa Kecamatan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten. Kemiringan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan terhadap erosi tanah. Semakin tinggi/terjal lerengnya, semakin peka terhadap erosi. Kelas lereng paling luas di Kabupaten Balangan adalah kelas lereng 0-2 persen yaitu mencapai 69 persen dari luas wilayah Kabupaten Balangan yang terdapat di semua kecamatan, di mana yang terbesar terdapat di Kecamatan Halong. Kelas lereng ini sangat cocok untuk budidaya pertanian, maupun untuk kegiatan perkotaan (terbangun).

Kelas lereng yang luasnya paling kecil adalah kelas 25-40 m yaitu hanya 2 persen, yang terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Wilayah yang curam dengan kemiringan di atas 40 m cukup luas yaitu mencapai 16 persen dan terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Kawasan yang memiliki kelas lereng tersebut pada umumnya dipertahankan sebagai Kawasan lindung. Perbedaan kondisi kemiringan lahan ini berimplikasi terhadap wilayah yang cukup seragam, sementara Kecamatan

yang lain kondisi fisiknya cukup beragam. Kecamatan Lampihong, misalnya, memiliki karakter fisik datar, tanpa wilayah bergelombang. Tidak seperti Kecamatan Awayan dan Halong, yang memiliki semua kelas lereng, mulai dari topografi yang datar hingga kemiringan tajam (terjal).

2) Geologi

Kondisi geologis di salah satu wilayah kabupaten diasumsikan cukup mewakili kondisi geologis lingkup Kawasan tersebut, karena proses ekologi yang terjadi secara alami pada umumnya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang di lingkup wilayah yang cukup luas.

Tinjauan kondisi geologi terdiri dari tinjauan terhadap jenis batuan, jenis tanah dan tekstur tanah yang terdapat di Kabupaten Balangan. Jenis batuan yang ada di Kabupaten Balangan terdiri dari enam jenis, yaitu Paleogen To,b,c,d, batuan beku dalam, Miosen bawah (Aketania Fe), Miosen Tf 1-3, Neopleosin Tf-Tgh, Misozoikum tak diuraikan dan Quarfer. Jenis batuan yang paling luas di Kabupaten Balangan adalah jenis miosen Tf 1-3 yaitu mencapai 71.277 Ha (37,25 persen) dari luas wilayah. Jenis batuan ini terdapat di semua Kecamatan. Sedangkan jenis batuan yang paling sedikit adalah-jenis Paleogen'Ta, b, c, d yang hanya terdapat di Kecamatan Halong.

Untuk jenis tanah yang terdapat di kabupaten Balangan adalah latosol, podsolik merah kuning, kompleks podsolik merah kuning dan latosol, litosol, serta alluvial. Jenis tanah yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah tanah alluvial yang sangat potensial unfuk budidaya pertanian karena di samping subur juga tidak peka terhadap erosi. Jenis tanah yang lain mempunyai tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat ditekan sekecil mungkin. Jenis tanah yang terbanyak adalah podsolik merah kuning, yaitu mencapai 78.723 Ha (42,73 persen), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah latosol, yaitu hanya 4.491 Ha (2,44 persen). Luas tanah alluvial hanya mencapai 6.703 Ha (3,64 persen). Tanah aluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Halong dan paling sedikit di Kecamatan Juai. Jenis tanah alluvial ini tidak terdapat di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Awayan dan Paringin.

Tekstur tanah di Kabupaten Balangan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu halus, sedang, dan kasar. Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi. Sebagian besar tanah di Kabupaten Balangan bertekstur halus, yaitu mencapai 91,76 persen dari

luas wilayah. Tanah yang bertekstur sedang dan kasar hanya 6,98 persen dan 1,26 persen dari luas wilayah. Lahan bertekstur halus paling banyak terdapat di Kecamatan Halong. Dengan demikian di Kabupaten Balangan tersedia lahan yang cukup luas untuk ditanami semua tanaman dengan baik dan tahan terhadap erosi.

3) Hidrologi

Kondisi Hidrologi dapat ditinjau dari beberapa hal, diantaranya kondisi sumberdaya air dan pola drainase. Sumber daya air di Kabupaten Balangan berupa sungai dan embung (kolam-kolam retensi). Sungai-sungai utama yang mengalir di daerah Kabupaten Balangan adalah sungai Pitap, sungai Balangan, sungai Mantuyan, sungai Tabuan, sungai Galumbang, sungai Halong, sungai Uren, sungai Ninian, sungai Jauk, sungai Batumandi, sungai Lokbatu dan sungai Juai. Berdasarkan pola pengaliran sungai utama dan anak sungai, maka daerah Kabupaten Balangan dibagi menjadi 4 pola pengaliran sungai, yaitu : pola pengaliran anastomatik, pola pengaliran dendritik, pola pengaliran rektangular dan pola pengaliran subdentritik.

a) *Pola Pengaliran Anastomatik*

Pola pengaliran anastomatik adalah pola pengaliran modifikasi yang membentuk meander yang terbentuk di dataran banjir, delta ataupun rawa. Pola pengaliran ini menempati daerah kabupaten Balangan dengan luas kira-kira 25 persen. Pola pengaliran ini terdapat di bagian barat-selatan daerah kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Pitap, sungai Muning, sungai Lok Batu, sungai Juuh, sungai Batumandi, sungai Jauk, sungai Pelasan serta sungai Kambiyain dengan anak-anak sungainya

b) *Pola Pengaliran Dendritik*

Pola pengaliran dendritik adalah pola pengaliran dasar yang bentuk umum seperti daun, berkembang pada batuan dengan kekerasan relatif sama, perlapisan batuan sedimen relatif datar serta tahan akan pelapukan, kemiringan landai, kurang dipengaruhi struktur geologi, pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan sekitar 25 persen. Pola Pengaliran ini terdapat di bagian barat hingga bagian tengah daerah kabupaten Balangan. Pola Pengaliran ini terdapat di sungai Balangan, sungai Ninian, sungai Juai, sungai Jungkal serta sungai Jingan dengan anak-anak sungainya

c) *Pola Pengaliran Rektangular*

Pola pengaliran rekrangular adalah pola pengaliran dasar di mana induk sungai dengan anak sungai yang memperlihatkan arah lengkungan menganan, pengontrol struktur atau sesar yang memiliki sudut kemiringan, tidak memiliki perulangan perlapisan batuan dan sering memperlihatkan pola.

Pengaliran yang tidak menerus. Pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan sekitar 30 persen. Pola pengaliran terdapat di bagian timur daerah

Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Balangan, sungai Balong, sungai Uren, sungai Mantuyan, serta sungai Tabuan dengan anak-anak sungainya

d) **Pola Pengaliran Subdendritik**

Pola pengaliran subdendritik adalah pola pengaliran modifikasi yang berbentuk mendaun yang umumnya terbentuk di daerah yang mempunyai kekerasan batuan relative sama yang berkembang pada batuan beku, sedimen, maupun metamorf. Pola pengaliran ini menempati daerah kabupaten balangan sekitar 20 persen. Pola pengaliran ini terdapat di bagian utara daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Galumbang, sungai Lalayau serta sungai Tutupan dengan anak-anak sungainya.

4) **Klimatologi**

Keadaan iklim di Kalimantan Selatan menurut Sistem Koppen dapat digolongkan ke dalam iklim hutan tropika humid dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2000 mm hingga 3000 mm, curah hujan terendah jatuh sekitar bulan Juni, Juli, Agustus dan September, sedangkan curah hujan tertinggi jatuh sekitar bulan Desember, Januari, Februari dan Maret.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim dan perputaran arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Masing-masing memiliki angka yang berbeda. Dilihat dari 3 (tiga) stasiun pengamatan yang terdapat di Kabupaten Balangan, yaitu Paringin, Batu Mandi dan Juai, rata-rata curah hujan per hari pada tahun 2015 di Kabupaten Balangan sebesar 18,05 mm dengan ratarata jumlah hari hujan sebanyak 102,3 hari atau sekitar lebih dari 3 bulan. Hari hujan terbanyak selama tahun 2015 ini terpantau di stasiun pengamatan Juai yaitu pada bulan Januari dengan 21 hari hujan dalam sebulan.

Gambar 2.3

Rata-Rata Curah Hujan/hari Menurut Stasiun Pengamatan (mm), 2015

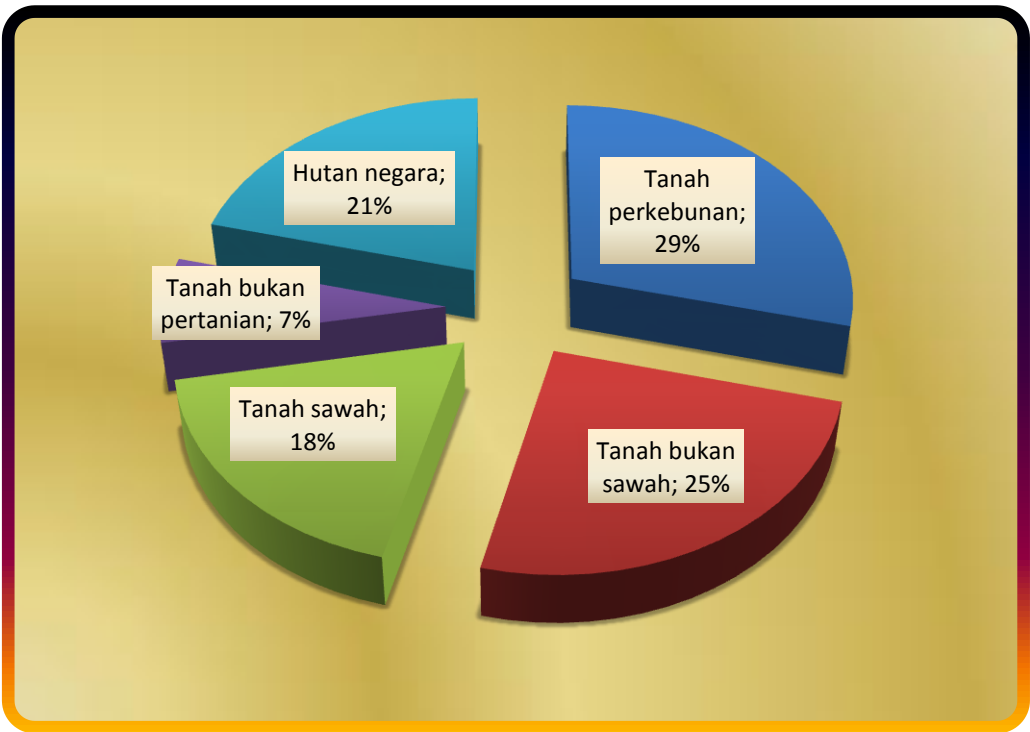


Sumber : BPS Kabupaten Balanga Tahun 2016

5) Penggunaan Lahan

Persentase penggunaan lahan di Kabupaten Balangan belum mengalami perubahan yang begitu signifikan, dengan dominasi penggunaan lahan adalah berupa kegiatan untuk tanah perkebunan 29 persen, tanah bukan sawah 25 persen, hutan negara 21 persen, dan tanah sawah 18 persen. Dengan dominasi perkebunan dan persawahan pada penggunaan lahannya, kabupaten balangan dapat dikatakan memiliki lahan terbuka (tidak terbangun) yang relatif besar, dibandingkan dengan lahan yang terbangun. Perubahan yang cukup signifikan terutama terjadi pada kegiatan sawah, hutan, serta kegiatan lain-lain. Hal ini dimungkinkan dengan bertambahnya jumlah penduduk akibat migrasi dan kelahiran. Konsentrasi lahan terbangun yang tertinggi dapat ditemukan di pusat Ibukota Kabupaten Balangan, dan disepanjang jalan berupa perumahan penduduk, sementara dominasi hutan dimaksud bukan lagi hutan murni yang belum terjamah, melainkan berupa hutan karet yang cukup padat. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4
Luas Wilayah Balangan Menurut Penggunaan



Sumber : BPS Kabupaten Balangan Tahun 2016

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Balangan memiliki beberapa sektor unggulan daerah yaitu di sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor pariwisata.

a. Sektor Pertanian

1) Tanaman Pangan:

- *Padi Gogo* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Halong dan Kecamatan Awayan.
- *Pisang Talas* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Halong & Kecamatan Awayan

2) Sayuran:

- *Labu/Waluh* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Juai dan Kecamatan Awayan.
- *Cabe Rawit* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan dan Kecamatan Halong.

3) Buah-buahan:

- *Cempedak* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Halong.
- *Maritam* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan, Kecamatan Juai dan Kecamatan Batumandi.

4) Perkebunan:

- *Karet* dengan lokasi prioritas Kecamatan Awayan.
- *Sawit* dengan lokasi prioritas di Kecamatan Juai, Lampihong dan Batu Mandi
- *Gula Aren* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Awayan.

5) Peternakan:

- *Ayam Buras* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Paringin, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong.
- *Sapi Potong* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong.

Untuk lebih jelasnya data mengenai pengembangan pertanian di Kabupaten Balangan dari Tahun 2013 sampai tahun 2015 dapat dilihat pada beberapa tabel berikut.

Tabel 2.2. Data Luas Areal dan Produksi Pertanian Tanaman Pangan

Jenis Data Pertanian	Tahun			Ket
	2014	2015	2016	
a. Padi				
- Luas areal produksi	32.930	34.914	40.342	Ha
- Jumlah Produksi	136.331,16	157.116	205.804,30	Ton
-				
b. Jagung				
- Luas areal produksi	472	1.121	2.252	Ha
- Jumlah Produksi	1.703,60	5.044,7	10.129,50	Ton
-				
c. Kedelai				
- Luas areal produksi	502	799	5.392	Ha
- Jumlah Produksi	657,62	959	6.470,40	Ton
-				
d. Singkong dan Umbi-umbian				
- Luas areal produksi	325	300	350	Ha
- Jumlah Produksi	4.254,59	4.070	4.595	Ton
-				

Sumber : DisPTPHPP Balangan Tahun 2016

Tabel 2.3. Data Luas Areal dan Produksi Perkebunan

Jenis Data Perkebunan	Tahun			Ket
	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5
a. Karet				
- Luas areal	37.495	37.495	37.074	Ha
- Jumlah Produksi	25,268	24,959	25.810	Ton
b. Kelapa				
- Luas areal	816	816	711	Ha
- Jumlah Produksi	231	244	275	Ton
c. Kopi				
- Luas areal	630	630	458	Ha
- Jumlah Produksi	29	51	46	Ton
d. Sawit / Perkebunan Rakyat				
- Luas areal	200	356	469	Ha
- Jumlah Produksi	244	258	3.440	Ton
e. Sawit / Perkebunan Besar Swasta				
- Luas areal	1700	1700	1.700	Ha
- Jumlah Produksi	5048	5950	3.764	Ton

Jenis Data Perkebunan	Tahun			Ket
	2014	2015	2016	
f. Kapuk				
- Luas areal	20	20	15	Ha
- Jumlah Produksi	2	3	4	Ton
g. Kemiri				
- Luas areal	208	204	193	Ha
- Jumlah Produksi	71	72	88	Ton
h. Lada				
- Luas areal	10	10	8	Ha
- Jumlah Produksi	2	2	2	Ton
i. Pinang				
- Luas areal	41	41	35	Ha
- Jumlah Produksi	4	5	5	Ton
j. Asen/Enau				
- Luas areal	734	727	644	Ha
- Jumlah Produksi	360	422	457	Kg
k. Jahe				
- Luas areal	-	-	-	Ha
- Jumlah Produksi	-	-	-	Ton
l. Sagu				
- Luas areal	426	426	357	Ha
- Jumlah Produksi	49	76	109	Ton

Sumber : DisPTPHPP Balangan Tahun 2016

Tabel 2.4. Data Luas Areal dan Produksi Peternakan

Jenis Data Peternakan	Tahun			Ket
	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5
a. Ternak Sapi Potong				
- Jumlah populasi	1.766	2.017	2.043	Ekor
- Jumlah Produksi (daging)	215.799	216.673	222.133	Kg
- Jumlah pemotongan/th	988	988	1.017	Ekor
- Jumlah pertumbuhan populasi per tahun			0,44	%
- Harga produsen (kg bh)	105.000	105.000	105.000	Rp.
- Harga konsumen (kg)	115.000	115.000	120.000	Rp.
b. Ternak kecil				
- Jumlah populasi kambing	655	675	509	Ekor
✚ Jumlah Produksi (daging)	10.789	10.889	11.152	Kg
✚ Harga produsen (kg bh)	70.000	70.000	80.000	Rp.
✚ Harga konsumen (kg)	90.000	90.000	95.000	Rp.

Jenis Data Peternakan	Tahun			Ket
	2014	2015	2016	
- Jumlah populasi domba				
+ Jumlah Produksi (daging)	153	153	64	Kg
+ Harga produsen (kg bh)	70.000	70.000	80.000	Rp.
+ Harga konsumen (kg)	90.000	90.000	95.000	Rp.
c. Unggas				
- Ayam buras				
+ Jumlah populasi	57.815	71.128	63.050	Ekor
+ Jumlah produksi (daging)	296.176	343	364.900	Kg
+ Jumlah produksi (telur)	47.303	58.196	54.586	Kg
+ Harga produsen (kg bh)	38.000	38.000	42.000	Rp.
+ Harga konsumen (kg)	45.000	45.000	55.000	Rp.
- Ayam pedaging				
+ Jumlah populasi	1.094.842	1.094.842	1.031.800	Ekor/th
+ Jumlah produksi (daging)		560.896	573.042	Kg
+ Harga produsen (kg bh)	29.000	29.000	30.000	Rp.
+ Harga konsumen (kg)	35.000	35.000	35.000	Rp.
- Itik				
+ Jumlah populasi	626.801	30.194	28.099	Ekor/th
+ Jumlah produksi (daging)	49.481	67.235	56.973	Kg
+ Jumlah produksi (telur)	183.778	207.045	192.679	Butir/th
+ Harga produsen (kg bh)	40.000	40.000	45.000	Rp.
+ Harga konsumen (kg)	50.000	50.000	55.000	Rp.
d. Jumlah rumah potong hewan (RPH)	1	1	1	Bh

Sumber : DisPTPHPP Balangan Tahun 2016

Tabel 2.5. Data Luas Areal dan Produksi Kehutanan

Jenis Data Kehutanan	Tahun			Ket
	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5
a. Hasil hutan non HPH				
- Kayu bulat	-	-		M³
- Kayu penggergajian	-	-		M³
- Kayu olahan				M³
b. Luas lahan kritis	18.892,3	-		Ha
c. Luas lahan reboisasi	24.840,2	-		Ha
d. Luas lahan penghijauan				Ha
e. Luas kebakaran hutan		37		Titik Hotspot
f. Industri pengolahan hasil hutan	1	1		Bh

Sumber : Dishutbun Balangan Tahun 2016

b. Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan, sejak tahun 1992 Kabupaten Balangan merupakan salah satu daerah penghasil batu bara yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap ekspor batu bara di Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil pemetaan neraca Sumber Daya Alam, Kabupaten Balangan memiliki potensi batubara yang tersebar di beberapa kecamatan terutama di Kecamatan Paringin, Tebing Tinggi, Halong, Juai, Awayan dan Batu Mandi.

c. Sektor Pariwisata

Di Kabupaten Balangan banyak terdapat objek wisata alam yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Awayan
 - Benteng Tundakan
- 2) Kecamatan Paringin Selatan
 - Danau Baruh Bahinu Dalam, dimana lokasi objek wisata ini pernah ditayangkan melalui acara Jejak Petulangan yang dilaksanakan oleh Trans TV.
- 3) Kecamatan Halong
 - Air Terjun Manyandar
 Goa Berangin Gunung Belawan
- 4) Kecamatan Juai
 - Makam Datu Kandang Haji
 Objek Wisata ini merupakan Objek Wisata Religius, dimana Datu Kandang Haji merupakan tokoh penyebar Agama Islam di Kabupaten Balangan
- 5) Kecamatan Tebing Tinggi
 - Gunung Hantanung Permai

2.1.3. Struktur dan Pola Ruang

1) Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan di Indonesia umumnya memiliki karakteristik urban (perkotaan) dan rural (perdesaan) yang saling berkaitan. Kondisi tersebut juga terjadi di wilayah perencanaan, berdasar pada karakteristik Kabupaten Balangan tersebut maka perlu untuk dilakukan arahan sistem penetapan kawasan perdesaan dan perkotaan agar kegiatan perkotaan dan perdesaan di wilayah perencanaan dapat saling bersinergi sehingga disparitas pertumbuhan wilayah perdesaan dan perkotaan dapat tereliminir.

Sistem penetapan kawasan perkotaan dan perdesaan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan ini menggunakan pendekatan teoritis dan konseptual yang dikemukakan oleh beberapa ahli tata ruang. Berikut akan dipaparkan konsep-konsep

serta teori yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan kawasan perdesaan dan perkotaan di wilayah perencanaan.

a). Kawasan Perdesaan

Perdesaan merupakan suatu bagian wilayah yang tidak berdiri sendiri. Suatu wilayah bisa disebut perdesaan karena mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan perkotaan. Pengertian desa menurut Kamus Tata Ruang (1997) adalah permukiman kecil di luar kota, jumlah penduduknya terbatas, luas daerah geografisnya terbatas, kepadatan penduduk rendah, berpola hubungan tradisional, mata pencaharian utama dibidang pertanian.

Dalam pengembangan wilayah, kawasan perdesaan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan perkotaan. Pemahaman yang menyeluruh dan tidak otomatis ini menjadi penting dan mendasar dalam penyusunan peraturan atau aturan main yang berkaitan dengan perdesaan maupun perkotaan, agar terjadi sinergi dan keseimbangan perlakuan wilayah, khususnya oleh pelaku pembangunan.

b). Kawasan Perkotaan

Menurut Draft RPP pengelolaan dan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan (2001), pengertian Kota adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah bercirikan perkotaan, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kota menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasai masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasar hasil kajian dengan menggunakan pendekatan konsep dan teori mengenai kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan diatas, maka ditetapkan kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Balangan sebagai berikut.

- Kawasan perkotaan ditetapkan adalah perkotaan Paringin.
- IKK pada masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Balangan.
- Kawasan perdesaan adalah seluruh wilayah administrasi desa di Kabupaten Balangan, selain dari wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan perkotaan.

2) Sistem Perdesaan

Arahan pengembangan sistem perdesaan adalah penataan struktur ruang perdesaan sebagai sistem pusat kegiatan di perdesaan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di perdesaan. Sistem pusat kegiatan di desa pusat pertumbuhan secara spasial sudah dapat dikembangkan dalam *subcluster of services*, dengan

infrastruktur/kegiatan pelayanan yang dikembangkan antara lain pelayanan kegiatan finansial seperti kantor kas, kegiatan perdagangan dalam bentuk kawasan pertokoan yang dapat melayani wilayah yang lebih luas. Permukiman disekitar pusat desa dapat dikembangkan dalam sistem cluster, sehingga tidak mengganggu lahan pertanian yang ada disekitarnya. Intensitas kegiatan dikelola dalam perpektif pemberdayaan kegiatan ekonomi lokal yang terintegrasi dengan kawasan produksi di sekitarnya ataupun di desa lain yang secara struktural menjadi wilayah belakang yang dilayani oleh pusat kegiatan desa ini.

Pengelolaan struktur ruang perdesaan merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan di kawasan perdesaan. Pengelolaan sistem perdesaan di Kabupaten Balangan akan dikembangkan dengan konsep pengembangan desa-desa agropolis. Pengembangan desa agropolis secara struktural akan terkait pula dengan pengembangan interaksi desa-kota, dan membuat keterkaitan antar pusat-pusat permukiman tersebut dalam pola sistem jaringan (*network system*), sesuai dengan konsep penataan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Balangan dan pola pengembangan kegiatan ekonomi lokal yang diarahkan dapat memicu perkembangan wilayah yang berbasis pada sektor primer.

Arahan pengembangan struktur ruang perdesaan melalui:

- Pembentukan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP).
- Pembentukan Pusat Desa.
- Pembentukan Pusat Permukiman Perdusunan.

Pengembangan sistem perdesaan dibedakan atas tipologi kegiatan yang akan dikembangkan, yaitu pengembangan sistem pusat permukiman pada:

- Desa pertanian.
- Desa industri.
- Desa wisata.

Desa-desa pertanian secara umum akan berada pada kawasan dengan karakter rural murni dengan kegiatan murni produksi pertanian (sektor basis). Sehingga pada desa pertanian sistem pusat permukiman akan berkembang untuk skala unit desa. Fungsi pusat permukiman pada desa pertanian diarahkan untuk pelayanan permukiman yang menyebar di sekitar daerah pertanian (*farm village type*). Maka pada kawasan tersebut dapat difungsikan sebagai pusat permukiman pada desa pertanian,

berupa pusat pelayanan pemerintahan, pengembangan pasar/perdagangan skala desa, pelayanan kesehatan setara puskesmas/puskesmas pembantu.

Desa industri dimungkinkan akan berkembang dengan kegiatan industri berbasis pertanian. Desa industri ini lebih prospektif dikembangkan untuk menjadi desa pusat pertumbuhan. Sistem pusat permukiman diarahkan dapat melayani skala beberapa pusat permukiman desa pertanian. Sehingga secara hirarki pusat permukiman desa industri lebih tinggi dari pusat permukiman di desa pertanian murni.

Pusat-pusat permukiman di desa industri diarahkan terhubung satu dengan yang lainnya, dan secara struktural diarahkan berinteraksi kuat dengan kota-kota kecil atau besar di sekitarnya. Pusat permukiman di desa yang dimungkinkan dikembangkan kegiatan industri pengolahan pertanian, juga diarahkan untuk dikembangkan kegiatan perdagangan dan sebagai pusat koleksi hasil produksi dari berbagai desa pertanian yang ada disekitarnya. Setiap pusat pelayanan dikembangkan melalui penyediaan berbagai fasilitas sosial-ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan.

Desa pusat pertumbuhan dimungkinkan mempunyai konsentrasi penduduk dan kegiatan budaya non pertanian yang lebih intensif dari sistem permukiman di desa pertanian. Pola pengembangan pusat permukiman desa pertanian dengan pusat permukiman diupayakan sinergi dan berimbang dengan pola pemanfaatan lahan.

Desa wisata kedepan merupakan kawasan perdesaan yang sangat potensial untuk berkembang dan dikembangkan di wilayah perencanaan, mengingat potensi sektor pariwisata yang dimiliki di wilayah perencanaan cukup besar. Pengembangan desa wisata diharapkan dapat saling bersinergi dan berinteraksi dengan desa pertanian dan desa industri, baik secara spasial dan khususnya secara ekonomi.

3). Sistem Perkotaan

Dalam Sistem Perkotaan, di dalam RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, mengarahkan Kota Paringin sebagai PKL. Kota Paringin sebagai PKL harus memenuhi kriteria :

- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten dan atau beberapa kecamatan.
- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten dan atau beberapa kecamatan.

Kawasan Perkotaan Paringin, meliputi perkotaan secara fungsional, yaitu Kelurahan Paringin Kota dan Kelurahan Paringin Timur di Kecamatan Paringin, dan Kelurahan Batu Piring di Kelurahan Paringin Selatan.

Kawasan Perkotaan Batumandi meliputi Desa Batumandi dan Desa Teluk Mesjid di Kecamatan Batumandi merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yang dipromosikan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp).

Tabel 2.6
Sistem Perkotaan Perdesaan di Kabupaten Balangan

Peran	Perkotaan
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Paringin (Kecamatan Paringin dan Kecamatan Paringin Selatan)
Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)	Batumandi (Kecamatan Batumandi)
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	1. Muara Pitap berada di Kecamatan Paringin Selatan 2. Simpang Tiga berada di Kecamatan Lampihong 3. Putat Basiun berada di Kecamatan Awayan 4. Tebing Tinggi berada di Kecamatan Tebing Tinggi 5. Mungkur Uyam berada di Kecamatan Juai 6. Halong berada di Kecamatan Halong
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	1. Mantimin berada di Kecamatan Batumandi 2. Pudak berada di Kecamatan Awayan 3. Bihara berada di Kecamatan Awayan 4. Tabuan berada di Kecamatan Halong 5. Mauya berada di Kecamatan Halong 6. Haur Batu berada di Kecamatan Paringin 7. Gunung Pandau berada di Kecamatan Paringin Selatan 8. Layap berada di Kecamatan Paringin 9. Bungin berada di Kecamatan Paringin Selatan

Sumber : RTRW Kab. Balangan Tahun 2014

Dalam sistem struktur ruang yaitu pembentukan peran dan fungsi perkotaan secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan. Prioritas pembangunan sistem perkotaan di Kabupaten Balangan meliputi :

- Mempercepat pengembangan Perkotaan Paringin dan Batumandi sebagai PKL dan PKLp melalui pengembangan paringin baru dan Batumandi sebagai Kota Agropolitan.
- Mendorong dan mempercepat pengembangan perkotaan Batumandi sebagai fungsi PKLp dan PPK sebagai kota tani dan jasa industri agribisnis (pengolahan pertanian) dengan daerah hinterland nya.
- Mendorong pengembangan perkotaan Halong dan Tebing Tinggi sebagai perkotaan dengan fungsi PPK yang didukung dengan pengembangan Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya dan Pengembangan Industri Ekowisata berbasis sumberdaya alam.
- Meningkatkan pengembangan kota-kota yang berperan sebagai PPL yang ada disekitar pertumbuhan perkotaan dengan fungsi PPK maupun desa-desa pendukungnya, melalui pengembangan sistem jaringan jalan dan sistem jaringan transportasi.

Sesuai dengan potensi dan kondisi fisik alami daerah lingkungan yang ada serta prioritas wilayah, maka Kabupaten Balangan dalam kerangka pembangunan jangka panjang terbagi beberapa fungsi dan peran wilayah sesuai dengan potensi dan kondisi wilayahnya, yaitu:

- Wilayah Kecamatan sebelah selatan dan barat yang meliputi kecamatan Batumandi dan Lampihong dengan kegiatan utama yang dikembangkan di wilayah ini antara lain: mendorong pertanian berkelanjutan pada dan agroindustri (investasi industri pengolahan dan industri pertanian), mendorong pertumbuhan aktivitas pertanian tanaman pangan.
- Wilayah Kecamatan Paringin dan Paringin Selatan sebagai pusat kota yang dilayani oleh sistem jaringan jalan lingkaran timur dan lingkaran barat, perlu dilakukan pengendalian terhadap meningkatkan aktivitas pembangunan kawasan-kawasan perumahan.
- Kecamatan Paringin, perlu dilakukan pengendalian dampak aktivitas pertambangan dari perusahaan-perusahaan pertambangan.

- Wilayah Batumandi, Lampihong, Paringin Selatan dan sepanjang DAS Sungai Balangan perlu didorong pertumbuhan aktivitas perikanan.
- Wilayah kecamatan Awayan dan Juai merupakan basis komoditas karet di Kabupaten Balangan.

Adapun fungsi masing-masing pusat kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perkotaan Paringin di Kecamatan Paringin, dengan fungsi pelayanan :

- a. pusat pelayanan perekonomian yaitu sebagai kawasan perdagangan skala regional kabupaten dan provinsi, meliputi pusat perbelanjaan pasar skala regional kabupaten.
- b. pusat pelayanan jasa yaitu perbankan cabang, lembaga asuransi cabang, perhotelan dan perusahaan jasa swasta lainnya;
- c. pusat pelayanan kesehatan berupa rumah sakit tipe C, dokter spesialis, apotik;
- d. pusat pengembangan fasilitas pendidikan (PAUD, TK, SD, SLTP dan SLTA / Kejuruan, pesantren dan Perguruan tinggi)
- e. pusat olah raga/rekreasi meliputi gedung olah raga (GOR) yang merupakan kompleks fasilitas olah raga dan gedung hiburan
- f. pengembangan ruang terbuka hijau yang dapat dijadikan tempat rekreasi bagi masyarakat;
- g. pengembangan sarana transportasi terminal tipe C;
- h. pengembangan wisata buatan dan budaya atau spiritual;
- i. pusat pengembangan perkantoran kabupaten meliputi kantor-kantor pemerintahan skala kabupaten;
- j. pusat pelayanan hankam;
- k. Pusat pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, perbengkelan dan pergudangan;
- l. pusat pengembangan permukiman perkotaan dan fasilitas penunjang.

2. Perkotaan Paringin Selatan di Kecamatan Paringin Selatan, dengan fungsi pelayanan :

- a. Pusat jasa pendukung kegiatan pemerintahan (perkantoran), pelayanan umum dan layanan sosial;
- b. pusat pelayanan jasa yaitu perbankan cabang, lembaga asuransi cabang, perhotelan dan perusahaan jasa swasta lainnya;
- c. pusat pelayanan kesehatan;

- d. pusat pengembangan fasilitas pendidikan (PAUD, TK, SD, SLTP dan SLTA / Kejuruan, pesantren dan Perguruan tinggi)
 - e. pengembangan ruang terbuka hijau yang dapat dijadikan tempat rekreasi bagi masyarakat;
 - f. pengembangan sarana transportasi terminal tipe B
 - g. pengembangan wisata buatan dan budaya atau spiritual;
 - h. pusat pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;
 - i. pusat pengembangan permukiman perkotaan dan fasilitas penunjang;
 - j. Pusat kegiatan keagamaan.
3. Fungsi pelayanan pusat kegiatan lokal promosi (PKLp) Perkotaan Batumandi, meliputi:
- a. pusat pemerintahan kecamatan;
 - b. pusat perdagangan dan jasa meliputi perbankan, pasar lokal dan pasar hewan serta pelayanan kesehatan berupa puskesmas, bidan;
 - c. pusat pengembangan fasilitas pendidikan (TK, SD, SLTP dan SLTA dan Kejuruan serta pesantren);
 - d. transportasi terminal tipe C dan terminal agribisnis untuk mendukung agropolitan;
 - e. pelayanan pemerintah, meliputi kantor kecamatan dan dipo kebersihan;
 - f. pusat pelayanan lintas kecamatan; dan
 - g. pusat pengembangan perumahan dan fasilitas penunjangnya; dan
 - h. pusat kegiatan industri kecil rumah tangga pengolahan hasil pertanian.
 - i. Pusat pengembangan komoditas pertanian dan hortikultura;
 - j. Pusat kegiatan keagamaan.
4. Fungsi Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi :
- a. PPK Muara Pitap berada di Kecamatan Paringin Selatan, dengan fungsi pelayanan :
 - 1. Pusat pemerintahan kecamatan;
 - 2. Pusat pelayanan sosial, kesehatan dan umum;
 - 3. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjang;
 - 4. Pusat pengembangan perkantoran;
 - 5. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan meliputi PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA atau sederajat;

- b. PPK Simpang Tiga berada di Kecamatan Lampihong dengan fungsi pelayanan :
 - 1. Pusat pemerintahan kecamatan;
 - 2. Pusat pelayanan sosial, kesehatan dan umum;
 - 3. Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian dan hortikultura, perikanan dan peternakan;
 - 4. Pusat pengembangan industri kecil
 - 5. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjang;
 - 6. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan meliputi PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA
 - c. PPK Putat Basiun berada di Kecamatan Awayan dengan fungsi pelayanan :
 - 1. Pusat pemerintahan kecamatan;
 - 2. Pusat pelayanan sosial, kesehatan dan umum;
 - 3. Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian, hortikultura dan peternakan;
 - 4. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjang;
 - 5. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan meliputi PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA atau sederajat.
 - d. PPK Tebing Tinggi berada di Kecamatan Tebing Tinggi dengan fungsi pelayanan :
 - 1. Pusat pemerintahan kecamatan;
 - 2. Pusat pelayanan sosial, kesehatan dan umum;
 - 3. Pusat pengembangan pariwisata alam dan budaya;
 - 4. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjang;
 - 5. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan meliputi PAUD, SD, SLTP, SLTA atau sederajat
 - e. PPK Mungkur Uyam berada di Kecamatan Juai dengan fungsi pelayanan :
 - 1. Pusat pemerintahan kecamatan;
 - 2. Pusat pelayanan sosial, kesehatan dan umum;
 - 3. Pusat pengembangan industri kecil;
 - 4. Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian dan hortikultura;
 - 5. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjang;
 - 6. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan meliputi PAUD, SD, SLTP, SLTA atau sederajat.
 - f. PPK Halong berada di Kecamatan Halong dengan fungsi pelayanan :
 - 1. Pusat pemerintahan kecamatan;
-

2. Pusat pelayanan sosial, kesehatan dan umum;
3. Pusat pengembangan pariwisata alam dan budaya;
4. Pusat pengumpul komoditas pertanian dan hortikultura;
5. Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian dan hortikultura;
6. Pusat pengembangan perdagangan dan jasa lokal;
7. Pusat pengembangan industri kecil;
8. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan meliputi PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA atau sederajat;
9. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjang;

(2) Fungsi Pusat Pelayanan Lokal (PPL) dengan fungsi kegiatan sebagai pusat pelayanan sosial, kesehatan dan umum, komersial, pariwisata, industri kecil, pengembangan pertanian, hortikultura, peternakan, perikanan yang melayani kegiatan skala antar desa, terdiri atas :

- a. PPL Mantimin berada di Kecamatan Batumandi;
- b. PPL Pudak berada di Kecamatan Awayan;
- c. PPL Bihara berada di Kecamatan Awayan;
- d. PPL Tabuan berada di Kecamatan Halong;
- e. PPL Mauya berada di Kecamatan Halong;
- f. PPL Haur Batu berada di Kecamatan Paringin;
- g. PPL Gunung Pandau berada di Kecamatan Paringin Selatan;
- h. PPL Layap berada di Kecamatan Paringin; dan
- i. PPL Bungin berada di Kecamatan Paringin Selatan.

4) Sistem Jaringan Transportasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP). Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), diatur melalui Sistem Jaringan Transportasi Nasional (Sistranas) mengenai jaringan jalan nasional terdiri atas jalan arteri primer, kolektor primer, jalan strategis nasional, dan jalan tol.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi darat di Kabupaten Balangan meliputi :

1. Jaringan jalan dan jembatan
2. Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
3. Jaringan layanan lalu lintas

4.1). Jaringan Jalan dan Jembatan

- a. Rencana Pengembangan Jalan Arteri Primer (A1) yang merupakan kewenangan nasional, meliputi :
 - 1) Nomor Ruas 037 Desa Hamparaya (Batas Kabupaten Hulu Sungai Tengah) – Batumandi – Desa Mantimin 5,237 km.
 - 2) Nomor Ruas 038 Desa Mantimin – Paringin 10,682 km.
 - 3) Nomor Ruas 039 Paringin – Dahai/Desa Padang Panjang (Batas Kabupaten Tabalong) 11,021 km.
- b. Rencana Pengembangan Jalan Kolektor Primer (K1) yang merupakan jalan kewenangan provinsi yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/ kota, meliputi :
 - 1) Desa Teluk Karya (Batas Kabupaten Hulu Sungai Utara) - Lampihong;
 - 2) Lampihong - Mantimin;
 - 3) Lampihong - Paringin; dan
 - 4) Paringin - Halong .
 - 5) Batumandi – Lok Batu – Tariwin
- c. Jaringan jalan kewenangan kabupaten terdiri atas :
 1. rencana pengembangan jalan kolektor primer (K-1) yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan kecamatan, terdiri atas ruas jalan :
 - a. Paringin - Awayan;
 - b. Awayan - Tebing Tinggi; dan
 - c. Jalan lingkar barat dan jalan lingkar timur di Kec. Paringin dan Kec. Paringin Selatan.
 2. rencana pengembangan jalan kolektor sekunder (K-2) yang menghubungkan antar ibu kota kecamatan, terdiri atas ruas jalan :
 - a. Lokbatu (Kec. Batumandi) – Muara Jaya (Kec. Awayan); dan
 - b. Juai – Awayan;
 3. rencana pengembangan jalan lokal yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan pusat desa serta menghubungkan antardesa dan jalan lingkungan

- d. Jaringan jalan khusus untuk kawasan pertambangan antara lain :
1. jaringan jalan yang melalui Desa Lasung Batu, Desa Sungai Ketapi, Desa Dahai di Kecamatan Paringin;
 2. jaringan jalan pada ruas Uren - Mamantang - Batas Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
 3. jaringan jalan pada ruas Tundakan – Pamurus – Balang;
 4. jaringan jalan pada ruas Handiwin – Gunung Riut – Puyun – Batas Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.
- e. Jaringan jalan strategis provinsi (SP) pada ruas Halong – Magalau (Kab. Kota Baru).
- f. Rencana Jaringan jalan lokal primer, terdiri atas :
- 1) rencana pengembangan jalan lokal primer (L-1) yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan kecamatan, terdiri atas ruas jalan :
 - Paringin - Juai;
 - Paringin - Awayan;
 - Batumandi - Awayan;
 - Awayan - Tebing Tinggi; dan
 - Mauya - Batas Kabupaten Paser (Provinsi Kalimantan Timur).
 - 2) rencana pengembangan jalan lokal primer (L-2) yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan pusat desa meliputi 33 ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - 3) rencana pengembangan jalan lokal primer (L-3) yang menghubungkan antar ibukota kecamatan berupa ruas jalan Mungkur Uyam - Baruh Panyambaran.
 - 4) rencana pengembangan jalan lokal primer yang menghubungkan antardesa (L-5) meliputi 70 ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- g. Jaringan jalan lokal sekunder meliputi jaringan jalan poros desa tersebar di 149 desa dan 3 kelurahan yang ada di kabupaten.

5) Jaringan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- a. Rencana pengembangan terminal penumpang
 - 1) terminal penumpang tipe C di Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin;
 - 2) rencana pengembangan terminal penumpang tipe B di Kelurahan Batu Piring atau Desa Haur Batu; dan
 - 3) rencana pengembangan sub terminal penumpang di Desa Batu Mandi, Desa Halong, Desa Simpang Tiga, Desa Mungkur Uyam, Desa Putat Basiun, Desa Simpang Nadung;
- b. Rencana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi rencana pengembangan terminal barang di Desa Haur Batu di Kecamatan Paringin
- c. Rencana jaringan layanan lalu lintas di Kabupaten BALANGAN meliputi :

1) Trayek angkutan perkotaan

1. dilintasi oleh angkutan bus dalam sistem jaringan pelayanan angkutan umum kota antar Provinsi (AKAP) berupa trayek Banjarmasin - Paringin - Samarinda;
2. dilintasi oleh rute angkutan umum antar kota dalam provinsi berupa trayek Pantai Hambawang - Barabai - Batu Mandi - Paringin dan Paringin - Lampihong - Amuntai;
3. rencana pengembangan angkutan bus dalam sistem jaringan pelayanan Angkutan Umum Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang belum terlayani berupa trayek Banjarmasin - Batu Mandi – Paringin - Halong; dan
4. rencana rute angkutan umum meliputi :
 1. trayek Paringin - Awayan -Tebing Tinggi; dan
 2. trayek Lampihong - Batu Mandi - Awayan;

2) Trayek angkutan perdesaan

1. rencana pengembangan rute angkutan umum pedesaan dari trayek rintisan yang sudah ada berupa trayek Paringin - Juai - Halong; dan
2. rencana rute angkutan umum pedesaan berupa trayek Juai - Awayan - Tebing Tinggi.

6). Jaringan Energi

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan dalam menunjang kesejahteraan hidup masyarakat. Pemakaian energi listrik akan semakin terasa pentingnya dari waktu ke waktu, seiring dengan perkembangan teknologi yang umumnya menggunakan energi listrik sebagai sumber tenaga. Oleh karena itu, pemakaian energi listrik di Kabupaten Balangan tidak semata-mata sebagai sumber penerangan di malam hari, tetapi juga menunjang kegiatan sehari-hari pada berbagai aspek kehidupan. Dengan kondisi yang ada sekarang maka untuk sistem pelayanannya masih diperlukan pengembangan karena yang terlayani sekarang masih belum efektif.

Kebutuhan listrik di kabupaten Balangan meliputi standar kebutuhan perencanaan listrik yang mencapai kapasitas rumah tangga mencapai 900 watt, untuk fasilitas umum mencapai 30% dari fasilitas rumah tangga, untuk penerangan jalan mencapai 2% dari rumah tangga.

Kebutuhan listrik di Kabupaten Balangan disuplai oleh 2 (dua) Gardu Induk yaitu GI Tanjung di Kabupaten Tabalong dan GI Amuntai di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan jaringan transmisi adalah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan GI Amuntai dan dan GI Tanjung.

Pembangunan GI dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Kebutuhan (*Demand*) beban yang semakin meningkat, mendekati bahkan melebihi kemampuan GI yang ada.
- b. Jika kondisi GI eksisting masih memungkinkan, biasanya cukup dilakukan *uprating* atau menaikkan kapasitas GI yang ada, misalnya dengan melakukan penggantian dan penambahan transformator daya.
- c. Adanya perluasan daerah/ wilayah atau adanya daerah/ wilayah baru, yang pasti membutuhkan ketersediaan/ pasokan daya listrik cukup besar.
- d. Adanya pembangunan infra struktur bagi kawasan industri (*industrial estate*).
- e. Proyeksi kebutuhan daya listrik untuk jangka waktu tertentu, sehingga perlu disiapkan gardu induk baru atau perluasan gardu induk.
- f. Adanya pengembangan sistem tenaga listrik secara terpadu, misalnya pembangunan pembangkit listrik - pembangkit listrik baru, sehingga dilakukan perluasan sistem penyaluran (transmisi), tentunya dibarengi dengan pembangunan GI baru atau perluasan.

Adapun perencanaan pengembangan jaringan energi di Kabupaten Balangan dalam rangka meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat diantaranya dilakukan dengan :

- a. Penambahan daya dan jaringan energi listrik di seluruh kecamatan disesuaikan dengan demand;
- b. Pengembangan sistem distribusi tenaga listrik di Kabupaten Balangan;
- c. Pembangunan jaringan energi listrik; (di sebagian Kecamatan Halong dan sebagian Kecamatan Tebing Tinggi);
- d. Pengusahaan listrik masuk desa dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat;
- e. Prasarana energi dapat dibangun bersamaan dengan dan atau memanfaatkan jaringan jalan guna memudahkan distribusi pada wilayah-wilayah pelayanan;
- f. Pengusahaan partisipasi badan-badan usaha (negeri dan swasta) untuk berperan dalam pelayanan listrik; dan
- g. Mengusahakan sumber energi sebagai pengganti energi bahan bakar minyak, meliputi energi tidak terbarukan (batubara, gas metan, dll), dan terbarukan (tenaga air, tenaga matahari, bio gas, bio diesel dan limbah);
- h. Penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana energi dan sistem jaringan energi disiapkan dengan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten.

7) Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi kabupaten terdiri dari sistem jaringan kabel dan nirkabel. Adapun perencanaan untuk peningkatan pelayanan jaringan kabel berupa pelayanan telepon umum dan layanan sambungan tak bergerak (*fixed telephone*) dilakukan oleh PT. Telkom yaitu meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi pada pusat-pusat kegiatan dan kawasan strategis meliputi Kecamatan Kecamatan Paringin, Kecamatan Paringin Selatan, Kecamatan Juai, dan Kecamatan Batu Mandi dalam rangka meningkatkan pelayanan telekomunikasi bagi masyarakat dan dunia usaha.

Eksisting menara BTS di Kabupaten Balangan ada di Kecamatan Lampihong (Desa Simpang Tiga dan Desa Lajar), Juai (Desa Marias, Desa Mungkur Uyam, Desa Tawahan), Halong (Desa Halong), Paringin Selatan (Desa Margo Mulyo, Desa Harapan Baru), Paringin (Desa Balida, Kelurahan Paringin Kota, Desa Lesung Batu dan Desa Dahai), Awayan (Desa Pandam, Desa Pulantan, Desa Putat Basiun), Batumandi (Desa Batumandi, Desa Mampari). Direncanakan untuk kedepannya pembangunan menara

BTS di setiap desa-desa pusat pertumbuhan dan desa-desa pelosok dalam rangka meningkatkan pelayanan telekomunikasi.

Sedangkan untuk perencanaan sistem jaringan nirkabel dalam hal ini adalah *mobile cellular service* oleh operator cellular berupa peningkatan jaringan dan cakupan pelayanan melalui pembangunan *base transceiver station* (BTS) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Pembangunan menara jaringan telekomunikasi/ BTS meliputi Kelurahan Batu Piring, Kelurahan Paringin Timur, Desa Tabukan, Desa Mauya, Desa Simpang Nadung, Desa Tebing Tinggi, dan Dayak Pitap;
- Rencana pengembangan menara jaringan telekomunikasi untuk melayani kebutuhan telekomunikasi pada desa-desa pusat pertumbuhan dan terutama pada wilayah yang belum terjangkau layanan telekomunikasi; dan
- Rencana pengembangan serat optik yang meliputi Kecamatan Batu Mandi, Paringin Selatan dan Paringin

8) Jaringan Sumber Daya Air

Jaringan sumber daya air meliputi wilayah sungai, cekungan air tanah, jaringan irigasi, jaringan air baku untuk air minum, dan sistem pengendalian banjir. Wilayah sungai (WS) Kabupaten Balangan adalah WS Barito mencakup Daerah Aliran Sungai Barito. Cekungan Air Tanah Kabupaten Balangan adalah Cekungan Air Tanah Palangkaraya-Banjarmasin. Jaringan irigasi Kabupaten Balangan dibagi menjadi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yaitu D.I. Bendung Pitap di Kecamatan Awayan yang merupakan penggabungan dari beberapa jaringan irigasi, meliputi :

- 1) D.I. Paringin;
- 2) D.I. Putat Basiun;
- 3) D.I. Lok Batu; dan
- 4) D.I. Sikuntan.

dan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten yang terdiri dari :

- 1) D.I. Batu Mandi;
- 2) D.I. Lok Batu;
- 3) D.I. Paran;
- 4) D.I. Suapin; dan

5) D.I.Tindakan.

Untuk meningkatkan ketersediaan jaringan irigasi direncanakan pembangunan Bendung Bihara dalam rangka mengatasi permasalahan air pada daerah hulu agar pembagian aliran ke daerah hilir dapat terbagi dengan baik. Bendung Pitap yang merupakan bendung nasional dalam jaringan irigasi nasional yang meliputi saluran irigasi primer dan sekunder.

Rencana pengembangan jaringan irigasi meliputi :

- a. rencana pengembangan kapasitas jaringan irigasi provinsi di Bendungan Balangan;
- b. rencana pengembangan daerah irigasi (DI) Provinsi berupa D.I Bendung Pitap;
- c. rencana pengembangan saluran rawa provinsi di Kecamatan Batu Mandi;
- d. rencana pengembangan daerah rawa di Kecamatan Batu Mandi;
- e. Rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi yang ada; dan
- f. Pengembangan daerah irigasi pada seluruh daerah potensial yang memiliki lahan pertanian yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan.

Rencana jaringan air baku untuk air minum meliputi

- a. rencana pengembangan sumber air baku, meliputi :
 - 1) Bendung Pitap, Bendung Bihara; dan
 - 2) Sungai Balangan
- b. Saluran Air Baku (SAB) Perusahaan Air Minum di Balangan yang merupakan Saluran Air Baku (SAB) nasional dalam jaringan air bersih nasional.

Sistem pengendalian banjir, meliputi :

- a. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir di seluruh sungai rawan banjir; dan
- b. normalisasi sungai-sungai di kabupaten meliputi sungai Balangan

9) Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Rencana sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan terdiri dari sistem pengelolaan persampahan, sistem jaringan air minum, sistem drainase, sistem jaringan air limbah, jalur evakuasi bencana, sistem proteksi kebakaran.

a. Rencana sistem pengelolaan persampahan

Sistem pengelolaan persampahan meliputi rencana pengembangan sistem jaringan prasarana persampahan berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Batu Merah di Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong dengan cakupan pelayanan Kabupaten Balangan. Sistem pengelolaan direncanakan menggunakan sistem *sanitary landfill* untuk

sampah domestik dan sampah non domestik dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPA sistem *sanitary landfill* dan TPA sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;

Rencana pengembangan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) diarahkan untuk diletakkan di pusat-pusat permukiman dan pusat kegiatan di seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Balangan. Sedangkan pada fasilitas- sosial dan fasilitas umum wajib dilengkapi dengan menempatkan sarana persampahan berupa container minimal tempat sampah/ bak sampah. Untuk memudahkan pembuangan sampah dan penerapan konsep 3R maka untuk TPS diterapkan sistem pemilahan sampah, untuk sampah kering, sampah basah, sampah yang bisa didaur ulang.

Rencana pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dengan konsep 3 R (Reduce, Reuse dan Recycle) yaitu mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang yang terdapat di Kecamatan Paringin. Kemudian dari segi pengangkutan diperlukan adanya sistem pengaturan dan penjadwalan untuk pengambilan sampah sehingga sampah tidak sempat menumpuk karena tidak terangkut. Selain itu juga perlu diperhatikan manajemen organisasi operasional kebersihan dan persampahan yaitu peningkatan koordinasi dan kerjasama instansi operasional kebersihan dan peningkatan peran masyarakat dan swasta untuk pengelolaan persampahan.

b. Rencana sistem jaringan air minum

Rencana sistem jaringan air minum dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Saluran Air Baku (SAB) perusahaan air minum Balangan yang merupakan Saluran Air Baku (SAB) nasional dalam jaringan air bersih nasional;
- b. rencana jaringan air bersih ke kelompok pengguna berupa Rencana Instalasi Pengolahan Air (IPA) bersih, meliputi :
 - 1) IPA Bt. Pelantuk di Kecamatan Halong;
 - 2) IPA Sungai Batung di Kecamatan Juai;
 - 3) IPA Mantimin di Kecamatan Batu Mandi;
 - 4) IPA Sungai Balangan di Kecamatan Lampihong;
 - 5) IPA Simpang Nadung di Kecamatan Tebing Tinggi;
 - 6) IPA Awayan di Kecamatan Awayan;
 - 7) IPA Paringin I;
 - 8) IPA Paringin II; dan
 - 9) IPA Paringin III.

- c. penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat berupa penyediaan sarana air bersih meliputi sumur bor, sumur gali dan hidran umum di seluruh Kecamatan di Kabupaten Balangan.

2.1.4. Rencana Kawasan Lindung

Kawasan lindung menurut Keppres No. 32/1990, adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam, kawasan suaka laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, dan kawasan rawan bencana. Berdasarkan Kemenhut No.453/Kpts-II/1999 Kawasan Hutan di Kab. Balangan seluas 90.643 Ha yang terdiri atas HL = 51.938 Ha; HP = 31.195 Ha; dan HPT = 7.510 Ha. Dan jika berdasarkan Kemenhut No.435/Kpts-II/2009 Kawasan Hutan di Kab. Balangan seluas 90.373 Ha yang terdiri atas HL = 65.791 Ha; HP = 24.568 Ha; dan HPT = 24 Ha.

Sedangkan jika berdasarkan interpretasi citra satelit pada tahun 2007 Wilayah Kawasan Lindung di Kabupaten Balangan berdasarkan daerah limitasi yang meliputi 77.840,77 ha atau sekitar 41,44 persen dari keseluruhan luas Kabupaten Balangan. Kawasan Lindung di Kabupaten Balangan tersebar di seluruh bagian Kabupaten Balangan meliputi Hutan Lindung, Sempadan Sungai, Rawan Banjir, dan Rawan Longsor di Kecamatan Awayan 18.698,7 (24 persen); Kecamatan Batu Mandi 766,8 (0,9 persen); Kecamatan Halong 41.676,9 (53,5 persen); Kecamatan Juai 5.254,7 (6,7 persen); Kecamatan Lampihong 3.345,2 (4,3 persen); Kecamatan Paringin Selatan 3.836,7 (4,9 persen); Kecamatan Paringin 3.143,3 (4 persen); dan Kecamatan Tebing Tinggi 1.118,2 (1,4 persen).

2.1.5. Rencana Kawasan Budidaya

Pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya di Kabupaten Balangan masih tetap memperhatikan kecenderungan pemanfaatan ruang saat ini. Berdasarkan interpretasi citra satelit pada tahun 2007 rencana kawasan budidaya di Kabupaten Balangan sebesar 109.989,23 ha atau sebesar 58,56 persen, yang tersebar diseluruh daerah di Kabupaten Balangan. Adapun sebaran kawasan budidaya meliputi Kecamatan Awayan 11.162 Ha (10 persen); Kecamatan Batu Mandi 10.519 Ha (9,56 persen); Kecamatan Halong 31.553 Ha (28,69 persen); Kecamatan Juai 17.546 Ha (15,95 persen);

Kecamatan Lampihong 7.895 (7,18 persen); Kecamatan Paringin Selatan 6.539 Ha (5,59 persen); dan Kecamatan Paringin 11.073 Ha (10,07 persen) dan Kecamatan Tebing Tinggi 13.698 Ha (12,45 persen).

Perwujudan pola ruang kawasan budidaya dalam RTRW Kabupaten Balangan adalah meliputi Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian, Kawasan Perkebunan/Tanaman Tahunan, Kawasan Peternakan dan Perikanan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Permukiman.

2.1.6. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana tanah longsor berada di Bagian utara timur Kabupaten Balangan yang berbatasan dengan Kalimantan Timur yaitu Kecamatan Halong, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, potensi dapat terjadi pada sekitar daerah kemiringan lereng 25-40 persen dan lebih dari 40 persen dengan ketinggian 500 mdpl. Faktor yang mempengaruhi proses gerakan tanah adalah kemiringan lereng yang curam sehingga memiliki lereng yang rendah, curah hujan yang tinggi pada suatu daerah, gravitasi, vegetasi dan daya dukung tanah yang rendah atau lemah yang dimiliki oleh batuan atau tanah, dan struktur geologi yang berkembang di daerah Kabupaten Balangan. Faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan menentukan besar dan luasnya gerakan tanah. Berdasarkan tipe gerakan tanah dan jenis materialnya dapat dibagi menjadi longsor mendatar dan jatuhnya batuan.

Potensi rawan bencana lainnya adalah banjir yang berada pada areal sektor sungai Balangan dan sungai Pitap yakni sekitar kecamatan Lampihong, Paringin dan kecamatan Juai. Bencana banjir terjadi akibat dari beberapa faktor, hal ini berkaitan dengan jumlah curah hujan yang terjadi dengan daya tampung dari akuifer dan cekungan-cekungan ataupun alur sungai yang ada di daerah kabupaten Balangan. Akumulasi air hujan yang lebih besar dari kapasitas tampungan akan mengakibatkan banjir. Kapasitas tampung yang kurang disebabkan porositas yang buruk pada batuan setempat, berkurangnya vegetasi akibat pengebangan hutan yang kurang terencana dan terkendali ataupun bencana kebakaran dan semakin dangkalnya cekungan ataupun alur sungai akibat proses sedimentasi.

2.1.7. Demografi

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan jumlah penduduk Kabupaten Balangan pada tahun 2012 adalah sebesar 151.875 jiwa. Angka ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 114.009 jiwa, yang terdiri dari 31.587 rumah tangga yang tersebar di 152 Desa/Kelurahan. Kabupaten dengan luas wilayah 1.878,30 km² ini memiliki kepadatan penduduk (*population density*) 62 jiwa per km². Dari total penduduk yang ada, sebanyak 76.502 laki-laki dan 75.373 perempuan, dengan

sebarannya hampir merata di masing-masing kecamatan, terbanyak terdapat di Kecamatan Halong yaitu 26.339 jiwa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi yaitu 9.056 jiwa. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.8. dan Tabel 2.9.

Tabel 2.7.
Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Rumah Tangga
Dan Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2015

Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah/total		
		Desa/Kel.	Rumah tangga	Penduduk
1. Lampihong	96,96	27	5.130	16.944
2. Batumandi	147,96	18	5.363	17.418
3. Awayan	142,57	23	4.245	13.939
4. Tebing Tinggi	257,25	12	1.881	6.280
5. Paringin	100,04	16	5.349	17.614
6. Paringin Selatan	86,80	16	3.822	12.515
7. Juai	386,88	21	5.209	17.392
8. Halong	659,84	24	6.433	21.393
Jumlah	1.878,30	157	37.432	123.495

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2016

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2015-2016

Kecamatan	Jenis Kelamin				Jumlah Penduduk		Rasio Jenis	
	Laki-laki		Perempuan				Kelamin	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
1. Lampihong	8,568	9,195	8,376	8,946	16,944	18,141	102	102,02
2. Batumandi	8,877	9,292	8,541	8,868	17,418	18,160	104	105,51
3. Awayan	6,944	6,718	6,995	6,699	13,939	13,417	99	100,28
4. Tebing Tinggi	3,206	3,539	3,074	3,463	6,280	7,002	104	104,78
5. Paringin	8,790	9,160	8,824	9,154	17,614	18,314	100	102,78
6. Paringin Selatan	6,294	6,808	6,221	6,773	12,515	13,581	101	100,06
7. Juai	8,815	8,474	8,577	8,306	17,392	16,780	103	100,51
8. Halong	10,985	10,021	10,408	9,497	21,393	19,518	106	102,19
Jumlah	62,479	63,207	61,016	61,016	123,495	124,913	102	102,43

Sumber: BPS Kabupaten Balangan Tahun 2016

2.1.8. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Makro Ekonomi Balangan

Struktur ekonomi suatu wilayah adalah gambaran bagaimana sektor-sektor perekonomian yang ada di wilayah tersebut dalam membentuk kekuatan yang mendorong laju perekonomian. Kontribusi yang terbentuk dari setiap sektor dalam pembentukan nilai tambah akan membentuk struktur ekonomi, sehingga dari komposisi itu akan diketahui potensi, dominasi, andalan, serta hasil pembangunan maupun perubahan yang diakibatkan adanya kebijakan pemerintah.

Keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan salah satunya di bidang ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi pada dasarnya mengoptimalkan peran sumber daya alam dalam menciptakan kenaikan pendapatan yang terakumulasi pada kategori-kategori lapangan usaha ekonomi, dan tercermin pada besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi per tahun. Pencapaian pertumbuhan ekonomi ini sangat tergantung pad kemampuan daerah dalam membersayakan sumber-sumber alam dan manusia di daerah.

Salah satu kegunaan angka nominal PDRB adalah untuk melihat kinerja perekonomian suatu daerah. Nilai PDRB yang cukup tinggi menunjukkan kinerja perekonomian daerah tersebut cukup berhasil serta memiliki potensi sumber daya yang cukup tinggi karena ketersediaan faktor produksi yang melimpah atau karena efisiensi pengelolaan faktor produksi. Untuk melihat kinerja perekonomian dikabupaten /kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel 2.10.

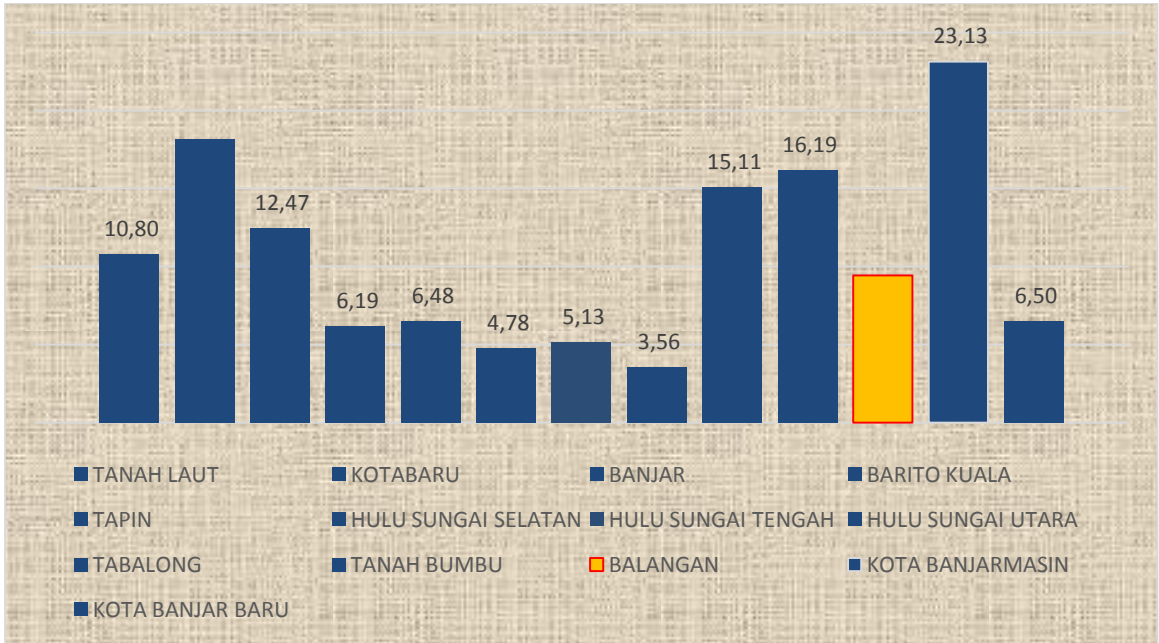
Tabel 2.9 PDRB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Tahun 2014-2016 ^{**) (Milyar Rupiah)}

Kabupaten/Kota	2014 [*]	2015 ^{**}	2016 ^{***}
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah Laut	10,195,238.30	10,795,029.40	
Kotabaru	17,102,929.50	18,191,150.00	
Banjar	11,460,393.70	12,468,952.70	
Barito Kuala	5,523,572.80	6,189,320.80	
Tapin	6,154,630.30	6,477,651.10	
Hulu Sungai Selatan	4,256,326.40	4,780,517.20	
Hulu Sungai Tengah	4,532,734.80	5,126,012.40	
Hulu Sungai Utara	3,146,344.30	3,555,445.40	
Tabalong	14,804,395.00	15,105,297.10	
Tanah Bumbu	15,445,000.90	16,186,572.00	
Balangan	9,376,386.20	9,422,667.10	
Kota Banjarmasin	20,467,634.10	23,129,864.60	
Kota Banjar Baru	5,634,712.20	6,498,029.00	
Kalimantan Selatan	127,882,282.40	137,392,495.10	146,325,615.20

Sumber: Badan Pusat Statistik, (^{*)}Angka Terkoreksi; ^{**)} Angka Sangat; ^{***)} Angka Sangat Sementara)

Dari beberapa faktor produksi yang tersedia, modal luas wilayah (lahan) dan ketersediaan sumber daya alam merupakan salah satu faktor penentu dalam penciptaan nilai tambah. Oleh karenanya, kabupaten/kota yang memilikinya mampu menghasilkan PDRB yang relatif besar. Selain faktor produksi tersebut, ketersediaan prasarana juga turut mempengaruhi pembentukan nilai tambah.

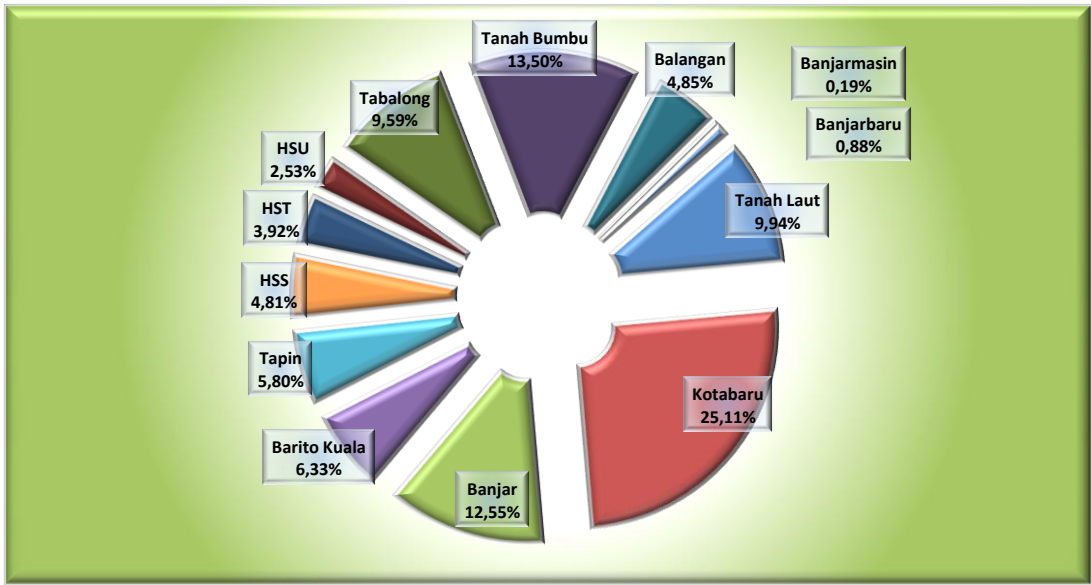
Gambar 2.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 (dalam triliun rupiah)
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan



Sumber: Badan Pusat Statistik

Nilai PDRB Kabupaten Balangan pada tahun 2015 berada di urutan ketujuh jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan. Nilai PDRB tertinggi dicapai oleh Kota Banjarmasin kemudian diikuti oleh Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan nilai PDRB terkecil ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

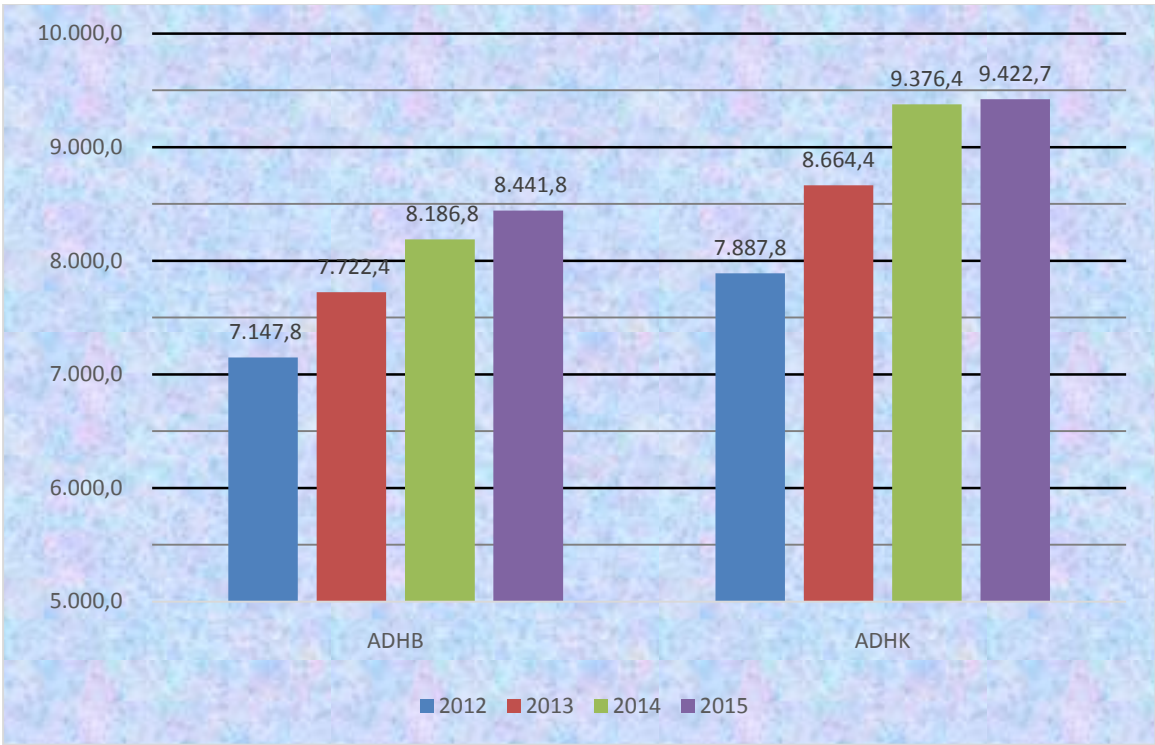
Gambar 2.6 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kalimantan Selatan Dalam Angka 2015

Dengan wilayah yang relatif luas, beberapa kabupaten seperti Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Banjar, Tanah Laut, dan Tabalong mampu mencapai PDRB diatas 10 triliun rupiah. Selain itu, daerah-daerah tersebut juga memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah dibandingkan daerah lain. Sedangkan Kota Banjarmasin yang memiliki luas wilayah yang relatif kecil mampu menghasilkan PDRB yang cukup besar karena didukung oleh kekuatan sektor sekunder dan tersier, yakni dengan cukup banyaknya prasarana untuk kegiatan ekonomi seperti industri, konstruksi, perdagangan, transportasi, penyediaan akomodasi makan dan minum, komunikasi, keuangan, real estate, dan jasa-jasa.

Gambar 2.7 PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (dalam miliar rupiah),2015



Sumber: Badan Pusat Statistik

PDRB Kabupaten Balangan dalam kurun tahun 2012-2015 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2010=100 memperlihatkan kecenderungan terus meningkat. Pada Gambar 2.7 terlihat PDRB atas dasar harga berlaku Balangan mampu mencapai nilai 8.441 miliar rupiah pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 8.186 miliar rupiah di 2014 dan 7.722 miliar rupiah pada tahun 2013. Sementara atas dasar harga konstan, nominal PDRB juga menunjukkan peningkatan yakni pada tahun 2014 mencapai nilai 9.376 miliar rupiah menjadi sebesar 9.422 miliar rupiah di tahun 2015.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu ukuran keberhasilan dalam pembangunan di bidang ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Perkembangan di sektor ekonomi yang terbentuk dari laju pertumbuhan ekonomi dapat memberikan gambaran tingkat perubahan ekonomui yang terjadi. Pergerakan dari laju pertumbuhan merupakan indikator penting untuk mengetahui hasil pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah dan sasaran pembangunan selanjutnya.

Angka pertumbuhan ekonomi dapat pula memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi penduduknya. Hal ini mampu dijelaskan karena pada dasarnya pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (output).

PDRB atas dasar harga konstan secara berkala digunakan untuk melihat pergerakan pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya aktivitas perekonomian, sedangkan pertumbuhan yang negatif menunjukkan penurunan dalam kegiatan ekonomi. Laju pertumbuhan daerah dapat dicerminkan dari indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan pada tahun 2014 dan 2015, menunjukkan pertumbuhan yang positif. Secara umum pertumbuhan positif tersebut terjadi pada semua kategori lapangan usaha. Pada tabel 3.2 dapat dilihat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2014 dan 2015 berkisar dari 2,73 sampai 9,10 persen.

Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi di kabupaten Balangan menunjukkan pertumbuhan yang positif dan melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013. Pertumbuhan cukup tinggi di tahun 2014 ada pada kategori Pengadaan Listrik dan Gas dan kategori Pengadaan Air.

Tabel 2.10 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015 ^{**)} (dalam Persen)

Kategori Lapangan Usaha	2013	2014 ^{*)}	2015 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.44	4.06	4.45
2. Pertambangan dan Penggalian	9.34	6.45	1.94
3. Industri Pengolahan	5.20	4.74	4.67
4. Pengadaan Listrik, Gas	2.61	12.99	16.70
5. Pengadaan Air	3.73	6.48	4.57
6. Konstruksi	6.01	6.05	5.72
7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Kendaraan	6.13	4.33	6.94
8. Transportasi dan Pergudangan	6.79	6.54	5.76
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.43	5.12	4.59
10. Informasi dan Komunikasi	3.46	4.95	5.39
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	6.25	5.43	4.33
12. Real Estate	9.10	5.34	5.03
13. Jasa Perusahaan	7.89	7.54	7.36
14. Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jam. Sosial Wajib	5.69	5.54	8.71
15. Jasa Pendidikan	6.07	6.21	9.43
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.24	5.74	6.17
17. Jasa lainnya	3.64	5.78	6.34
PDRB	8,04	6,01	3,12

Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB tahun 2011-2015

^{*)}Angka Terkoreksi

^{**)}Angka Sementara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan berada pada posisi yang cukup tinggi diantara kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan baik pada tahun 2013, maupun pada tahun 2014. Namun pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan termasuk pertumbuhan yang melambat hal ini sudah terjadi sejak 2014, dan pada tahun 2015 ini berada pada urutan ke tiga terbawah. Kalau dilihat dari ketiga kabupaten pertumbuhan yang melambat adalah daerah-daerah yang sektor perekonomiannya di dominasi oleh sektor pertambangan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.11 di bawah.

Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Dengan Migas Tahun 2013 -2015 ^{**)}(dalam persen)

Kabupaten/Kota	2013	2014 ^{*)}	2015 ^{**)}	2016 ^{***)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1. Banjar	4.6	5.08	4.39	
2. Barito Kuala	4.12	4.43	5.17	
3. Tapin	5.75	5.43	4.06	
4. Hulu Sungai Selatan	5.68	5.79	6.06	
5. Hulu Sungai Tengah	5.83	5.52	6.10	
6. Hulu Sungai Utara	5.34	5.98	5.31	
7. Tabalong	4.36	4.06	2.47	
8. Tanah Bumbu	3.8	3.62	3.01	
9. Balangan	8.04	6.01	3.12	
10. Kota Banjarmasin	6.93	6.41	5.79	
11. Kota Banjar Baru	6.59	6.63	6.86	
Kalimantan Selatan	5,33	4,84	3,83	4,38

Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB tahun 2011-2015

^{*)}Angka Terkoreksi

^{**)}Angka Sementara

^{***)}Angka Sangat Sementara

c. Struktur Ekonomi

Pada dasarnya struktur ekonomi di suatu wilayah tidak akan berubah signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Apalagi pada beberapa wilayah yang sudah mapan, perubahan struktur ekonomi hanya terjadi bila ada suatu perubahan yang drastis dari kegiatan ekonomi, seperti misalnya penanaman modal yang besar pada suatu kategori lapangan usaha tertentu atau perubahan dalam mengimplementasikan teknologi baru. Kategori lapangan usaha yang memiliki daya tahan yang tinggi tentunya akan mampu berkembang sehingga nantinya dapat meningkatkan peranan/kontribusi kategori lapangan usaha yang bersangkutan dalam struktur ekonomi di wilayahnya.

Secara umum, struktur ekonomi dalam PDRB Kabupaten Balangan dalam kurun waktu 2013-2015 menunjukkan komposisi kontribusi kategori lapangan usaha yang relatif stabil setiap tahunnya. Penurunan kontribusi kategori lapangan usaha di tahun 2015 terjadi pada kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Sementara kategori lapangan usaha lainnya ada yang tetap kontribusinya dan rata-rata menunjukkan peningkatan.

Peranan/kontribusi untuk masing-masing kategori lapangan usaha, secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12.
Struktur Ekonomi Kabupaten Balangan Tahun 2013¹⁾ -2015²⁾ (dalam Persen)

Kategori Lapangan Usaha	2013 ¹⁾	2014 ²⁾	2015 ²⁾
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.54	10.73	11.48
Pertambangan dan Penggalian	69.87	68.82	65.30
Industri Pengolahan	1.48	1.51	1.70
Pengadaan Listrik, Gas	0.01	0.02	0.02
Pengadaan Air	0.18	0.19	0.21
Konstruksi	3.30	3.49	3.99
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.04	4.18	4.61
Transportasi dan Pergudangan	1.43	1.52	1.69
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.24	0.25	0.27
Informasi dan Komunikasi	1.09	1.11	1.19
Jasa Keuangan	0.23	0.24	0.27
Real Estate	0.75	0.79	0.85
Jasa Perusahaan	0.05	0.05	0.06
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.51	3.64	4.30
Jasa Pendidikan	2.29	2.39	2.83
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.62	0.66	0.76
Jasa lainnya	0.37	0.40	0.46
PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB tahun 2013-2015

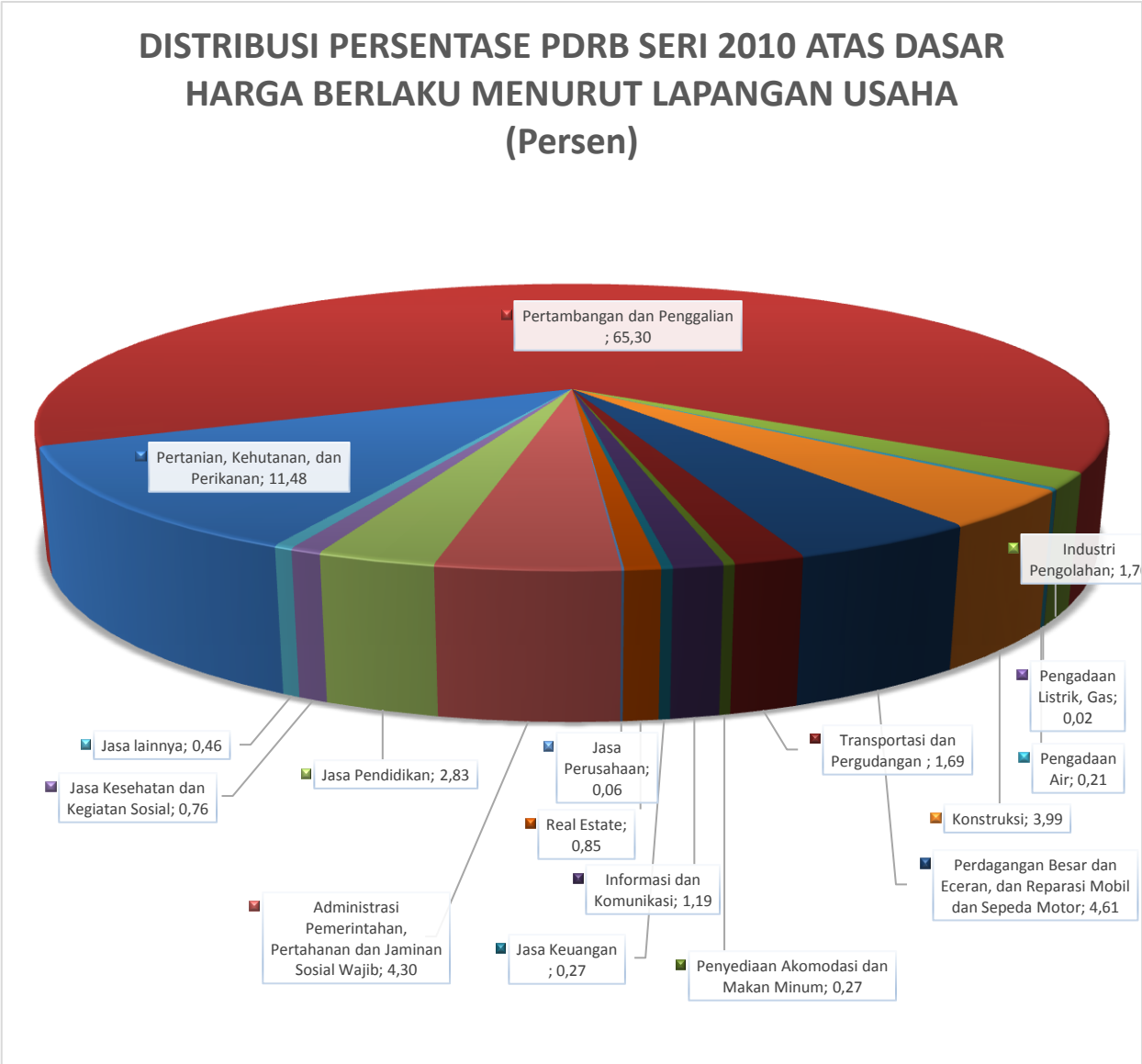
¹⁾Angka Terkoreksi

²⁾Angka Sementara

²⁾Angka Sangat Sementara

Pada tabel 2.12 terlihat bahwa peranan terbesar dalam PDRB Balangan tahun 2015 berada pada kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Dalam kategori ini, mengingat Kabupaten Balangan sebagai salah satu kabupaten penghasil batubara, maka subkategori pertambangan batubara memiliki pengaruh yang sangat besar. Sementara kategori lapangan usaha lainnya selain pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan yang cukup bagus dan mampu mencapai akumulasi total sekitar 34,70 persen, dimana peranan terbesarnya berasal dari kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.

Gambar 2.8 Distribusi PDRB Kabupaten Balangan,2015



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Pada tahun 2015, kategori lapangan usaha yang memiliki peranan yang tinggi dalam struktur ekonomi Balangan masih kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian (65,30 persen), kategori pertanian, kehutanan dan perikanan (11,48 persen), kategori perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor (4,61 persen), kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (4,30 persen), dan kategori konstruksi (3,99 persen). Dari kelima kategori ini, hanya kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan dalam kontribusinya di sektor perekonomian sebesar minus 3,52 persen dibandingkan pada tahun 2014, yaitu dari 68,82 persen menjadi 65,30 persen di tahun 2015.

Setelah melihat gambaran struktur perekonomian dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan selama kurun waktu 2013-2015, maka pemerintah Kabupaten Balangan perlu membuat prioritas kebijakan berkaitan dengan hal tersebut. Penentuan prioritas kebijakan diperlukan agar pembangunan daerah dapat lebih terarah serta mampu berjalan dengan efektif dan efisien, sesuai dengan anggaran yang telah disediakan dan keterbatasan sumber daya yang dapat digunakan. Untuk menentukan prioritas kebijakan pembangunan khususnya di bidang ekonomi, diperlukan analisis ekonomi (struktur ekonomi) daerah secara menyeluruh. Dalam hal ini analisis yang dapat digunakan adalah analisis Tipologi Klassen. Teknik analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan kategori lapangan usaha di daerah. Selain itu, teknik ini juga dapat digunakan untuk mengelompokkan daerah kabupaten/kota dalam provinsi menurut struktur pertumbuhannya.

Tabel 2.13

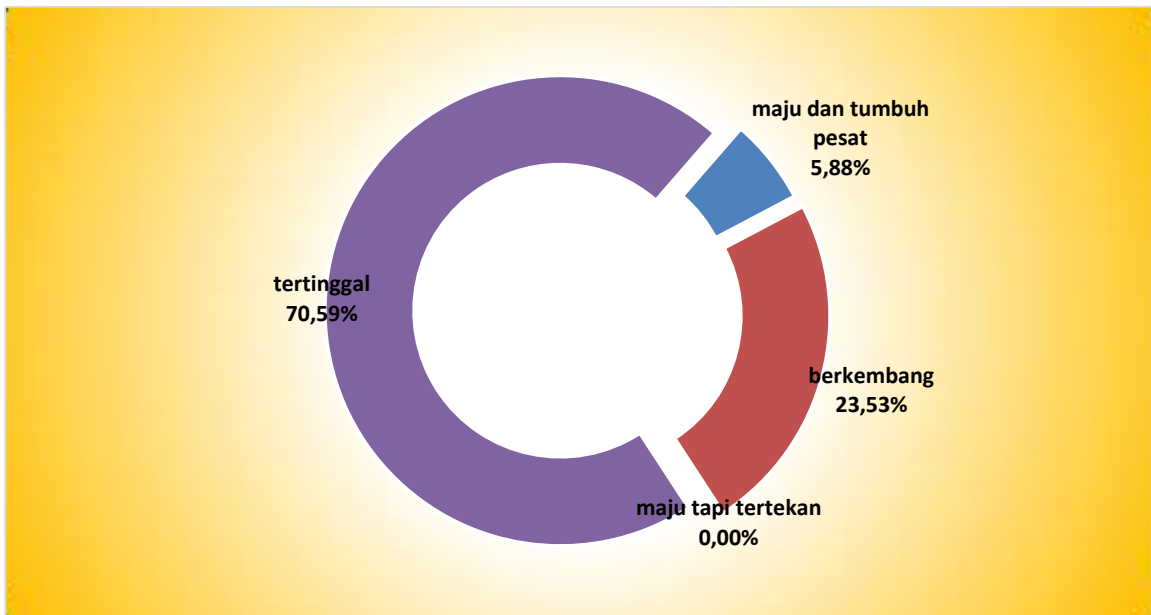
Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan rata-rata Selama Tahun 2012 -2014**) (dalam Persen)

Kategori Lapangan Usaha	Balangan		Kalimantan Selatan	
	Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi)	Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,37	10,66	3,27	14,53
Pertambangan dan Penggalian	7,99	69,62	3,47	28,56
Industri Pengolahan	4,97	1,51	3,63	13,06
Pengadaan Listrik, Gas	2,88	0,01	10,52	0,06
Pengadaan Air	5,10	0,18	5,91	0,36
Konstruksi	6,03	3,36	6,14	7,00
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,23	4,04	8,23	8,14
Transportasi dan Pergudangan	6,66	1,44	6,84	5,58
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,77	0,24	7,07	1,76
Informasi dan Komunikasi	4,79	1,10	8,38	3,07
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,28	0,23	10,68	3,16
Real Estate	8,08	0,75	6,38	2,07
Jasa Perusahaan	5,16	0,05	7,42	0,55
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,62	3,53	5,62	5,61
Jasa Pendidikan	6,14	2,29	8,11	3,88
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,49	0,62	7,76	1,59
Jasa lainnya	6,26	0,38	5,93	1,00
PDRB	7,21	100,00	5,10	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB 2010-2014 diolah

Berdasarkan hasil pengelompokkan kategori lapangan usaha Kabupaten Balangan bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, diketahui bahwa kategori-kategori lapangan usaha yang masuk dalam kelompok maju dan tumbuh pesat adalah kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Kemudian, untuk kelompok kategori berkembang terdiri dari kategori lapangan usaha industri pengolahan, kategori real estat, kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan kategori Jasa lainnya. Sementara itu, tidak ada kategori lapangan usaha di Kabupaten Balangan yang masuk dalam kelompok kategori maju tapi tertekan. Terakhir adalah kelompok kategori tertinggal, yaitu kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, kategori pengadaan listrik dan gas, kategori pengadaan air, kategori konstruksi, kategori perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, kategori transportasi dan pergudangan, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori informasi dan komunikasi, kategori jasa keuangan dan asuransi, kategori jasa perusahaan, kategori jasa pendidikan, dan kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Gambar 2.9 Pengelompokkan Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Balangan Berdasarkan Tipologi Klassen,2014



Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB 2010-2014, diolah

Dari hasil analisis di atas, dikaitkan dengan kegiatan perencanaan untuk pengembangan ekonomi Kabupaten Balangan di masa mendatang antara lain dapat dilakukan strategi pengembangan secara bertahap yang dibagi dalam beberapa periode dan skala prioritas dari ketujuh belas kategori lapangan usaha tersebut. Menurut periode waktunya, misalnya dapat dilakukan pengembangan dalam tiga tahap yakni prioritas pengembangan ekonomi untuk jangka pendek (1-5 tahun), jangka menengah (5-10 tahun), dan jangka panjang (10-25 tahun).

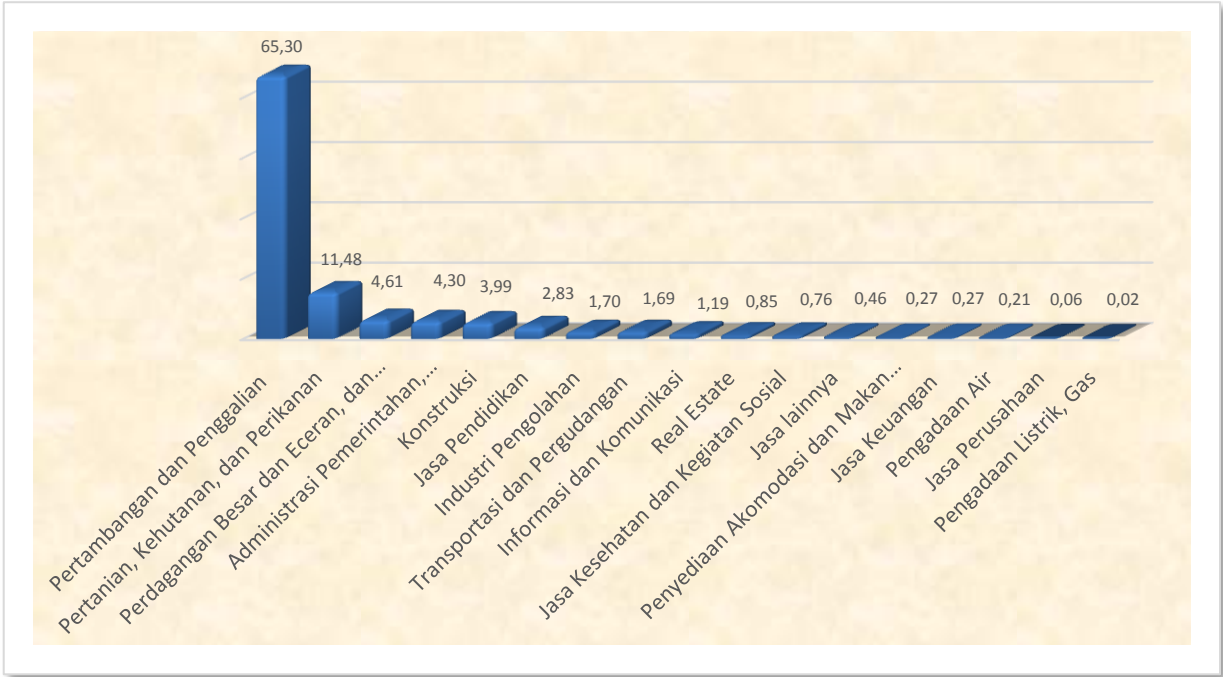
Untuk periode jangka pendek, pemerintah Kabupaten Balangan perlu mengambil langkah untuk meningkatkan kelompok kategori lapangan usaha yang sudah maju menjadi lebih maju lagi. Jangka menengah, pemerintah perlu mengupayakan kelompok kategori lapangan usaha berkembang menjadi sektor maju dengan memperbesar porsi outputnya pada perekonomian Kabupaten Balangan. Kemudian, menjadikan kelompok kategori lapangan usaha tertinggal menjadi kelompok kategori lapangan usaha berkembang. Dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh kelompok kategori lapangan usaha tertinggal, sehingga ditemukan solusi yang tepat untuk kebijakan pengembangan kelompok kategori lapangan usaha tersebut.

Identifikasi potensi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan kategori lapangan usaha dalam perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa dengan segala aspeknya. Meskipun begitu, secara spesifik struktur perekonomian yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing kategori lapangan usaha tadi mempunyai korelasi dan ketergantungan yang komprehensif dalam berproduksi. Secara umum, struktur perekonomian menggambarkan besarnya kontribusi/peranan masing-masing kategori lapangan usaha dalam penciptaan PDRB suatu daerah. Disamping itu, struktur perekonomian juga dapat mencerminkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap suatu kategori lapangan usaha. Kategori lapangan usaha yang mempunyai peranan yang cukup besar akan menjadi andalan bagi daerah.

Selama periode tahun 2012-2014, dari ketujuh belas kategori lapangan usaha yang terangkum dalam PDRB, terdapat beberapa kategori lapangan usaha yang cukup dominan di Kabupaten Balangan. Lima diantaranya adalah kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian, kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, kategori lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan kategori lapangan usaha konstruksi. Untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian kepada kategori-kategori lapangan usaha yang menjadi andalan dan memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian daerah.

Gambar 2.10

Peranan Kategori Lapangan Usaha dalam Perekonomian Kabupaten Balangan,2015



Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB 2010-2014, diolah

Gambar 2.11

Pertumbuhan Ekonomi Kategori Lapangan Usaha dalam Perekonomian Kabupaten Balangan,2015



Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB 2010-2014, diolah

Kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi yang terbesar diantara kategori-kategori lapangan usaha lainnya dalam perekonomian di Kabupaten Balangan. Selama kurun 2012-2015, kategori ini secara rata-rata berkontribusi sebesar 69,62

persen per tahun. Walaupun sangat dominan dalam perekonomian di Kabupaten Balangan, kategori lapangan usaha ini cenderung berkonsentrasi pada usaha yang berskala besar sehingga peningkatan ekonomi pada kategori ini kurang banyak dirasakan oleh masyarakat. Kategori ini dalam kurun waktu 2012-2013 mampu tumbuh secara rata-rata sebesar 7,99 persen per tahunnya.

Kontribusi terbesar kedua berasal dari kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Selama kurun waktu 2012-2014, kategori ini yang mampu menyumbang secara rata-rata sebesar 10,66 persen per tahunnya. Pertumbuhan kategori ini secara rata-rata mencapai 3,97 persen per tahun dalam kurun waktu 2012-2014.

Kontribusi terbesar ketiga berasal dari kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor. Selama kurun waktu 2012-2014, kategori ini yang mampu menyumbang secara rata-rata sebesar 4,04 persen per tahunnya. Pertumbuhan kategori ini secara rata-rata mencapai 7,23 persen per tahun dalam kurun waktu 2012-2014.

Kontribusi terbesar keempat berasal dari kategori lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Selama kurun waktu 2012-2014, kategori ini yang mampu menyumbang secara rata-rata sebesar 3,53 persen per tahunnya. Pertumbuhan kategori ini secara rata-rata mencapai 5,62 persen per tahun dalam kurun waktu 2012-2014.

Kontribusi terbesar kelima dalam PDRB Kabupaten Balangan berasal dari kategori lapangan usaha konstruksi. Selama kurun waktu 2012-2014, kategori ini yang mampu menyumbang secara rata-rata sebesar 3,36 persen per tahunnya. Pertumbuhan kategori ini secara rata-rata mencapai 6,03 persen per tahun dalam kurun waktu 2012-2014.

Selama periode tahun 2012-2014, kategori lapangan usaha yang menjadi andalan di Kabupaten Balangan mulai mengalami pergeseran secara perlahan dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier.

2.1.9. Kesejahteraan Sosial

a) Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di daerah manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Tabel 2.14. Data Kemiskinan Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	2011	114.009	8.334	7,31
2	2012	117.248	8.003	6,86
3	2013	119.171	7.383	6,17
4	2014	122.044	7.660	6.29
5	2015	123.495	7.280	5.87

Sumber Data : BPS Kabupaten Balangan Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 2.14 di atas, maka dapat diketahui bahwa sejak tahun 2008 sampai tahun 2013, persentase angka kemiskinan menurun cukup signifikan. Meningkatnya jumlah penduduk miskin relatif disebabkan oleh pertumbuhan penduduk Balangan yang cukup tinggi dan ditambah dengan migrasi penduduk dari luar Kabupaten Balangan yang tinggi.

Beberapa program pengentasan kemiskinan seperti Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS), Program Jaminan Sosial Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Sosial Daerah (Jamkesda), Pamsimas, PNPM Mandiri Perdesaan, Bantuan Sosial kegiatan Pengelolaan untuk Lahan dan Air, Bantuan Alat dan mesin serta sarana produksi pertanian/perkebunan dan lain-lain yang dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Balangan perlu lebih dipertajam dan dikoordinasikan agar lebih tepat sasaran.

b) Angkatan Kerja dan Produktivitas

Ditinjau dari sektor ketenagakerjaan,tiga perempat penduduk bekerja di Balangan memiliki lapangan pekerjaan utama di sektor primer. Sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 75,35 persen. Sementara sektor tersier dan skunder menyerap tenaga kerja masing-masing 20,71 dan 3,95 persen.

Dilihat dari optimalisasi jam kerja,sebagian besar pekerja (78,51 persen) memiliki jam kerja kurang dari 35 jam setiap minggunya dan sebagian besar pekerja dengan jam kerja dibawah 35 jam/minggu ini adalah pekerja perempuan. Sementara 18,08 persen memiliki jam kerja 35 jam atau lebih selama seminggu dan di dominasi oleh pekerja laki-laki

Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2013 adalah 2,72persen, menurun dibandingkan tahun 2012 yang berkisar 3,81 persen. Penurunan TPT ini diduga disebabkan oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor pertambangan yang ditandai dengan dibukanya perusahaan tambang di Kecamatan Paringin. Dibandingkan dengan wilayah lain di Kalimantan Selatan, angka pengangguran Balangan termasuk yang paling kecil. Kecilnya TPT tersebut tidak terlepas dari karakteristik Balangan sebagai wilayah agraris yang sebagian besar tenagakerja terserap di sektor pertanian. Selain itu juga terkait dengan mayoritas pekerja yang berstatus sebagai pekerja keluarga/pekerjatidak dibayar yang memiliki tingkat keluwesan relatif lebih dibandingkan pekerja formal.

Rendahnya tingkat pengangguran juga tidak terlepas dari karakteristik Balangan sebagai wilayah agraris yang sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor pertanian. Selain itu juga terkait dengan mayoritas pekerja yang berstatus sebagai pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar yang memiliki tingkat keluwesan relatif lebih dibandingkan pekerja formal.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Balangan tahun 2013 adalah 2,72 persen dari angkatan kerja, menurun bila dibandingkan tahun 2012, yakni berkisar 3,81 persen. Persentase terbanyak penganggur terbuka adalah penduduk dengan pendidikan tertinggi SMP yaitu berkisar 4,67 persen, sementara yang berpendidikan SD ke bawah sekitar 4,17 persen dan sebanyak 1,83 persen adalah berpendidikan SMA ke atas.

Selanjutnya, jika ditinjau dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka paling besar (50,19 persen) dari pengangguran ini berpendidikan SMP, sementara yang berpendidikan SD ke bawah sekitar 34,94 persen dan sebanyak 14,88 persen adalah berpendidikan SMA ke atas.

2.1.10. Agama

Agama dan sosial budaya menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam mendukung pelaksanaan pembangunan fisik/material. Setiap individu, keluarga dan masyarakat bebas mengekspresikan kehidupan beragamanya ataupun kepercayaannya. Sebagai makhluk sosial warga masyarakat bebas untuk berserikat atau berkumpul. Hal ini sudah dijamin oleh undang-undang.

Masyarakat di Kabupaten Balangan merupakan masyarakat yang mayoritas beragama islam. Tercatat sebanyak 114.027 orang beragama Islam. Sedangkan tempat peribadatan berdasarkan data yang tercatat di Kementerian Agama, jumlah sarana peribadatan tahun 2013 terdiri dari 128 mesjid, 360 langgar/musholla, 10 gereja, 1 pura, 5 wihara dan 17 balai adat.

Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundan-undangan.

2.1.11. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan, untuk itu Pemerintah Kabupaten Balangan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Pengembangan sarana pendidikan dilakukan sesuai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan oleh penduduk seoptimal mungkin dan pemerataan penyebaran jumlah penduduk yang akan dilayani dan perkiraan tingkat kebutuhan yang telah ditetapkan. Sarana pendidikan yang ada di Wilayah Kabupaten Balangan meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum.

a. Perkembangan Sarana Pendidikan

Jumlah dan kualitas serta sebaran sekolah di Kabupaten Balangan sangat menentukan kualitas dari proses belajar mengajar, karena hal tersebut berpengaruh terhadap komposisi siswa di tiap sekolah.

Tabel 2.15
Perkembangan Sarana PendidikanP di Kabupaten Balangan
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011-2016 (buah

Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TK	76	76	106	113	121	124
SD	159	167	169	172	174	173
SLTP	23	23	23	23	24	24
SMU	9	9	10	14	14	14

Sumber : Dinas Pendidikan& Kementerian Agama Kabupaten Balangan, IPM Tahun 2015

Jika dilihat pada Tabel 2.15. perkembangan sarana dan prasarana pendidikan secara kuantitas meningkat dalam kurun waktu tahun 2008-2013. Untuk Taman Kanak-kanak dari 63 buah pada tahun 2008 meningkat menjadi 103 buah pada tahun 2013, Sekolah Dasar 160 buah pada tahun 2008 menjadi 206 buah tahun 2013.Untuk sekolah lajutan tingkat pertama (SLTP) pada tahun 2008 berjumlah 21 buah meningkat menjadi 40 buah pada tahun 2013, dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dari 7 buah pada tahun 2008 meningkat menjadi 16 buah pada tahun 2013.

Tabel 2.16.
Perkembangan Jumlah Murid di Kabupaten Balangan
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011-2016

Jenjang	Tahun (buah)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TK	2.683	2.683	3.863	4.560	4.736	4.643
SD	16.373	16.261	15.577	12.891	12.447	12.346
SLTP	5.322	5.321	4.893	2.960	3.029	2.986
SMU	3.336	3.683	3.676	2.855	3.103	3.310

Sumber : Dinas Pendidikan& Kementerian Agama Kabupaten Balangan, IPM Tahun 2015

Tabel 2.17.
Rasio Murid-Sekolah, Rasio Murid-Kelas, dan Rasio Murid-Guru
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015

Tingkat Pendidikan	Rasio Murid Sekolah	Rasio Murid-Kelas	Rasio Murid-Guru
Taman Kanan-Kanan (TK)	39	19	15
SD / Sederajat	67	12	8
SLTP / Sederajat	137	26	9
SMU / Sederajat	202	26	9

Sumber : Dinas Pendidikan& Kemeag Kab. Balangan, IPM Tahun 2015

Berdasarkan tabel 2.16 dan 2.17 di atas menunjukkan bahwa pada peningkatan jumlah murid terjadi hanya pada tingkatan TK yaitu dari 2.683 murid tahun 2012 menjadi 3.863 pada tahun 2013, yang berarti ada peningkatan jumlah murid sebesar 1.180 orang. Peningkatan jumlah murid yang cukup banyak ini jika dilihat berdasarkan data sementara juga diikuti oleh penambahan jumlah TK dan ruang kelas.

Jika dilihat berdasarkan rasionya, untuk rasio murid-sekolah menunjukkan kemampuan sekolah menampung murid, terbanyak adalah SMU/Sederajat yaitu 1 : 229,8 artinya 1 sekolah terdapat ± 230 murid sedangkan rasio yang paling sedikit adalah di Taman Kanak-Kanan yaitu 1 : 37,5 (1 sekolah menampung ± 36 murid).

Sedangkan untuk rasio murid-kelas menunjukkan bahwa SMU/Sederajat mempunyai rasio yang tertinggi yaitu 1:26,07 yang berarti satu kelas dapat menampung ± 26 orang murid. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat mutu pengajaran di kelas karena semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin kurang tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Sedangkan rasio murid-guru menunjukkan beban kerja guru dalam mengajar, terbanyak adalah di tingkat TK yaitu 1:11,85 (1 guru mengajar ± 12 murid).

Indeks Pendidikan

1) Angka Melek Huruf

Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari angka melek huruf yang didefinisikan sebagai persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya. Kemampuan ini dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu, agar paling tidak memiliki peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pada tahun 2013, secara rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Balangan yang dapat membaca dan menulis sebesar 96,73 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sekitar 69 persen penduduk Balangan yang berusia 15 tahun keatas, maka dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Balangan sudah dapat menikmati pendidikan dengan baik, hanya 3,27 persen penduduk yang diindikasikan buta huruf.

Angka melek huruf Balangan jika dibandingkan dengan Kalimantan Selatan tergolong cukup baik walaupun masih lebih rendah. Pada tahun 2013, pencapaian angka melek huruf provinsi Kalimantan Selatan adalah 97,18 persen. Angka melek huruf terendah adalah kabupaten Barito Kuala dengan 94,19 persen Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) yaitu pada angka 95,66 persen di tahun 2012 menjadi 96,73 persen pada tahun 2013 yang sangat signifikan berpengaruh terhadap angka IPM kab. Balangan.

2) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah, yaitu rata-rata yang telah dihabiskan oleh penduduk suatu daerah di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalannya. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah diduduki dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Balangan tahun 2013 masih berkisar sebesar 7,05 tahun. Dengan kata lain rata-rata penduduk di Kabupaten Balangan baru mengenyam pendidikan hingga kelas 1 SMP atau belum sepenuhnya bisa menikmati program wajib belajar (WAJAR) 9 tahun.

Sama kondisinya dengan capaian angka harapan hidup dan angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Balangan masih lebih rendah dibandingkan angka rata-rata lama sekolah provinsi sebesar 8,01 tahun, bahkan angka rata-rata lama sekolah Balangan merupakan yang terendah se-Provinsi Kalimantan Selatan. Melihat kondisi ini, tampaknya sektor pendidikan di Kabupaten Balangan perlu mendapat perhatian lebih lanjut, terutama di era otonomi sekarang ini.

b. Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan

Pendidikan diharapkan dapat mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas yang nantinya dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam membangun daerah. Pembangunan di bidang pendidikan merupakan upaya meningkatkan kualitas SDM, agar SDM dari daerah Balangan dapat menjadi manusia seutuhnya, sehat jasmani-rohani, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kualitas SDM yang demikian ini menjadi sasaran pembangunan di bidang pendidikan. SDM Kabupaten Balangan diharapkan dapat bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain di bursa kerja dan dalam kancan dunia usaha. Adapun Indikator capaian pembangunan bidang pendidikan kabupaten Balangan terdiri dari: angka partisipasi Kasar/APK, Angka partisipasi murni/APM, Nilai rerata UN, Angka mengulang, dan Angka putus sekolah, serta Angka kelulusan.

Angka Partisipasi Kasar/APK merupakan indikator untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang sedang/telah menerima pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 2013, APK SD mencapai 105,79. Angka ini menunjukkan persentase murid yang sedang sekolah di jenjang SD/ sederajat yang berumur 7-12 tahun bahkan lebih atau kurang. Jika dibandingkan berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa APK perempuan sedikit lebih rendah dibanding APK laki-laki kecuali pada tingkat SMA. dibandingkan berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa APK perempuan sedikit lebih rendah dibanding APK laki-laki kecuali pada tingkat SMA. dibandingkan berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa APK perempuan sedikit lebih rendah dibanding APK laki-laki kecuali pada tingkat SMA.. Semakin tinggi jenjang pendidikan terlihat bahwa APK cenderung menurun. Bahkan untuk tingkat SMP dan SMA nilai APK di bawah angka 100, hal ini mengindikasikan bahwa hanya sebagian dari anak berusia 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang tersebut dan kemungkinan sisanya sedang sekolah pada jenjang pendidikan di bawahnya/di atasnya atau bahkan putus sekolah. Oleh karena itu, untuk memperjelas lagi arti APK diperlukan indikator APM dan APS

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Menurut teori, besarnya APM akan selalu lebih kecil daripada APK. Nilai APM yang lebih kecil daripada nilai APK-nya dapat menunjukkan komposisi umur penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Untuk jenjang

SD (7-12 tahun) terlihat bahwa APK mencapai 105,79 persen sementara APM 92,67 persen. Selisih 13,12 persen memiliki arti bahwa diantara murid SD/ sederajat sebanyak 13,12 persen berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. APM SMP pada 2013 mencapai angka 61,67 persen sedangkan APKnya mencapai 79,87 persen. Ini artinya hanya 61,67 persen penduduk usia 13-15 tahun yang terserap sebagai siswa SMP, sisanya bisa terserap pada jenjang pendidikan SD, SMU, atau bahkan tidak bersekolah lagi. Selisih 18 persen dapat diartikan sebagai jumlah murid SMP yang berada diluar rentang usia 13-15 tahun. Begitu pula untuk jenjang SMU (16-18 tahun), terdapat selisih sebesar 21 persen siswa SMU yang berusia diatas 18 tahun atau dibawah 15 tahun. Hal ini dimungkinkan karena banyak anak yang bersekolah lebih dini dari anak lain, atau sebaliknya. .

Tabel 2.18.
Indikator Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan
Kabupaten Balangan Tahun 2014 – 2016

N o	Indikator	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016		
		SD	SLTP	SD	SLTP	SD	SLTP	SD	SLTP	SLTA
1	Angka Partisipasi Kasar/APK (%)	112,80	90,78	112,80	90,78	112,80	90,78	104,50	95,10	85,53
2	Angka Partisipasi Murni/APM (%)	96,27	64,13	96,27	64,13	96,27	64,13	85,78	64,45	49,,98
3	Nilai rerata UN	6,06	6,50	6,06	6,50	6,06	6,50	5,75	4,26	4,14
4	Angka mengulang (%)	6,48	0,24	6,48	0,24	6,48	0,24	4,42	0,07	0,18
5	Angka putus sekolah (%)	0,43	0,64	0,43	0,64	0,43	0,64	0,01	0,40	0,53
6	Angka kelulusan (%)	100	99,88	100	99,88	100	99,88	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Balangan Tahun 2016, BDA tahun 2016

Berdasarkan Tabel 2.18 terlihat angka angka putus sekolah pada SLTA mengalami peningkatan yaitu dari 0,33 persen pada tahun 2013 menjadi 0,57 persen di tahun 2014. Namun pada tingkatan SD angka putus sekolah justru mengalami penurunan yang signifikan dari 0,43 pada tahun 2013 menjadi 0,10 pada tahun 2014. Di sisi lain untuk APK, APM, dan rata-rata nilai UN secara umum mengalami peningkatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari data yang ada seharusnya dikaji lebih mendalam sehingga kondisi data lebih stabil dan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

2.1.12. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Balangan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan kesehatan juga memuat mutu dan upaya kesehatan dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Pembangunan tersebut diarahkan kepada peningkatan fasilitas kesehatan dan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumber daya yang memadai, seperti rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan dan ketersediaan obat. Jika dilihat pada Tabel 2.19. menunjukkan bahwa jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2015.

Tabel 2.19. Perkembangan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Balangan Tahun 2011-2016 (Orang)

Tenaga Kesehatan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Dokter	30	32	31	36	30	26
Perawat	129	245	238	227	246	209
Bidan	128	215	200	199	215	230
Jumlah	287	492	469	462	491	465

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, BDA Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 2.19, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 terdapat 26 orang dokter. Dengan jumlah penduduk Balangan sebanyak 124.913 jiwa, maka berarti terdapat sekitar 1 dokter untuk melayani setiap 4.804 penduduk. Angka ini masih relatif tinggi, sehingga hal ini harus menjadi salah satu prioritas untuk peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Selain tenaga dokter, terdapat pula tenaga kesehatan lainnya seperti bidan dan perawat. Jumlah perawat mengalami penurunan dari tahun 2015 sebanyak 246 orang menjadi 209 orang perawat pada tahun 2016. Secara rata-rata dari jumlah tenaga kesehatan tersebut dapat melayani 598 jiwa per satu orang tenaga kesehatan pada tahun 2016.

Berdasarkan penolong kelahiran pertama dan penolong terakhir bayi, pada tahun 2016 secara umum mengalami peningkatan pada penggunaan jasa tenaga medis dibandingkan tahun 2015. Hal ini ternyata tidak berkorelasi nyata dengan menurunnya jumlah tenaga kesehatan di tahun 2016. Jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.20 berikut ini.

Tabel 2.20.
Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Terakhir Tahun 2015 dan 2016

Penolong Kelahiran	Kelahiran 2015		Kelahiran 2016	
	Pertama	Pertama	Pertama	Terakhir
Tenaga Medis	95,9	95,9	79,9	79,9
Dukun Bersalin	4,09	4,09	20,1	20,1
Famili/Keluarga	-	-	-	-
Total	100	100	100	100

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Balangan Tahun 2016

Tabel 2.21.
Perkembangan Sarana Kesehatan di Kabupaten Balangan Tahun 2010 - 2016 (buah)

Fasilitas Kesehatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rumah Sakit	1	1	1	1	1	1	1
Puskesmas	11	11	11	11	11	12	12
Pustu	26	22	23	24	24	23	22
Poskesdes	93	93	94	99	105	107	134
Polindes	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	131	136	137	138	141	143	169

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, BDA Tahun 2016

Untuk fasilitas kesehatan pada saat ini di setiap kecamatan telah tersedia Puskesmas, Pustu dan Polindes. Pada Tahun 2008 telah berdiri Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balangan yang telah didukung dengan sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif kepada masyarakat Balangan khususnya dan masyarakat luar Kabupaten Balangan pada umumnya. Jumlah fasilitas pada tahun 2016 terjadi peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2015, peningkatan yang cukup menonjol adalah pada Poskesdes dari 107 buah menjadi 134 buah.

Penambahan fasilitas kesehatan dan tenaga medis ini perlu dioptimalkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perkembangan derajat kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22.
Perkembangan Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Jenis Data Demografi	Tahun						Ket.
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Jumlah Kematian Bayi	32	20	41	46	36	31	orang
2	Jumlah Kematian Ibu	2	5	2	7	6	5	orang
3	Rata-rata Angka Harapan Hidup	62,02	62,32	62,50	66,65	66,95		tahun

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Balangan, BDA tahun 2016

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kematian bayi pada tahun 2016 berjumlah 31 orang menurun jika dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 36 orang. Jumlah kematian ibu meningkat pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Sedangkan angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Balangan tahun 2015 sebesar 66,95 tahun dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 sebesar 66,65 tahun.

Secara perlahan terjadi peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa angka ini masih sangat jauh dari angka ideal harapan hidup waktu lahir seseorang di mana nilai tertinggi adalah 85 tahun. Angka ini juga masih lebih rendah dibandingkan angka harapan hidup provinsi Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 67,80 tahun.

Jika dilihat keterbandingan antar kabupaten/kota, maka Kabupaten Balangan menempati urutan terendah dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Berdasarkan AHH tersebut dapat dihitung indeks kesehatan Balangan, dimana berdasarkan data BPS Kabupaten Balangan, pada tahun 2014, indeks kesehatan Kabupaten Balangan berkisar pada angka 71,77 persen. Jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.23 berikut.

Tabel. 2.23
Perkembangan Indeks Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015

No	Tahun	Balangan	Kalimantan Selatan
1	2011	71,46	72,12
2	2012	71,61	72,48
3	2013	71,72	72,85
4	2014	71,77	73,03
5	2015		

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, indeks kesehatan Kabupaten Balangan makin meningkat dan masih termasuk dalam kategori sedang.

2.1.13. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pelaksanaan pembangunan pada program ini selain melalui peningkatan jumlah prasarana juga dengan memperluas jumlah akseptor terhadap program KB telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tercapainya masyarakat yang sejahtera melalui perencanaan dan pengendalian jumlah kelahiran adalah tujuan dari pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Jumlah akseptor KB Baru di Kabupaten Balangan relatif merata di setiap kecamatan, terbanyak terdapat pada kecamatan Paringin yaitu sebanyak 581 orang, kemudian Kecamatan Halong sebanyak 511 orang, sedangkan paling sedikit di Kecamatan Juai yang hanya 227 orang.

Tabel. 2.24. Banyaknya Akseptor KB Baru Menurut Pemakaian Jenis Alat Kontrasepsi Per Kecamatan Tahun 2015

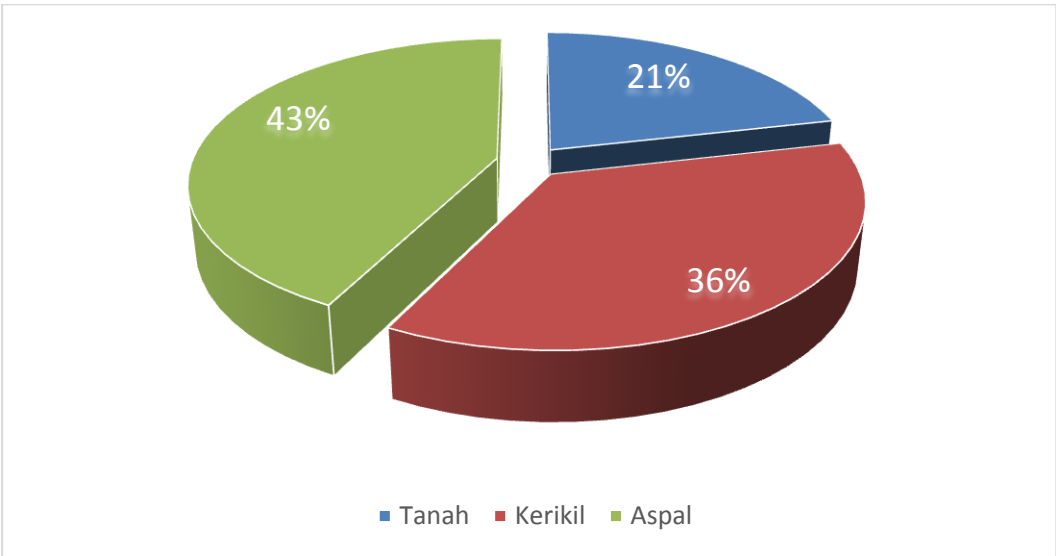
DAERAH	Jenis Alat Kontrasepsi							Jumlah
	IUD	Pil	Kondom	Suntikan	Implant	MOP	MOW	
Lampihong	6	46	1	243	40	-	3	339
Batumandi	5	132	5	175	29	-	4	350
Awayan	4	169	-	170	25	-	4	371
Tebing Tinggi	2	60	3	90	53	-	-	208
Paringin	33	201	12	305	25	-	5	581
Paringin selatan	6	78	3	113	65	-	-	265
Juai	-	77	2	173	22	-	3	227
Halong	31	150	10	303	41	-	4	511
JUMLAH	58	913	36	1572	300	-	23	2902

Sumber : BPS, Balangan Dalam Angka Tahun 2015

2.1.14. Perhubungan

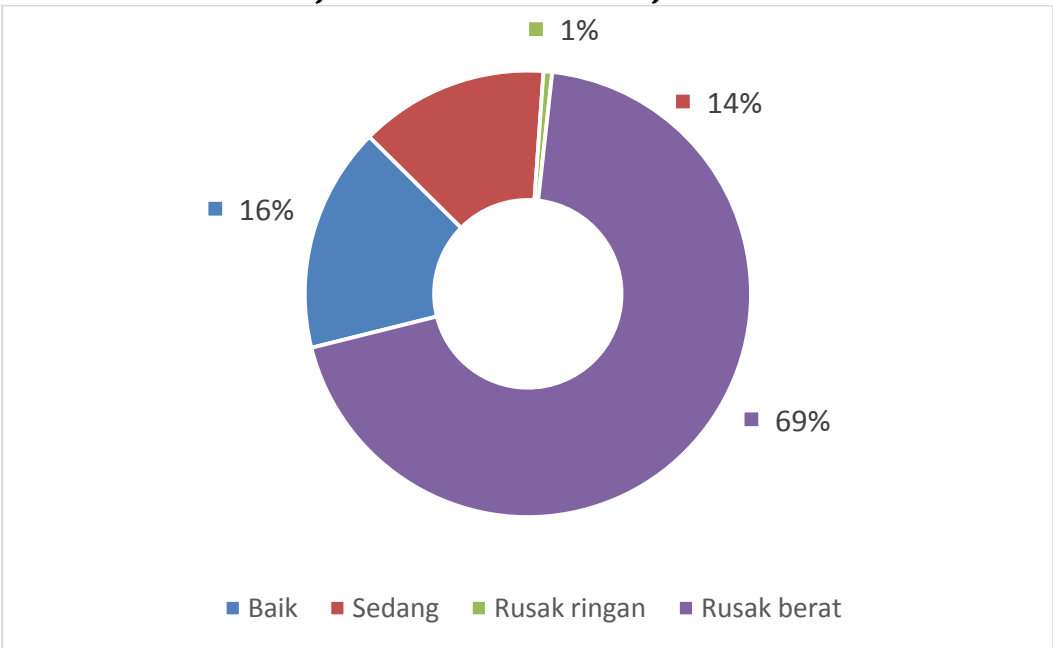
Aktivitas masyarakat sehari-hari memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya adalah jalan sebagai sarana mobilitas daerah masyarakat dan lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Sebagai salah satu kabupaten yang sedang giat melakukan pembangunan, Kabupaten Balangan terus membangun jalan dan jembatan baru dan meningkatkan kualitas jalan jembatan yang telah ada. Pada tahun 2016, total panjang jalan di wilayah kabupaten Balangan yang merupakan wewenang kabupaten sepanjang 638,996 km. Dari panjang tersebut, sebesar 43,00 persen memiliki permukaan aspal, sedangkan 36 persen masih merupakan permukaan kerikil. Sedangkan sisanya yakni sebesar 21 persen adalah permukaan tanah. Secara umum kondisi jalan di Balangan adalah rusak berat yaitu sebesar 69 persen. Hanya sekitar 16 persen dari total panjang jalan yang berkondisi baik.

Gambar 2.12
Persentase Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2015



Sumber : Dinas PUPR Tahun 2016

Gambar 2.13
Persentase Jalan Menurut Kondisi Jalan Tahun 2016



Sumber : Dinas PUPR Tahun 2016

Sebagai daerah pegunungan yang topografinya bergelombang disertai banyaknya Daerah Aliran Sungai, menyebabkan diperlukannya banyak jembatan sebagai sarana penghubung transportasi darat. Diantaranya telah dibangun jembatan baru di jalan lingkaran timur yang menghubungkan Muara Pitap Kecamatan Paringin Selatan dengan Gunung Pandau Kecamatan Paringin.

Tabel 2.25.
Jumlah Jembatan berdasarkan Jenis dan Kondisi
di Kabupaten Balangan Tahun 2013 - 2014 (dalam buah)

Jenis	Tahun 2015				Tahun 2016			
	Jumlah	Jumlah			Jumlah	Jumlah		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak berat		Baik	Rusak Ringan	Rusak berat
Beton	-	-	-	-	11,00	10,00	1,00	-
Baja	10,00	9,00	1,00	-	37,00	31,00	4,00	2,00
Box Culvert	167,00	102,00	50,00	15,00	459,00	268,00	118,00	73,00
Kayun Ulin	394,00	118,00	177,00	99,00	278,00	70,00	74,00	134,00
Kayu	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	571,00	229,00	228,00	114,00	785,00	379,00	197,00	209,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2015

Untuk memperlancar arus distribusi barang, dan meningkatkan perekonomian Kabupaten Balangan, selain meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan, telah dibangun juga sarana angkutan, yaitu terminal. Terminal yang ada di kabupaten Balangan adalah Terminal Paringin. Terminal ini merupakan Terminal Angkutan Pedesaan dan Terminal Antar Kota Dalam Propinsi sesuai status yang diberikan.

Mulai tahun 2016 ini, Terminal ini secara bertahap akan dialihfungsikan dan direncanakan untuk membangun terminal baru. Hal ini dikarenakan terminal yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan Kota Paringin.

2.1.15. Pos dan Telekomunikasi

Dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat berupa kegiatan pengiriman dan penerimaan benda-benda pos, seperti surat menyurat, paket pos, wesel, giro, dan tabungan, telah didukung dengan keberadaan 1 buah Kantor Pos Kabupaten, 4 buah Kantor Pos Pembantu dan 3 buah rumah Pos. Kantor Pos berlokasi di Kecamatan Paringin sedangkan kantor pos pembantu tersedia di Kecamatan Lampihong, Juai, Batu Mandi dan Awayan sedangkan rumah pos berlokasi di Kecamatan Halong, Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi. Pada saat ini selain kantor pos, juga sudah tersedia fasilitas sambungan telepon (*fixed telephone*) dari Telkom beserta layanan jaringan dari PT. Telkomsel, Indosat, dan Exelindo.

Tabel 2.26.
Fasilitas Pelayanan Pos Dirinci Menurut Kecamatan

Kecamatan	Kantor Pos	Rumah Pos
Lampihong	1	-
Paringin	1	-
Juai	1	-
Halong	-	1
Batu Mandi	1	-
Paringin Selatan	-	1
Awayan	1	-
Tebing Tinggi	-	1
Jumlah	5	3

Sumber : Balangan dalam Angka 2015

2.1.16. Air Minum

Dalam pemenuhan kebutuhan Air penduduk Kabupaten Balangan tercukupi dari air sumur, sungai dan PDAM. Air sungai merupakan sumber air yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di Kabupaten Balangan terdapat dua sungai utama, yaitu Sungai Balangan dan Sungai Pitap. Padahal sungai-sungai tersebut merupakan sungai tadah hujan sehingga debitnya sangat tergantung pada musim. Pada musim kemarau debit sungai kecil, sungai menjadi dangkal bahkan sampai terlihat dasar sungainya. Sebaliknya di musim hujan debit sungai itu menjadi besar, arusnya menjadi deras, dan air sungai menjadi sangat keruh akibat pengerosian dari tebing-tebing sungai. Tabel 2.27. dan 2.28. menunjukkan data air minum yang ada di Kabupaten Balangan.

Tabel 2.27.
Banyaknya Produksi Air, Distribusi, Terjual dan Hilang/Susut dalam Penyaluran

Kecamatan	IKK/IPA	Produksi (m³)	Distribusi (m³)	Terjual (m³)	Susut/Hilang (m³)
Lampihong	IKK	277.865	277.865	232.820	45.045
Batumandi	IKK	162.780	162.780	139.494	23.286
Awayan	IKK	106.671	106.671	91.698	14.973
Tebing Tinggi	-	-	-	-	-
Paringin	IPA	1.658.863	1.658.863	1.383.706	275.157
Paringin Selatan	IKK	33.636	33.636	30.090	3.546
Juai	IKK	285.762	285.762	254.047	31.715
Halong	IKK	127.190	127.190	105.758	21.432
Jumlah		2.652.767	2.652.767	2.237.613	415.154

Sumber : PDAM Kabupaten Balangan, Tahun 2016

Tabel 2.28.
Kapasitas Produksi Terpasang PDAM Kabupaten Balangan
Tahun 2008-2016 (Ltr/dtr)

No.	Unit PDAM	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Paringin									
	a. Paringin I	10.0	10.0	10.0	10	10	10	10	10	10
	b. Paringin II	30.0	80.0	80.0	150	150	150	150	150	150
	c. Paringin III	15.0	15.0	15.0	45	45	45	45	45	45
2.	Halong	10.0	10.0	10.0	30	30	30	30	30	30
3.	Juai	5.0	5.0	5.0	60	60	60	60	60	60
4.	Lampihong	5.0	5.0	5.0	40	40	40	40	40	40
5.	Batu Mandi	10.0	10.0	10.0	15	15	15	15	20	30
6.	Awayan	12.5	12.5	12.5	30	30	30	30	50	50
7.	Paringin Selatan	-	-	-	20	40	40	40	40	40
8.	Tebing Tinggi	-	-	-	-	-	20	20	20	20
Jumlah		97.5	187.5	187.5	400	420	440	440	465	475

Sumber : PDAM Kabupaten Balangan Tahun 2016

2.1.17. Listrik

Kebutuhan listrik di Kabupaten Balangan setiap tahunnya meningkat, hingga pada Tahun 2013 jumlah pelanggan listrik sudah mencapai 23.453 pelanggan (tidak termasuk Kecamatan Batu Mandi). Kebutuhan listrik di Kabupaten Balangan sebagian besar dipenuhi oleh PT. PLN Cabang Tanjung Wilayah Ranting Paringin. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.29. berikut ini.

Tabel 2.29.
Banyaknya Pelanggan Listrik, VA Terpasang dan KWH Terjual
Menurut Jenis Tarif Tahun 2014

NO	Jenis Tarif	Pelanggan	VA Terpasang	KWH Terjual
1	S (1,2,3)	795	818.750	1.133.984
2	R (1,2,3,4)	22174	13.971.850	23.885.822
3	B (1,2)	277	768.650	895.656
4	I (1,2,3,4)	9	373.500	1.197.413
5	P (1,2,3)	198	1.525.400	3.227.751
JUMLAH		23.453	17.458.150	30.340.626

Sumber : PT. PLN Ranting Paringin, BDA Tahun 2015

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2016-2021

Evaluasi yang dilaksanakan atas Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD sampai tahun 2016 disajikan dalam bentuk tabel yang memuat semua pencapaian target kinerja dari RPJMD 2016-2021 sampai tahun 2016. Jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2016

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan sampai dengan RKPD Kabupaten Balangan Tahun Lalu (n-2) 2015	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi 2016	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan yang Dievaluasi 2016	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Balangan yang di evaluasi (%) 7=6/5 x100%	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x100%	8
MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN						76,74	TINGGI
Sasaran : Meningkatnya mutu pendidikan dan aksessibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan						102,23	
	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,50	11,03	11,10	11,03	99,37	Dinas Pendidikan
	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	10,00	6,32	6,31	6,36	100,79	Dinas Pendidikan
	APK PAUD	67,96	41,77	51,20	37,39	73,03	Dinas Pendidikan
	APK TK sederajat	68,23	66,03	67,47	66,06	97,91	Dinas Pendidikan
	APK SD/ sederajat	106,66	115,04	105,96	102,78	97,00	Dinas Pendidikan
	APM SD/ sederajat	88,76	93,42	87,64	86,11	98,25	Dinas Pendidikan
	APK SMP/ sederajat	93,84	97,60	92,81	89,97	96,94	Dinas Pendidikan
	APM SMP/ sederajat	63,61	63,94	62,92	66,30	105,37	Dinas Pendidikan

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan sampai dengan RKPD Kabupaten Balangan Tahun Lalu (n-2) 2015	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi 2016	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan yang Dievaluasi 2016	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Balangan yang di evaluasi (%) 7=6/5 x100%	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x100%	8
	Angka Kelulusan SD sederajat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
	Angka Kelulusan SMP sederajat	100,00	99,89	99,90	100,00	100,10	Dinas Pendidikan
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%):				-		
	TK/PAUD	45,50	26,35	42,36	64,52	152,31	Dinas Pendidikan
	SD	71,47	65,77	70,87	75,87	107,06	Dinas Pendidikan
	SMP	94,14	90,88	93,35	85,49	91,58	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya kapasitas layanan perpustakaan daerah (%)	97,20	88,20	89,70	100,00	111,48	Dinas Perpustakaan
Rata-rata capaian kinerja (%)						102,23	
Predikat Kinerja						SANGAT TINGGI	
Sasaran : Meningkatnya kualitas dan aksessibilitas pelayanan kesehatan						93,40	
2	Usia Harapan Hidup	68,50	66,65	66,80	66,65	99,78	Dinkes, RSUD
	Menurunnya angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran)	225,00	245,00	245,00	214,04	87,36	Dinkes, RSUD

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan sampai dengan RKPD Kabupaten Balangan Tahun Lalu (n-2) 2015	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi 2016	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan yang Dievaluasi 2016	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Balangan yang di evaluasi (%) 7=6/5 x100%	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x100%	8
	Menurunnya angka kematian bayi (per 1000 kelahiran)	9,00	14,70	14,00	13,30	95,00	Dinkes, RSUD
	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk)	11,26	28,48	25,61	17,28	67,47	Dinkes, RSUD
	Persentase desa yang mempunyai tenaga bidan	100,00	96,82	96,82	96,82	100,00	Dinkes, RSUD
	Meningkatnya jumlah puskesmas rawat inap	3,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Dinkes, RSUD
	Persentase desa yang memiliki Poskesdes	91,08	68,15	71,97	70,80	98,37	Dinkes, RSUD
	Persentasi penduduk yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	75,00	38,00	50,00	39,89	79,78	Dinkes, RSUD
	Tingkat pemakaian tempat tidur perawatan RS (BOR) (%)	60,00	38,00	40,00	42,48	106,20	
	Cakupan Jaminan Kesehatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinkes, RSUD
Rata-rata capaian kinerja (%)						93,40	
Predikat Kinerja						SANGAT TINGGI	
Sasaran : Meningkatnya Indeks Pengarusutamaan Gender							

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan sampai dengan RKPD Kabupaten Balangan Tahun Lalu (n-2) 2015	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi 2016	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan yang Dievaluasi 2016	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Balangan yang di evaluasi (%) 7=6/5 x100%	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x100%	8
-							
3	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas	99,75	96,29	97,25		-	BPPPA&KB
	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	69,75	66,75	66,90		-	BPPPA&KB
	Meningkatnya akseptor KB (%)	92,00	79,00	80,00		-	BPPPAKB dan Dinkes
	Menurunnya usia perkawinan muda (%)	25,00	55,11	50,00		-	BPPPA&KB
	Terwujudnya kabupaten layak anak	90,00	30,00	40,00		-	BPPPA&KB
Rata-rata capaian kinerja (%)						-	
Predikat Kinerja						SANGAT RENDAH	
Sasaran : Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja						111,32	
4	Jumlah layanan keter)ampilan BLK yang berstandar nasional (paket	28,00	5,00	10,00	20,00	200,00	Dinsosnakertrans
	Jumlah lulusan BLK yang bekerja (orang)	405,00	277,00	309,00		-	Dinsosnakertrans

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan sampai dengan RKPD Kabupaten Balangan Tahun Lalu (n-2) 2015	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi 2016	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan yang Dievaluasi 2016	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Balangan yang di evaluasi (%) 7=6/5 x100%	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x100%	8
	Jumlah tenaga pengajar BLK yang berkualifikasi dan bersertifikat	12,00	6,00	7,00	6,00	85,71	Dinsosnakertrans
	Prosentase (%) tenaga kerja terdaftar yang telah memperoleh pekerjaan/mandiri	0,40	10,00	12,00	19,15	159,58	Dinsosnakertrans
Rata-rata capaian kinerja (%)						111,32	
Predikat Kinerja						SANGAT TINGGI	
MISI II : MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN						89,09	TINGGI
Sasaran : Meningkatnya investasi daerah						69,64	
1	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	-		10,00	-	-	KP2T
	Pertumbuhan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (%)	60,00	-	10,00	10,00	100,00	KP2T
	Pertumbuhan Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (%)	60,00	-	10,00	-	-	KP2T
	Terselenggaranya pelayanan perizinan penanaman modal melalui PTSP (%)	100,00	40,00	40,00	71,42	178,55	KP2T
Rata-rata capaian kinerja (%)						69,64	
Predikat Kinerja						SEDANG	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan sampai dengan RKPD Kabupaten Balangan Tahun Lalu (n-2) 2015	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi 2016	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan yang Dievaluasi 2016	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Balangan yang di evaluasi (%) 7=6/5 x100%	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x100%	8
Sasaran : Meningkatnya peranan UMKM serta koperasi dalam perkuatan struktur perekonomian daerah							89,97
2	Koperasi aktif (%)	90,00	60,00	65,00	60,00	92,31	Disperindagkop
	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (unit usaha)	5.700,00	5.295,00	5.560,00	3.756,00	67,55	Disperindagkop
	Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi (buah)	6,00	3,00	2,00	2,00	100,00	Disperindagkop
	Jumlah UMKM/koperasi yang difasilitasi penguatan modal	20,00	-	-	-		Disperindagkop
	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang masuk di dunia e-commerce (unit usaha)	12,00	-	2,00	2,00	100,00	Disperindagkop, Dishubkominfo
Rata-rata capaian kinerja (%)						89,97	
Predikat Kinerja						TINGGI	
Sasaran : Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat							107,67
	Tingkat ketersediaan pangan utama (Ton/ tahun)	50.201,50	16.824,10	20.161,50	20.161,50	100,00	DKP
	Tingkat konsumsi pangan utama (kg/ kapita/ jiwa)	131,00	137,60	136,50	136,50	100,00	DKP
	Produktivitas Padi / Ha (Ton / Ha)	4,60	4,34	4,35	5,10	117,26	DisPTPHPP, BPPKP

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan sampai dengan RKPD Kabupaten Balangan Tahun Lalu (n-2) 2015	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi 2016	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan yang Dievaluasi 2016	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Balangan yang di evaluasi (%) 7=6/5 x100%	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x100%	8
	Produksi Padi dan Palawija (Ton)						DisPTPHPP
	a. Padi	187.760,00	173.423,50	174.435,00	205.804,30	117,98	DisPTPHPP
	b. Jagung	6.825,00	5.044,70	4.500,00	10.129,50	225,10	DisPTPHPP
	c. Kedelai	3.313,00	959,00	2.400,00	6.470,40	269,60	DisPTPHPP
	Produktivitas Padi / Ha (Kw / Ha)	46,00	43,35	43,50	51,01	117,26	DisPTPHPP
	Produktivitas Tanaman Hortikultura						DisPTPHPP
	a.Sayuran	1.032,00	770,00	809,00	502,64	62,13	DisPTPHPP
	b. Buah	21.221,00	17.772,00	18.305,00	15.028,00	82,10	DisPTPHPP
	Produksi perikanan (Ton)	2.040,00	2.030,40	1.888,00		-	DisPTPHPP
	a. Budidaya	800,00	590,00	690,00	665,00	96,38	DisPTPHPP
	b. Tangkap	1.240,00	1.440,40	1.198,00	1.062,00	88,65	DisPTPHPP
	Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kapita/Tahun)	45,00	40,20	41,49	45,64	110,00	DisPTPHPP

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan sampai dengan RKPD Kabupaten Balangan Tahun Lalu (n-2) 2015	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi 2016	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan yang Dievaluasi 2016	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Balangan yang di evaluasi (%) 7=6/5 x100%	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x100%	8
	Peningkatan Produksi Peternakan						DisPTPHPP
	a. Daging (Kg)	1.295.736,82	1.206.240,00	1.220.714,88	1.235.388,00	101,20	DisPTPHPP
	b. Telur (Kg)	992.712,00	908.320,00	930.628,00	254.276,00	27,32	DisPTPHPP
Rata-rata capaian kinerja (%)						107,67	
Predikat Kinerja						SANGAT TINGGI	
MISI III : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKESINAMBUNGAN						87,27	TINGGI
Sasaran : Meningkatnya kapasitas dan kualitas prasarana transportasi dan komunikasi							
1	Jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	6,39	20,33	5,65	2,23	39,47	Dinas PU
	Jembatan dalam kondisi baik (%)	5,10	39,00	4,51	8,76	194,24	Dinas PU
	Panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya /pelebaran (km)	1,46	8,34	1,29	19,00	1.472,87	Dinas PU
	Cakupan panjang jalan yang dipelihara (%)	0,18	0,39	0,16	0,16	100,00	Dinas PU
	Panjang jalan kabupaten yang dibangun per tahun (km)	1,00	2,00	1,00	-	-	Dinas PU

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan sampai dengan RKPD Kabupaten Balangan Tahun Lalu (n-2) 2015	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi 2016	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan yang Dievaluasi 2016	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Balangan yang di evaluasi (%) 7=6/5 x100%	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x100%	8
	Panjang jembatan yang dibangun (m)	40,00	220,00	40,00	128,40	321,00	Dinas PU
	Tertatanya dan berkembangnya Jaringan Angkutan Umum	100,00	0.00	16,00	16,00	100,00	Dishub
	Pembangunan terminal baru	100,00	100,00	23,00	0.00	-	Dinas PU, Dishub, Bappeda
	Tingkat Ketersediaan Halte Penumpang Angkutan Umum (%)	100,00	0.00	17,00	0.00	-	Dishub
	Cakupan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (%)	100,00	49.00	55,00	60,00	109,09	Dishub
	Prosentase Tingkat Kelayakan Sarana/Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (%)	100,00	5.00	8,33	8,33	100,00	Dishub
	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan (%)	100,00	10.00	12,00	12,00	100,00	Dishub
	Persentase Desa yang telah dapat diakses dengan Kendaraan Umum%	100,00	8.00	8,00	8,00	100,00	Dishub
	Penyediaan infrastruktur telekomunikasi untuk desa terpencil (%)	100,00	-	16,70		-	Dinas PU, Dishubkominfo
Rata-rata capaian kinerja (%)						188,33	
Predikat Kinerja						SANGAT TINGGI	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan sampai dengan RKPD Kabupaten Balangan Tahun Lalu (n-2) 2015	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi 2016	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan yang Dievaluasi 2016	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Balangan yang di evaluasi (%) 7=6/5 x100%	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x100%	8
Sasaran : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian pada lahan irigasi dan pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih							
2	Jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	60,20	25,00	27,50	16,61	60,40	Dinas PU
	Panjang jaringan irigasi yang dibangun (m)	1.500,00	87.547,00	1.790,00	-	-	Dinas PU
	Panjang talud/tanggul yang dibangun (m)	8.045,00	6.862.839,00	8.045,00	-	-	Dinas PU
	Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat (%)	92,29	83,29	84,79	88,64	104,54	Dinas PU, PDAM
Rata-rata capaian kinerja (%)						41,24	
Predikat Kinerja						SANGAT RENDAH	
Sasaran : Tersedianya prasarana dan sarana perumahan & fasilitas umum, serta perkantoran							
3	Jalan lingkungan yang dibangun (%)	7.000,00	75.110,00	7.000,00	7.761,86	110,88	Dinas PU
	Akses masyarakat terhadap sanitasi dasar (%)					-	
	Panjang saluran drainase yang dibangun (meter)	82.318,00	37.318,00	44.818,00	51.448,90	114,80	Dinas PU
	Terwujudnya pembangunan kompleks pendidikan di Islamic Center (unit)	100,00	-	-		-	Dinas PU dan Disdik

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan sampai dengan RKPD Kabupaten Balangan Tahun Lalu (n-2) 2015	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi 2016	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan yang Dievaluasi 2016	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Balangan yang di evaluasi (%) 7=6/5 x100%	SKPD Penanggung Jawab 8
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x100%	8
	Terbangunnya sport center (%)	100,00	-	10,00		-	Dinas PU, Disporaparbud
	Gedung perkantoran dan fasilitas umum yang dibangun (dalam kondisi baik) (%)	100,00	60,00	70,00		-	Dinas PU
	Menurunnya prosentase rumah tidak layak huni	7,50	10,86	10,50		-	Dinsosnakertrans, PU, Bappeda
Rata-rata capaian kinerja (%)						32,24	
Predikat Kinerja						SANGAT RENDAH	
MISI IV : PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (POTENSI LOKAL) BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL						36,62	SANGAT RENDAH
Sasaran : Meningkatnya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam							
1	Cakupan Penanganan sampah Kabupaten (%)	34,21	21,39	26,14	26,26	100,46	BLHK
	Pengendalian Tingkat Pencemaran (%)	61,25	55,40	56,30	56,50	100,36	BLHK
	Ketaatan terhadap RTRW (%)		70,00	75,00		-	Bappeda
Rata-rata capaian kinerja (%)						66,94	
Predikat Kinerja						SEDANG	

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan sampai dengan RKPD Kabupaten Balangan Tahun Lalu (n-2) 2015	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi 2016	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan yang Dievaluasi 2016	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Balangan yang di evaluasi (%) 7=6/5 x100%	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x100%	8
Sasaran : Pemanfaatan SDA guna peningkatan PAD							
2	Tersedianya Kawasan Perikanan yang lestari dan berkelanjutan (Ha)	300,00	85,00	100,00	80,00	80,00	DisPTPHPP
	Perluasan Areal Pertanian (Ha)	32.500,00	32.000,00	32.100,00	33.471,00	104,27	DisPTPHPP
	Luas Areal Tanam (Ha)						DisPTPHPP
	a. Padi	40.600,00	40.009,00	40.100,00	40.109,00	100,02	DisPTPHPP
	b. Jagung	1.500,00	1.121,00	1.000,00	450,00	45,00	DisPTPHPP
	c. Kedelai	2.500,00	799,00	2.000,00	2.000,00	100,00	DisPTPHPP
	Luas wilayah produktif perkebunan karet (Ha)	27.241,00	23.853,00	24.091,00		-	Dishutbun
	Luas wilayah produktif Perkebunan sawit (Ha)	270,00	75,00	82,00		-	Dishutbun
	Produksi karet (ton)	32,29	25,57	25,82		-	Dishutbun
	Produksi sawit (ton)	3,42	2,52	2,64		-	Dishutbun
	Terbentuknya Unit teknis fasilitasi produksi dan harga karet (%)	100,00	-	20,00		-	Setda, Dishutbun, Bappeda, DPPKAD
	Rata-rata capaian kinerja (%)						42,93
Predikat Kinerja						SANGAT RENDAH	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan sampai dengan RKPD Kabupaten Balangan Tahun Lalu (n-2) 2015	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi 2016	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan yang Dievaluasi 2016	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Balangan yang di evaluasi (%) 7=6/5 x100%	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x100%	8
Sasaran : Terwujudnya tujuan wisata Balangan							
3	Dibangunnya Danau Baruh Bahino sebagai tujuan wisata yang terstandar (%)	100,00	-	10,00	-	-	Dinas PU, Disporaparbud
Rata-rata capaian kinerja (%)						-	
Predikat Kinerja						SANGAT RENDAH	
MISI V : MENGEMBANGKAN SOSIAL BUDAYA KEMASYARAKATAN						46,00	SANGAT RENDAH
Sasaran : Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama							
1	Rasio sarana ibadah (per 10.000 penduduk)	8,25	6,48	6,50	5,60	86,15	Kesbangpol
	Jumlah Sarana tempat ibadah yang mendapat bantuan operasional setiap tahun (buah)	495,00	-	52,00	52,00	100,00	Bagian Kesra Setda, Kesbangpol
	Konflik masyarakat bernuansa SARA (kali)	-	-	-	-	100,00	Kesbangpol
Rata-rata capaian kinerja (%)						95,38	
Predikat Kinerja						SANGAT TINGGI	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan sampai dengan RKPD Kabupaten Balangan Tahun Lalu (n-2) 2015	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi 2016	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan yang Dievaluasi 2016	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Balangan yang di evaluasi (%) 7=6/5 x100%	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x100%	8
Sasaran : Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni dan budaya							
2	Jumlah group kesenian	50,00	24,00	27,00	27,00	100,00	Disporaparbud
	Jumlah peristiwa budaya di Balangan	11,00	9,00	11,00		-	Disporaparbud
	Dibangunnya Gedung Pusat Pengembangan Seni dan Budaya Balangan (buah)	100,00	-	20,00		-	Dinas PU, Disporaparbud
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (Buah)	9,00	4,00	4,00	4,00	100,00	Disporaparbud
Rata-rata capaian kinerja (%)						50,00	
Predikat Kinerja						SANGAT RENDAH	
Sasaran : Meningkatnya pembinaan organisasi kepemudaan dan cabang olahraga							
3	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	4,00	-	2,00		-	Disporaparbud, Dinsosnakertrans
	Jumlah cabang olahraga yang dibina	20,00	-	8,00		-	Disporaparbud, KONI
	Diikutinya pekan olahraga daerah (event)	20,00	1,00	1,00		-	Disporaparbud, Dinsosnakertrans
	Terselenggaranya Porda di Kabupaten Balangan	100,00	-	1,00		-	Disporaparbud
Rata-rata capaian kinerja (%)						-	
Predikat Kinerja						SANGAT RENDAH	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan sampai dengan RKPD Kabupaten Balangan Tahun Lalu (n-2) 2015	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi 2016	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan yang Dievaluasi 2016	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Balangan yang di evaluasi (%) 7=6/5 x100%	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x100%	8
Sasaran : Meningkatnya pembinaan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu							
4	Jumlah panti asuhan yang dibina	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	Dinsosnakertrans
	Meningkatnya pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS	90,00	54,00	45,00	45,00	100,00	Dinsosnakertrans
	Prosentase (%) penghuni panti yang dibina	62,50	25 Orang	7,50	7,92	105,56	Dinsosnakertrans
	Prosentase (%) penanganan keluarga miskin	10,10	1152 KK	5,89	5,90	100,22	Dinsosnakertrans
	Prosentase (%) PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	11,16	1500 Jiwa	7,18	7,25	100,97	Dinsosnakertrans
	Prosentase (%) anggota PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan urusan sosial	63,49	32 Orang	6,35	16,00	251,97	Dinsosnakertrans
Rata-rata capaian kinerja (%)						126,45	
Predikat Kinerja						SANGAT TINGGI	
Sasaran : Meningkatnya kemampuan tanggap darurat bencana							
5	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran yang terstandar (unit)	-	4,00	12,00	1,00	8,33	BPBD
	Meningkatnya SDM, sarana dan prasarana tanggap darurat bencana (%)	-	4,00	0,07	-	-	BPBD, Dinsosnakertrans
Rata-rata capaian kinerja (%)						4,17	
Predikat Kinerja						SANGAT RENDAH	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan sampai dengan RKPD Kabupaten Balangan Tahun Lalu (n-2) 2015	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi 2016	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan yang Dievaluasi 2016	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Balangan yang di evaluasi (%) 7=6/5 x100%	SKPD Penanggung Jawab 8
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x100%	
MISI VI : OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH						98,43	SANGAT TINGGI
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah							
1	Meningkatnya jumlah SKPD yang mendapatkan predikat akuntabilitas baik (%)	100,00	68,00	70,00	18,75	26,79	Inspektorat
	Penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan masyarakat (%)	100,00	50,00	90,00	50,00	55,56	Inspektorat
	Rekomendasi temuan pengawasan yang ditindaklanjuti (%)	100,00	85,00	90,00	100,00	111,11	Inspektorat
	Jumlah Objek Pemeriksaan Pengawasan	80,00	78,00	60,00	85,00	141,67	Inspektorat
	Maturitas SPIP dan Tingkat Kapabilitas APIP (level)	3,00	-	1,00	1,00	100,00	Inspektorat
	Nilai evaluasi AKIP Kabupaten Balangan	64,30	53,65	53,65	55,65	103,73	Bag. Organisasi
	Penerapan SAKIP (Renstra, Renja, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain-lain) %	4,00	4,00	4,00	1,25	31,25	Bappeda, Bag. Organisasi
	Terwujudnya intergrasi dan sinkronisasi aplikasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian secara online	100,00	-	10,00	5,00	50,00	DPPKAD, Bappeda
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	DPPKAD, INSPEKTORAT
Rata-rata capaian kinerja (%)						80,01	
Predikat Kinerja						TINGGI	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan sampai dengan RKPD Kabupaten Balangan Tahun Lalu (n-2) 2015	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi 2016	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan yang Dievaluasi 2016	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Balangan yang di evaluasi (%) 7=6/5 x100%	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x100%	8
Sasaran : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah							
2	Rata-rata capaian Urusan SPM (%)	80,55		62,51	-	-	Bag. Organisasi
	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tepat ukuran dan Fungsi (SKPD)	39,00	-	39,00	39,00	100,00	Bag. Organisasi
	Ketersedian informasi jabatan yang dapat dijadikan acuan dalam penataan aparatur (%)	100,00	100,00	89,00	100,00	112,36	Bag. Organisasi
	Unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan Standar Pelayanan Publik	39,00	39,00	6,00	3,00	50,00	Bag. Organisasi
	Aparatur yang telah mengikuti Diklat sesuai dengan persyaratan jabatan dan pemenuhan kebutuhan profesionalitas (orang)	335,00	-	43,00	38,00	88,37	BKD
Rata-rata capaian kinerja (%)						70,15	
Predikat Kinerja						SEDANG	
Sasaran : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerahDiterapkannya E-Government guna peningkatan kualitas dan kecepatan layanan kepada masyarakat							
3	Penyediaan jaringan dan infrstruktur e-government (%)	100,00	-	5,00	2,00	40,00	Bappeda, Dishubkominfo
	Terintegrasinya aplikasi layanan SKPD dalam satu sistem data dan layanan (%)	100,00	-	4,17	2,00	47,96	Bappeda, Dishubkominfo
	Terwujudnya sistem data dan informasi "Satu Desa Satu Data"	90,00	-	25,00	69,00	276,00	Bappeda, BPMPD

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan sampai dengan RKPD Kabupaten Balangan Tahun Lalu (n-2) 2015	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi 2016	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan yang Dievaluasi 2016	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Balangan yang di evaluasi (%) 7=6/5 x100%	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x100%	8
	Unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan Standar Pelayanan Publik (unit)	1,00		6,00	3,00	50,00	Bag. Organisasi
	Meningkatnya kapasitas pengarsipan dokumen daerah (%)	100,00	20,00	30,00	-	-	KPAD
	Dilakukannya pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap semua pelayanan yang diberikan pemerintah daerah (%)	100,00	-	10,00	-	-	Bappeda
Rata-rata capaian kinerja (%)						68,99	
Predikat Kinerja						SEDANG	
Sasaran : Meningkatkan kualitas pelaksanaan Dana Desa							
4	Tersedianya sistem perencanaan, penganggaran dan monev dana desa (%)	100,00	-	50,00	#REF!	157,24	Bappeda, DPPKAD, BPMPD
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dana desa (%)	100,00	-	50,00	#REF!	191,92	BPMPD, Inspektorat, Kecamatan, DPPKAD, Bappeda
Rata-rata capaian kinerja (%)						174,58	
Predikat Kinerja						SANGAT TINGGI	

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Balangan sampai dengan RKPD Kabupaten Balangan Tahun Lalu (n-2) 2015	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi 2016	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Balangan yang Dievaluasi 2016	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Balangan yang di evaluasi (%) 7=6/5 x100%	SKPD Penanggung Jawab 8
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x100%	
MISI VII : MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DAN KEPASTIAN HUKUM UNTUK TERCIPTANYA SUASANA YANG KONDISIF							68,92
SEDANG							
Sasaran : Menurunnya kejadian kriminal (criminal index) dan meningkatnya penegakan perda							
1	Tindak kriminalitas yang tertangani (%)	100,00	100,00	100,00	99,62	99,62	Satpol PP
	Jumlah Polisi Pamong Praja (personil)	105,00	94,00	71,00	48,95	68,94	Satpol PP
	Jumlah Linmas per desa (orang)	17,00	7,00	17,00	26,69	157,00	Satpol PP
Rata-rata capaian kinerja (%)						108,52	
Predikat Kinerja						SANGAT TINGGI	
Sasaran : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan melalui pelayanan berbasis SIAK							
2	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (%)	100,00	90,31	100,00	100,00	100,00	Disdukcatpil
	Cakupan Penerbitan KTP Elektronik (%)	100,00	93,83	100,00	97,02	97,02	Disdukcatpil
	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (%)	55,00	35,30	40,00	38,38	95,95	Disdukcatpil
	Cakupan Penerbitan Akta Kematian (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disdukcatpil
Rata-rata capaian kinerja (%)						98,24	
Predikat Kinerja						SANGAT TINGGI	

2.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Secara umum makro ekonomi Kabupaten Balangan selalu tumbuh secara positif. Namun yang menjadi masalah dalam rangka peningkatan pertumbuhan makro ekonomi adalah perlunya akselerasi menuju tujuan tersebut. Hal ini mengingat pertumbuhan makro ekonomi, walaupun positif tetapi pertumbuhannya masih agak lamban, apalagi jika dibandingkan dengan pertumbuhan makro ekonomi kabupaten/kota lain dalam Provinsi Kalimantan Selatan, terutama untuk angka kemiskinan dan IPM yang perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu langkah dan upaya serta kebijakan konkret dari Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menggali dan menggerakkan perekonomian guna menekan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Balangan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Bupati Terpilih Tahun 2016-2021 yang menekankan pembangunan dimulai dari pembangunan Sumber Daya Manusia, maka akselerasi peningkatan IPM menjadi sebuah keharusan guna mewujudkan Balangan yang maju dan sejahtera.

Secara substansi, maka terdapat beberapa permasalahan pembangunan daerah yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia perlu diutamakan melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
2. Kegiatan ekonomi yang sementara ini masih dikuasai oleh sektor primer yaitu pertambangan dan pertanian, harus diusahakan untuk digeser kepada sektor sekunder yang lebih mempunyai kemampuan kompetitif dan akan lebih menggerakkan roda ekonomi kerakyatan.
3. Produktifitas petani di Kabupaten Balangan yang dinilai masih rendah harus terus diupayakan untuk ditingkatkan melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas program-program bidang pertanian;
4. Penurunan jumlah atau angka jiwa penduduk miskin Kabupaten Balangan harus terus menjadi fokus utama dengan lebih mengedepankan kebijakan, program dan kegiatan yang berpihak kepada masyarakat kecil.
5. Pembangunan infrastruktur hendaknya lebih diarahkan pada pembangunan yang bersifat mendukung pengembangan bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan serta pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan tujuan wisata Balangan yang mempunyai multi player effect.
6. Meningkatnya Gini Ratio Kabupaten Balangan dan Penurunan daya beli masyarakat sejak tahun 2010 menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pembangunan yang telah

dilaksanakan makin timpang antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tengah dilaksanakan haruslah pertumbuhan yang berkualitas. Oleh karena itu perlu upaya yang lebih memperhatikan pemerataan pembangunan sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua masyarakat Balangan.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam RKPD Tahun 2018, kebijakan ekonomi Kabupaten Balangan dirumuskan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen itu saling mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah di satu sisi harus mampu menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus dijaga asumsi-asumsinya dan di sisi lain memberikan panduan umum bagaimana tujuan ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian utama pembangunan daerah.

Perekonomian Balangan pada tahun 2015 masih didominasi oleh sektor primer dengan kontribusi hampir 76,78 persen (pertanian, kehutanan dan perikanan 11,48 persen dan pertambangan 65,30 persen). Kontribusi terkecil diberikan oleh sektor listrik dan Gas dimana hanya mampu menyumbangkan 0,02 persen dan sektor jasa perusahaan sekitar 0,06 persen terhadap total PRDB. Dalam tiga tahun terakhir struktur perekonomian Balangan masih menunjukkan pola yang sama. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi yaitu untuk menggeser kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder serta tersier tampaknya belum terlihat secara nyata. Hal ini perlu menjadi perhatian serius dan konsisten dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dalam perekonomian.

Tidak berkurangnya kontribusi sektor pertambangan tiap tahunnya dan cenderung meningkat, memperlihatkan bahwa belum terjadi peningkatan yang signifikan peningkatan peranan sektor lain terhadap total PBRD. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat walaupun memiliki keunggulan komparatif, tapi belum memiliki keunggulan kompetitif. Sementara sektor sekunder memiliki keunggulan kompetitif. Berbeda dengan keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif akan terus berubah karena bersifat dinamis; teknologi berubah terus, demikian juga kualitas SDM semakin berkembang, sehingga pengembangan sektor ini dapat dilaksanakan dan sangat tergantung pada kapasitas masyarakat (terutama pengusaha) untuk berinovasi dan melakukan perubahan terus menerus.

Selama kurun waktu 2015 berbagai sektor ekonomi menunjukkan geliat yang cukup baik. Di tengah kondisi ekonomi dunia, utamanya beberapa Negara Eropa yang berada di pusaran krisis, ekonomi Indonesia mampu tumbuh cukup positif pada tahun 2016. Sumber pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia berasal dari sektor keuangan dan asuransi serta sektor informasi dan komunikasi. Pasar domestik Indonesia yang besar didukung oleh tingkat populasi yang tinggi membuat Indonesia menjadi pasar potensial bagi industri dalam negeri.

Secara nasional perekonomian Indonesia tumbuh positif pada tahun 2016 yaitu mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 5,02 persen dibanding tahun angka tahun 2015 yang dikoreksi yaitu sebesar 4,88 persen. Sedangkan untuk tingkat provinsi Kalimantan Selatan PDRB pada tahun 2016 sebesar 4,38 persen, tumbuh positif dari tahun sebelumnya sebesar 3,38 persen. Sedangkan Untuk tingkat regional kabupaten Balangan pada tahun 2015 ekonomi tumbuh sebesar 3,12 persen, tumbuh melambat dibandingkan dibandingkan pada tahun 2014 yaitu sebesar 6,01 persen. Sektor pertambangan juga sektor pertanian tetap menjadi komoditas penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Balangan. Sumber pertumbuhan terbesar juga diperoleh dari dua sektor utama ini.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan pada tahun 2015 mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya, hal ini diakibatkan karena produksi batu bara yang mengalami kelesuan. Berdasarkan perhitungan PDRB tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan adalah sebesar 3,12 persen, namun kalau dilihat dalam perhitungan PDRB tanpa subkatagori pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Batubara dan Lignit dan Biji Logam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan pada tahun 2015 tumbuh signifikan sebesar 5,97 persen dibandingkan tahun 2014 sebesar 4,97.

Dilihat dari kontribusi menurut sektornya, maka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan tahun 2015 yang tertinggi adalah pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas yaitu dari sebesar 12,99 persen di tahun 2014 menjadi sebesar 16,70 persen. Sektor lain yang mengalami kenaikan adalah sektor Pendidikan yaitu sebesar 6,21 persen di tahun 2014 meningkat menjadi 9,43 persen, serta sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yaitu sebesar 5,54 persen pada tahun 2014 menjadi 8,71 persen. Sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalan mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu dari 6,45 persen tahun 2014 menurun menjadi 1,94 persen di tahun 2015. Sektor

Pengadaan air juga mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu dari 6,48 persen tahun 2014 menurun menjadi 4,57 persen di tahun 2015.

3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Balangan

Berdasarkan uraian tentang indikator makro ekonomi Kabupaten Balangan, maka dapat diketahui bahwa secara umum makro ekonomi Kabupaten Balangan selalu tumbuh secara positif. Namun yang menjadi masalah dalam rangka peningkatan pertumbuhan makro ekonomi adalah perlunya akselerasi menuju tujuan tersebut. Hal ini mengingat pertumbuhan makro ekonomi, walaupun positif tetapi pertumbuhannya melambat, apalagi jika dibandingkan dengan pertumbuhan makro ekonomi kabupaten/kota lain dalam Provinsi Kalimantan Selatan, terutama untuk angka kemiskinan dan IPM yang perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu langkah dan upaya serta kebijakan konkret dari Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menggali dan menggerakkan perekonomian guna menekan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Balangan.

Secara substansi, maka terdapat beberapa kebijakan ekonomi yang dapat ditegaskan dalam RKPD Tahun 2018 yaitu:

1. Perlunya meningkatkan upaya menggeser kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder serta tersier. Untuk ini perlu penguatan dan keberpihakan pemerintah daerah kepada sektor usaha kecil menengah, koperasi dan usaha ekonomi kreatif.
2. Perlunya upaya yang realistis dan sistemik untuk meningkatkan produktifitas petani di Kabupaten Balangan sehingga lebih produktif, salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas program-program bidang pertanian serta meningkatkan produktifitas petani melalui diversifikasi usaha pertanian;
3. Pemerintah daerah perlu menjaga dan meningkatkan kualitas produk pertanian seperti beras dan karet masyarakat serta stabilitas harga, karena ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat Balangan.

Berdasarkan kondisi ekonomi makro Kabupaten Balangan, maka dapat disusun asumsi dan proyeksi kinerja makro daerah pada tahun perencanaan (2018) seperti pada Tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1.
Capaian dan Target Indikator Makro Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2016 dan 2018

No	Indikator Kinerja Makro Daerah		Capaian Tahun 2016	Target 2018
1	Peningkatan IPM		65,34	67.44
	a	Usia Harapan Hidup	66.65	67.00
	b	Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,32	6,32
	c	Angka Harapan Lama Sekolah	11.03	11.25
2	Tingkat Pengangguran Terbuka		4,31	1.25
3	Tingkat Kemiskinan		5,87	5.80
4	Pertumbuhan Ekonomi			
	a	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	16.73	17.20
	b	Peningkatan kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	1.97	2.10
	c	Peningkatan kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	12.56	13.00
5	Gini Ratio		0,403	0.32
6	Opini BPK		WTP	WTP
7	Penilaian Kinerja Pemerintah		CC	B
8	Indeks Kepuasan Masyarakat		86,77	80.00
9	Indek Pengarusutamaan Gender		65,47	69.03

Sumber: RPJMD Kab. Balangan Tahun 2016-2021 dan LKIP Kab. Balangan Tahun 2016

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan sejak Tahun 2014 hingga Tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2					
Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015-2016					
No.	Uraian	Realisasi	Realisasi	Selisih 2015 dan 2016	% (+-)
		2015	2016	(+)	
1	2	4	4	5	6
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	6,328,310,877.00	6,620,693,597.00	292,382,720.00	0.04
4	Pendapatan Retribusi Daerah	2,109,299,677.00	1,650,843,904.72	(458,455,772.28)	(0.28)
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,217,690,095.00	12,191,994,189.00	(25,695,906.00)	(0.00)
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29,311,402,754.89	41,035,053,391.70	11,723,650,636.81	0.29
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	49,966,703,403.89	61,498,585,082.42	11,531,881,678.53	0.19
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	31,673,481,450.00	32,659,084,777.00	985,603,327.00	0.03
10	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	346,196,873,288.00	538,676,673,705.00	192,479,800,417.00	0.36
11	Dana Alokasi Umum	312,301,730,000.00	389,434,433,000.00	77,132,703,000.00	0.20
12	Dana Alokasi Khusus	61,375,690,000.00	160,352,978,776.00	98,977,288,776.00	0.62
13	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 12)	751,547,774,738.00	1,121,123,170,258.00	369,575,395,520.00	0.33
14	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
15	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
16	Dana Penyesuaian	43,053,554,000.00	97,090,791,000.00	54,037,237,000.00	0.56
17	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (15 s/d 16)	43,053,554,000.00	97,090,791,000.00	54,037,237,000.00	0.56
18	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	55,493,827,464.00	45,769,622,208.00	(9,724,205,256.00)	(0.21)
20	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya/Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
21	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (19 s/d 20)	55,493,827,464.00	45,769,622,208.00	(9,724,205,256.00)	(0.21)
22	Total Pendapatan Transfer (13+17+21)	850,095,156,202.00	1,263,983,583,466.00	413,888,427,264.00	0.33
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
25	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
26	Pendapatan Lainnya	56,981,969,857.00	5,111,671,840.00	(51,870,298,017.00)	(10.15)
27	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (24 s/d 26)	56,981,969,857.00	5,111,671,840.00	(51,870,298,017.00)	(10.15)
28	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 22 + 27)	957,043,829,462.89	1,330,593,840,388.42	373,550,010,925.53	0.28

Berdasarkan Tabel 3.2 diketahui bahwa dari sisi volume terus meningkat, namun dari sisi analisa pendapatan Kabupaten Balangan belum sepenuhnya mencerminkan APBD yang memiliki kemandirian. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada TA. 2014 hanya memiliki proporsi sebesar 4,25 persen, TA. 2015 naik menjadi 5,22 persen. Walaupun demikian, kondisi ini cukup baik karena adanya peningkatan proporsi yang cukup signifikan terhadap total pendapatan. Sebagian besar pendapatan didominasi oleh Dana perimbangan, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana bagi hasil pajak/bukan pajak. Secara umum pendapatan daerah mengalami peningkatan yang signifikan karena adanya peningkatan pada sisi bagi hasil pajak/bukan pajak dan alokasi DAK.

3.2.2. Neraca Daerah

Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Pemahaman akan aset bisa berbeda antara ilmu perencanaan, manajemen keuangan, dan akuntansi. Aset daerah diperoleh dari dua sumber, yakni dari APBD dan dari luar APBD.

Aset yang bersumber dari pelaksanaan APBD merupakan *output/outcome* dari terealisasinya belanja modal dalam satu tahun anggaran. Dalam konsep anggaran kinerja, biaya yang dikeluarkan adalah semua biaya yang menjadi masukan (*input*) dalam pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan aset ini. Dengan demikian, termasuk di dalamnya belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, selain dari belanja modal tentunya. Jadi, *cost* untuk aset adalah seluruh pengeluaran untuk mencapai *outcome*. Aset yang bersumber dari luar pelaksanaan APBD, dalam hal ini, perolehan aset tidak dikarenakan adanya realisasi anggaran daerah, baik anggaran belanja modal maupun belanja pegawai dan belanja barang & jasa; misalnya aset yang diterima dari pihak lain, seperti lembaga donor dan masyarakat.

Dalam pengelolaan isu yang terkait dengan asset mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan, harus terus menerus mendapatkan perhatian dan perbaikan sehingga pengelolaan asset di Kabupaten Balangan dapat dilaksanakan dengan baik. Rekapitulasi aset Kabupaten Balangan sampai dengan tahun anggaran 2015 disajikan dalam Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Rekapitulasi Aset Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2014-2016

No	Tahun Perolehan	Tanah (Rp)	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Aset Tetap lainnya (Rp)	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Rp)
1	2014	174.743.449.417,00	174.102.493.436,00	668.031.034.398,87	734.248.247.738,00	4.919.163.063,00	33.057.989.863,00
2	2015	175.781.662.417,00	195.566.309.466,00	734.917.385.035,00	930.973.888.126,00	5.119.280.246,00	20.019.527.963,00
3	2016	187.111.325.917,00	232302614307,00	781.134.930.305,00	1.187.624.341.489,16	4.868861.748,00	20.015.377.963,00

Sumber : DPPKAD Kab Balangan Tahun 2016

3.2.3. Proporsi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan APBD Kabupaten Balangan, sejak Tahun Anggaran 2014 sampai 2015, rata-rata rasio persentase antara total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran hanya sebesar 32.31 persen seperti dirinci pada Tabel 3.4. Hal ini menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Balangan relatif baik dari sisi Belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk Belanja Aparatur tidak mendominasi total pengeluaran dalam APBD.

Namun jika melihat trend dari tahun 2014 sampai tahun 2015 menunjukkan persentase Belanja Aparatur terhadap Total Pengeluaran cenderung menurun tipis. Tahun 2015, dari segi jumlah belanja aparatur menunjukkan peningkatan, namun karena adanya peningkatan besaran belanja yang cukup signifikan, sedangkan belanja aparatur tidak meningkat secara tajam, sehingga prosentase belanja aparatur tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 mengalami penurunan.

Tabel 3.4.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Balangan Tahun 2014-2016

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)(Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) X 100 %
1	TA 2014	271.819.036.433,00	841.281.684.478,50	32,31
2	TA 2015	287.474.130.373,24	891.399.631.015,24	32,25
3	TA 2016	331.399.347.395,00	962.954.921.743,66	34,41

Sumber: DPPKAD Kab Balangan Tahun 2016 dan Pengolahan Data

3.2.4. Analisis Pembiayaan

Berdasarkan APBD Kabupaten Balangan sejak Tahun Anggaran 2013 sampai 2016, defisit riil anggaran Kabupaten Balangan ditutup dari SILPA Tahun Anggaran sebelumnya. Hal ini tampak dari rata-rata proporsi SILPA daerah tahun sebelumnya terhadap total defisit riil, dengan SILPA selalu lebih besar dari total defisit riil. Sedangkan untuk proporsi SILPA daerah tahun sebelumnya terhadap total defisit riil setiap Tahun Anggaran dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut.

Tabel 3.5.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Balangan Tahun 2014-2016

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil (%)		
		2014	2015	2016
1	SILPA TA sebelumnya	100	100	100
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	
4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	-	
6	Penerimaan piutang daerah		-	
7	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	-	-	

Pada sisi anggaran, dengan lebih besarnya SILPA Tahun Anggaran sebelumnya dari pada defisit riil anggaran tahun bersangkutan, tentunya akan dapat menjamin kecukupan anggaran. Tetapi pada sisi keuangan hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi keuangan Tahun Anggaran sebelumnya belum maksimal, yang secara langsung berpengaruh terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan. Jelasnya mengenai penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun 2014-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6					
Kinerja Pembiayaan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014-2015					
No.	Uraian	Realisasi	Realisasi	Selisih 2015 dan 2016	% (+-)
		2015	2016	(+)	
1	2	3	4	5	6
58	PEMBIAYAAN				
59	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
60	Penggunaan SILPA	91,145,375,918.35	49,264,080,384.00	(41,881,295,534.35)	(85.01)
61	Pencairan Dana Cadangan	0	-	-	
62	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	-	-	
63	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0	-	-	
64	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0	-	-	
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0	-	-	
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	-	-	
67	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0	-	-	
68	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0	-	-	
69	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0	-	-	
70	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah (Koperasi)	159,375,000.00	78,125,000.00	(81,250,000.00)	(104.00)
71	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	-	
72	Penerimaan dari Sisa UYHD Tahun Lalu	0	0	-	
73	Penerimaan Piutang Pihak Ketiga	0	0	-	
74	Jumlah Penerimaan	91,304,750,918.35	49,342,205,384.00	(41,962,545,534.35)	(85.04)
75	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			-	
76	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	-	
77	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	32,000,000,000.00	-	(32,000,000,000.00)	-
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat			-	
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	24,542,179,200.00	-	(24,542,179,200.00)	-
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0	0	-	
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0	-	
82	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0	0	-	
83	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0	0	-	
84	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0	0	-	
85	Pengembalian Dana DPPID	0	0	-	
86	Jumlah Pengeluaran	56,542,179,200.00	-	(56,542,179,200.00)	-
87	PEMBIAYAAN NETTO	34,762,571,718.35	49,342,205,384.00	14,579,633,665.65	29.55
88	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	49,264,079,484.00	240,703,587,772.76	191,439,508,288.76	79.53

3.3.5. Kerangka Pendanaan

Belanja daerah pada dua tahun anggaran terakhir menunjukkan trend yang semakin meningkat. Dari berbagai komponen Belanja, Pertumbuhan rata-rata terbesar disumbangkan oleh Belanja barang dan Belanja Hibah, sedangkan pertumbuhan Belanja Modal menurun yaitu sebesar -2.76 persen. Seiring dengan meningkatnya realisasi pendapatan, maka realisasi belanja operasi dan belanja Modal juga meningkat. Untuk lebih lengkapnya, data Belanja Kabupaten Balangan dua tahun terakhir disajikan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.6					
Kinerja Pembiayaan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015-2016					
No.	Uraian	Realisasi	Realisasi	Selisih 2015 dan 2016	% (+/-)
		2015	2016	(+/-)	
1	2	4	4	5	6
29	BELANJA				
30	BELANJA OPERASI				
31	Belanja Pegawai	287,474,130,373.24	331,399,347,395.00	43,925,217,021.76	0.13
32	Belanja Barang	219,611,011,715.00	264,535,053,642.50	44,924,041,927.50	0.17
33	Belanja Bunga	0	0	-	
34	Belanja Subsidi	0	0	-	
35	Belanja Hibah	33,172,363,536.00	19,780,279,334.00	(13,392,084,202.00)	(0.68)
36	Belanja Bantuan Sosial	2,173,575,000.00	3,301,300,000.00	1,127,725,000.00	0.34
37	Belanja Bagi Hasil	0	-	-	
38	Belanja Bantuan Keuangan	0	-	-	-
39	Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 38)	542,431,080,624.24	619,015,980,371.50	76,584,899,747.26	0.12
40	BELANJA MODAL				
41	Tanah	385,150,000.00	4,748,540,000.00	4,363,390,000.00	0.92
42	Peralatan dan Mesin	31,543,058,775.00	36,617,864,409.00	5,074,805,634.00	0.14
43	Gedung dan Bangunan	50,868,410,096.00	45,301,800,270.00	(5,566,609,826.00)	(0.12)
44	Jalan, Irigasi dan Jaringan	208,995,918,515.00	256,684,593,363.16	47,688,674,848.16	0.19
45	Aset Tetap Lainnya	292,539,200.00	14,958,500.00	(277,580,700.00)	(18.56)
46	Aset Lainnya	147,686,750.00	383,730,800.00	236,044,050.00	0.62
47	Jumlah Belanja Modal (41 s/d 46)	292,192,763,336.00	343,751,487,342.16	51,558,724,006.16	0.15
48	BELANJA TAK TERDUGA				
49	Belanja Tak Terduga	233,607,855.00	187,454,000.00	(46,153,855.00)	(0.25)
50	Jumlah Belanja Tak Terduga (49)	233,607,855.00	187,454,000.00	(46,153,855.00)	(0.25)
51	JUMLAH BELANJA (39+47+50)	834,857,451,815.24	962,954,921,713.66	128,097,469,898.42	0.13
52	TRANSFER			-	
53	TRANSFER BAGI HASIL			-	
54	Bagi Hasil Pajak	-	788,993,625.00	788,993,625.00	1.00
55	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE DESA	107,684,869,882.00	175,488,542,631.00	67,803,672,749.00	0.39
56	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 55)	942,542,321,697.24	1,139,232,457,969.66	196,690,136,272.42	0.17
57	SURPLUS / DEFISIT (28-56)	(14,501,507,765.65)	191,361,382,418.76	205,862,890,184.41	1.08

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk proyeksi tahun 2018 ke depan, berdasarkan data-data yang sifatnya sementara dan asumsi serta kewajiban pengalokasian Dana Desa sebanyak 10 persen dari dana transfer setelah dikurangi DAK, maka rancangan APBD Kabupaten Balangan tahun 2018 dalam RKPD Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8 Rancangan APBD Kabupaten Balangan tahun 2018 dalam RKPD Tahun 2018

REKENING	URAIAN	APBD 2016	APBD 2017	Indikatif renja 2018	KETERANGAN
4	PENDAPATAN	1.113.027.449.020,00	999.130.679.694,00	1.222.326.130.187,10	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	38.187.000.000,00	55.712.934.000,00	63.134.099.100,00	asumsi kenaikan 15% dari tahun 2017
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.109.000.000,00	6.238.500.000,00	6.238.500.000,00	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.418.000.000,00	1.499.000.000,00	1.723.850.000,00	asumsi kenaikan 15% dari tahun 2017
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.160.000.000,00	20.205.000.000,00	23.235.750.000,00	asumsi kenaikan 15% dari tahun 2017
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20.500.000.000,00	27.770.434.000,00	31.935.999.100,00	asumsi kenaikan 15% dari tahun 2017
4.2	DANA PERIMBANGAN	923.155.858.020,00	767.798.171.000,00	957.229.520.189,00	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	335.025.000.000,00	257.266.649.000,00	567.795.087.189,00	
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	300.000.000.000,00	221.265.691.000,00	541.450.000.000,00	asumsi 85% dari 637 milyar
4.2.2	Dana Alokasi Umum	389.434.433.000,00	389.434.433.000,00	389.434.433.000,00	sama dengan tahun 2017
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	198.696.425.020,00	121.097.089.000,00	0,00	tidak boleh diasumsikan
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	151.684.591.000,00	175.619.574.694,00	201.962.510.898,10	asumsi kenaikan 15% dari tahun 2017
5	BELANJA	1.175.187.793.247,00	1.099.580.667.591,00	1.439.803.593.196,46	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	569.503.342.291,00	622.421.817.031,00	659.128.214.466,47	
5.1.1	Belanja Pegawai	379.896.190.335,00	411.280.219.175,00	454.794.622.191,57	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	234.295.120.534,00	236.525.361.834,00	240.710.069.678,93	acress 2.5 persen
5.1.4	Belanja Hibah	18.875.305.000,00	21.619.650.000,00	16.158.927.000,00	sama dengan tahun 2017
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.297.800.000,00	5.595.900.000,00	3.160.900.000,00	
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	3.271.300.000,00	3.160.900.000,00	3.160.900.000,00	
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	3.271.300.000,00	3.160.900.000,00	3.200.000.000,00	karena ada kekurangan bantuan pada parti

RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2018

REKENING	URAIAN	APBD 2016	APBD 2017	Indikatif renja 2018	KETERANGAN
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Peme	646.700.000,00	773.750.000,00	773.750.000,00	sama dengan tahun 2017
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	165.069.796.956,00	182.152.297.856,00	183.240.015.274,90	
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	164.536.734.300,00	161.775.221.589,00	182.706.952.618,90	
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	72.445.943.300,00	69.684.430.589,00	90.616.161.618,90	= (10% dari pajak, restribusi) + (10% dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK)
5.2	BELANJA LANGSUNG	605.684.450.956,00	477.158.850.560,00	780.675.378.730,00	
5.2.1	Belanja Pegawai	18.999.969.000,00	21.438.950.600,00	35.000.000.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	234.627.158.510,00	263.032.449.700,00	430.675.378.730,00	
5.2.3	Belanja Modal	197.845.488.426,00	193.487.450.260,00	315.000.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(62.160.344.227,00)	(100.449.987.897,00)	(217.477.463.009,37)	10.000.000.000,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	62.160.344.227,00	100.449.987.897,00	227.477.463.009,37	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	62.150.344.227,00	100.439.987.897,00	227.467.463.009,37	
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	62.150.344.227,00	70.439.987.897,00	227.467.463.009,37	
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	62.150.344.227,00	70.439.987.897,00	227.467.463.009,37	ASUMSI Silpa 20% Dari total Belanja APBD
	Kas daerah	0,00	69.639.987.897,00	0,00	
	Kas di Bendahara JKN	0,00	800.000.000,00	0,00	
	Kas di Bendahara BLUD	0,00	0,00	0,00	
6.1.7	Penerimaan kembali penyertaan modal	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
6.1.7.01	Penerimaan kembali penyertaan modal pada koperasi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
6.1.7.01.01	Penerimaan kembali penyertaan modal pada koperasi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	10.000.000.000,00	
	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	0,00	0,00	10.000.000.000,00	
	BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)	0,00	0,00	10.000.000.000,00	asumsi untuk BUMD
	PEMBIAYAAN NETTO	62.160.344.227,00	100.449.987.897,00	217.477.463.009,37	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan sasaaran pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2018 sesuai dengan Visi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021, yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BALANGAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA”

Makna dari Visi tersebut sebagai berikut:

MAJU:

Kabupaten Balangan harus mampu mensejajarkan diri dengan daerah lain yang sudah lebih dahulu maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. **Balangan yang maju** juga berarti roda pemerintahan sudah berjalan secara optimal yang didukung oleh struktur kelembagaan pemerintah daerah yang lengkap dan diisi serta dikelola oleh aparatur yang berkompeten di bidang tugasnya masing-masing, sehingga mampu memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Kemajuan juga tercermin pada tingkat partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pembangunan

SEJAHTERA:

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing daerah, kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi: sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha, rasa aman, didukung oleh infrastruktur yang mantap.

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016- 2021, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan;
2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan;
4. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam (potensi daerah) berdasarkan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan;
6. Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah;
7. Mewujudkan kamtibmas dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran, di samping menerjemahkan visi/misi dan menjawab permasalahan pembangunan daerah/isu-isu strategis, dilakukan untuk menyeraskan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah. keterkaitan antara visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 4.1
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BALANGAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA		
MISI	TUJUAN	SASARAN
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya mutu pendidikan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan
		Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan
	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya Indeks Pengarusutamaan Gender
		Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja
MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN	Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat	Laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
		Meningkatnya peranan UMKM serta koperasi dalam perkuatan struktur perekonomian daerah
		Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKESINAMBUNGAN	Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk pengembangan wilayah dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat	Meningkatnya kapasitas dan kualitas prasarana transportasi
		Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian pada lahan irigasi dan pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih
		Tersedianya prasarana dan sarana perumahan & fasilitas umum, serta perkantoran
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (POTENSI LOKAL) BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Meningkanya pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam
		Optimalisasi Pemanfaatan SDA guna peningkatan pendapatan masyarakat dan PAD
		Terwujudnya tujuan wisata Balangan
MENGEMBANGKAN SOSIAL BUDAYA KEMASYARAKATAN	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama
	Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal	Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni dan budaya
	Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya pembinaan organisasi kepemudaan dan cabang olahraga
	Menurunnya masalah-masalah sosial dan kemiskinan	Meningkatnya pembinaan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan bencana daerah	Meningkatnya kemampuan tanggap darurat bencana

OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah
		Diterapkannya E-Government guna peningkatan kualitas dan kecepatan layanan kepada masyarakat
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan Dana Desa
MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DAN KEPASTIAN HUKUM UNTUK TERCIPTANYA SUASANA YANG KONDUSIF	Terciptanya suasana kondusif dan terjaganya ketertiban umum.	Menurunnya kejadian kriminal (criminal index) dan meningkatnya penegakan perda
	Memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum kependudukan	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan melalui pelayanan berbasis SIAK

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018

Selain berpedomanan Visi dan Misi Pembangunan yang merupakan Visi Kabupaten Balangan, Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan provinsi dan nasional

4.2.1 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2018

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2018 (RPJMN 2015-2019) “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2018, sesuai dengan Rancangan RKP Tahun 2018, antara lain:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen (*); dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 5,97 persen; Jawa sebesar 6,23 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 6,04 persen; Kalimantan sebesar 4,37 persen; Sulawesi sebesar 7,35 persen; Maluku sebesar 6,18 persen dan Papua sebesar 6,87 persen;
2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 12,5 persen (*); dengan sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah: Sumatera sebesar 10,25 persen; Jawa sebesar 9,45 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 13,87 persen; Kalimantan sebesar 5,40 persen;

Sulawesi sebesar 9,96 persen; Maluku sebesar 12,52 persen dan Papua sebesar 25,85 persen;

3. Pencapaian target tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,44 persen (*); dengan sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah: Sumatera sebesar 4,80 persen; Jawa-bali sebesar 5,90 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,80 persen; Kalimantan sebesar 5,10 persen; Sulawesi sebesar 4,00 persen; Maluku sebesar 4,90 persen dan Papua sebesar 3,60 persen; dan
4. Laju inflasi 3,5 persen.

Sasaran perekonomian nasional tersebut menjadi indikator keberhasilan pembangunan tahun 2018. Dengan demikian, hal tersebut menjadi barometer dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 dimana harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari: a) revolusi mental; b) 10 pembangunan pendidikan; c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari: a) kedaulatan pangan; b) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; c) kemaritiman dan kelautan; d) pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari: a) pemerataan antarkelompok pendapatan; b) perbatasan negara dan daerah tertinggal; c) pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan d) pengembangan konektivitas nasional.

Untuk mencapai 3 (tiga) dimensi pembangunan, diperlukan kondisi yang kondusif yang terkait pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

4.2.2 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2018

Rencana pembangunan di tahun 2018, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan telah merumuskan tema, yaitu: ***“Memacu Investasi Melalui Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Dan Berdaya Saing Menuju Kalsel Mapan”***. Oleh sebab itu, pembangunan di tahun 2018 ini lebih berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan memperkuat komponen pokok pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan investasi dan daya saing daerah. Program-program yang mendukung Akselerasi dan pencapaian visi pembangunan Kalimantan selatan, yaitu KALSEL MAPAN (mandiri dan terdepan) lebih sejahtera, berkeadilan, berkelanjutan, berdikari dan berdaya saing.

13 prioritas daerah yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi tersebut antara lain:

1. Prioritas kalsel cerdas, dengan sasaran untuk mencapai angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah yang lebih baik
2. Prioritas kalsel sehat, dengan sasaran meningkatkan angka harapan hidup dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi
3. Prioritas kalsel terampil, dengan sasaran menekan angka pengangguran
4. Prioritas kalsel beriman, dengan sasaran meningkatkan lulusan sma/ma yang khatam al-quran
5. Prioritas kalsel pemda berkinerja baik, dengan sasaran mendapatkan nilai LAKIP A, opini BPK WTP dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat
6. Prioritas kalsel berbudaya, dengan sasaran melestarikan dan mengembangkan budaya-budaya daerah melalui festival budaya yang bertaraf nasional dan internasional
7. Prioritas kalsel aman, dengan sasaran tidak terjadi konflik sosial dan menurunkan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
8. Prioritas kalsel menuju tuan rumah pon, dengan sasaran kalsel sebagai tuan rumah penyelenggara pon tahun 2024
9. Prioritas kalsel dengan infrastruktur berkualitas, dengan sasaran meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis
10. Prioritas kalsel sentra pangan, dengan sasaran meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, meningkatkan produksi daging dan ikan
11. Prioritas kalsel menuju salah satu destinasi wisata nasional, dengan sasaran meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata, kenaikan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara
12. Prioritas kalsel menuju daerah industri, perdagangan dan jasa, dengan sasaran meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor perindustrian dan perdagangan
13. Prioritas kalsel menuju lingkungan berkualitas, dengan sasaran meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup, indeks kualitas udara dan indeks kualitas air

4.2.3 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2018

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Balangan, prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2018 maka ditetapkan tema RKPD Tahun 2018 yaitu :

“Pengembangan dan Pemantapan Infrastruktur untuk percepatan peningkatan kualitas SDM dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Balangan berbasis kewilayahan yang berkeadilan”

Adapun arah dan prioritas utama pembangunan dari tema tersebut adalah sebagai berikut:

-
- a. **Meningkatnya kualitas sumber daya manusia** yang tercermin dari terpenuhinya hak-hak dasar rakyat. Penekanan pembangunan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan berkualitas, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, pembangunan bidang agama dan sosial budaya, penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. **Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan.** Untuk mewujudkannya upaya-upaya pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi diikuti terciptanya lapangan kerja yang memadai agar mampu mengurangi pengangguran terbuka. Hal tersebut dapat dicapai dengan melakukan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui:
1. Pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, yang didukung melalui: a) penciptaan iklim investasi yang kondusif dan lingkungan usaha yang sehat, b) peningkatan kualitas SDM pelaksana usaha; c) penguatan modal untuk koperasi dan UMKM melalui penyertaan modal pemerintah, d) fasilitasi peningkatan added value produk dan pangsa pasar,
 2. Revitalisasi pertanian dalam arti luas melalui : a) pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian (agroindustri); b) Peningkatan produktivitas petani melalui intensifikasi dan diversifikasi jenis usaha pertanian; c) Perlunya upaya yang realistis dan sistemik untuk meningkatkan produktifitas petani di Kabupaten Balangan sehingga lebih produktif, salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas program-program bidang pertanian;
- c. **Membangun infrastruktur dan sarana-prasarana umum yang handal** yang ditunjukkan dari meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai infrastruktur dan sarana-prasarana umum.
- d. **Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam** yang didasari prinsip pembangunan berkelanjutan dengan prioritas pembangunan yang ditekankan pada pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan kearifan lokal.
- e. **Pengembangan sosial budaya masyarakat** sebagai upaya mengurangi masalah sosial dan kemiskinan serta menggerakkan masyarakat melalui budaya, kesenian dan agama.
-

- f. **Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah** agar dapat berfungsi menjadi fasilitator dalam rangka peningkatan pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM), penyelenggaraan pemerintahan, serta pembangunan. Untuk itu, diperlukan regulasi, sistem yang tersinkronisasi, SOP, penerapan e-government, dan budaya kerja bagi aparatur pemerintah daerah yang mampu memberikan kepastian hukum, kemudahan bekerja, kesesuaian pekerjaan dengan tingkat kompetensi, kejelasan jenjang karir serta sistem *reward* dan *punishment* yang tepat dan memadai
- g. **Membangun kondisi kehidupan yang kondusif.** Kebijakan ini terkait dengan pengembangan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang kondusif sebagai modal awal dalam pembangunan.

Adapun Target Makro Pembangunan dalam RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2018 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH
DALAM RKPD KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018

Indikator Kinerja		Kondisi Tahun Awal Periode RPJMD	Target Capaian	Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2018	
1	Peningkatan IPM	66,44	66,77	68,51
	a Usia Harapan Hidup	66,65	68,55	69,64
	b Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,32	7,88	12
	c Angka Harapan Lama Sekolah	11,03	12,83	13,7
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,09	4.7 - 4.5	3.6 - 4
3	Target Kemiskinan	5,74	4.50 - 4.30	3.96 - 4.01
4	Pertumbuhan Ekonomi			
	a Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	16,73	17,35	18,00
	b Peningkatan kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	1,97	2,15	2,75
	c Peningkatan kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	12,56	13,15	13,60
5	Gini Ratio	0,35	0,307	0,286
6	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
7	Penilaian Kinerja Pemerintah	CC=53,65	B=60,1	B=64,3
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	85,00	98,00
9	Indek Pengarusutamaan Gender	65,11	72,91	79,00

Dalam rangka mendukung dari Visi dan Misi Kabupaten Balangan periode 2016-2021 yang telah diuraikan sebelumnya, maka disusun program prioritas dan target yang ingin dicapai pada Tahun 2018 tetap terfokus pada prioritas sebagai berikut:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia,
- b. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan.
- c. Pembangunan Infrastruktur,
- d. Optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan
- e. Pengembangan sosial budaya kemasyarakatan
- f. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah,
- g. Pembangunan Iklim Kehidupan yang Kondusif.

. Keterkaitan antara Misi, Program Prioritas dan Indikator Kinerja Dalam RKPD Tahun 2018 disajikan dalam, seperti dalam Tabel 4.3 Keterkaitan Misi, Program Prioritas Dan Target Indikator Kinerja Dalam RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2018 berikut ini :

Tabel 4.3
KETERKAITAN MISI, PROGRAM PRIORITAS DAN TARGET INDIKATOR KINERJA
DALAM RKPD KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)		Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2018	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4	5	6	7
MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN							
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1	APK PAUD	67.96	60.38	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	2	APK TK sederajat	68,23	67,67	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		3	APK SD/ sederajat	106,66	106,11		Dinas Pendidikan
		4	APM SD/ sederajat	88,76	87,96		Dinas Pendidikan
		5	APK SMP/ sederajat	93,84	93,16		Dinas Pendidikan
		6	APM SMP/ sederajat	63,61	63,24		Dinas Pendidikan

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)		Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2018	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4	5	6	7
		7	Angka Kelulusan SD sederajat	100,00	100,00		Dinas Pendidikan
		8	Angka Kelulusan SMP sederajat	100,00	100,00		Dinas Pendidikan
3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%):			Pendidikan	
			- TK/PAUD	45,50	43,00		Dinas Pendidikan
			- SD	71,47	71,02		Dinas Pendidikan
			- SMP	94,14	93,60		Dinas Pendidikan
4	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	10	Cakupan layanan perpustakaan daerah (%)	97,2%	92,7%	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan
5	Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	11	Angka kematian ibu melahirkan (per 1000 kelahiran)	120,00	180,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		12	Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran)	9,00	12,00		Dinas Kesehatan
7	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	13	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk)	11,26	19,87	Kesehatan	Dinas Kesehatan

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)		Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2018	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4	5	6	7
8	Program Kemitraan peningkatan pelayanan Kesehatan	14	Jumlah Bidan (orang)	191,00	191,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
9	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pukesmas Pembantu dan Jaringannya	15	Meningkatnya jumlah puskesmas rawat inap	3,00	3,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		16	Jumlah poskesdes (unit)	139,00	121,00		Dinas Kesehatan
11	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	17	Persentasi penduduk yang melaksanakan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	75,00	60,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		18	Tingkat pemakaian tempat tidur perawatan RS (BOR) (%)	60,00	48,00		Dinas Kesehatan
		19	Cakupan Jaminan Kesehatan	100,00	100,00		Dinas Kesehatan
14	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	13	Meningkatnya akseptor KB (%)	92,00	84,00	Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Kesehatan & Dinas Pengendalian Penduduk & KB
15	Program Keluarga Berencana	14	Menurunnya usia perkawinan muda (%)	25,00	40,00	Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Kesehatan & Dinas Pengendalian Penduduk & KB

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)		Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2018	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4	5	6	7
16	Program Pelayanan kontrasepsi	29	Terwujudnya kabupaten layak anak	90,00	60,00	Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Kesehatan & Dinas Pengendalian Penduduk & KB
17	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	31	Jumlah layanan keterampilan BLK yang berstandar nasional (paket)	28,00	15,00	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga kerja & Transmigrasi
		32	Jumlah lulusan BLK yang bekerja (orang)	405,00	341,00		Dinas Tenaga kerja & Transmigrasi
		33	Jumlah tenaga pengajar yang berkualifikasi yang bersertifikat (orang)	12,00	9,00		Dinas Tenaga kerja & Transmigrasi
20	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	34	Prosentase (%) tenaga kerja terdaftar yang telah memperoleh pekerjaan/mandiri	40%	17%	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga kerja & Transmigrasi
MISI II : MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN							
21	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1	Pertumbuhan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (%)	55,00	25,00	Penanaman Modal	Dinas Pelayanan Satu Pintu & Penanaman Modal
		2	Pertumbuhan Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (%)	55,00	25,00		Dinas Pelayanan Satu Pintu & Penanaman Modal
		3	Terselenggaranya pelayanan perizinan penanaman modal melalui PTSP (%)	100,00	100,00		Dinas Pelayanan Satu Pintu & Penanaman Modal

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)		Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2018	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4	5	6	7
24	Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi	4	Koperasi aktif (%)	90,00	75,00	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, UKM & Industri
25	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	5	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (unit usaha)	5.700,00	5.615,00	Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM & Industri
26	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	6	Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi (buah)	6,00	-	Perdagangan	Dinas Perdagangan
27	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	7	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang masuk di dunia e-commerce (unit usaha)	12,00	6,00	Industri	Dinas Koperasi, UKM & Industri
28	Program Peningkatan Ketahanan pangan Pertanian/perkebunan	8	Tingkat ketersediaan pangan utama (Ton/ tahun)	50.201,5	29,09	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan
		9	Tingkat konsumsi pangan utama (kg/ kapita/ jiwa)	131,00	134,00		Dinas Ketahanan Pangan
30	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	10	Produktivitas padi per hektar (ton/Ha)	4,60	4,45	Pertanian	Dinas Pertanian
		11	Produksi Padi dan Palawija (Ton)				Dinas Pertanian
			a. Padi	186.760,00	179.335,00		Dinas Pertanian
			b. Jagung	6.825,00	5.424,00		Dinas Pertanian
			c. Kedelai	3.313,00	2.750,00		Dinas Pertanian

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)		Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2018	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4	5	6	7
32	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	12	Produktivitas tanaman hortikultura (ton/Ha)			Pertanian	Dinas Pertanian
			a. sayuran	1.032,00	891,00		Dinas Pertanian
			b. buah	21.221,00	19.420,00		Dinas Pertanian
33	Program Optimalisasi Pengolahan Produksi Perikanan	13	Produksi perikanan (Ton)	2.040,00	1.945,00	Perikanan dan Kelautan	Dinas Pertanian
			a. Budidaya	800,00	730,00		Dinas Pertanian
			b. Tangkap	1.240,00	1.215,00		Dinas Pertanian
34	Program Optimalisasi Pengolahan Produksi Perikanan	14	Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kapita/Tahun)	45,00	42,60	Perikanan dan Kelautan	Dinas Pertanian
		15	Peningkatan produksi peternakan (Kg):				Dinas Pertanian
			- Daging	1.295.736,82	1.250.187,82		Dinas Pertanian
			- telur	992.712,00	954.981,60		Dinas Pertanian
MISI III : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKESINAMBUNGAN							
35	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	43,91	29,92	PUPR	Dinas PUPR

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)		Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2018	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4	5	6	7
36	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	2	Jembatan dalam kondisi baik (%)	42,32	40,66	PUPR	Dinas PUPR
		3	Panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya /pelebaran (km)	84,37	31,39		Dinas PUPR
		4	Panjang jalan kabupaten yang dibangun per tahun (km)	673,70	666,50		Dinas PUPR
		5	Cakupan panjang jalan yang dipelihara (%)	6,96	5,65		Dinas PUPR
		6	Panjang jembatan yang dibangun (m)	240,00	120,00		Dinas PUPR
		7	Terbangunnya jalan dan jembatan kembar kota paringin	100,00	56,00		Dinas PUPR
37	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	8	Penataan dan Pengembangan Jaringan Angkutan Umum	100%	61%	Perhubungan	Dinas Perhubungan
38	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	9	Terbangunan terminal baru	100%	56%	Perhubungan	Dinas Perhubungan & Dinas PUPR
39	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	10	Cakupan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (%)	100%	79%	Perhubungan	Dinas Perhubungan
40	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	11	Peningkatan/Optimalisasi Kelaikan Pengujian Kendaraan bermotor (%)	100%	50%	Perhubungan	Dinas Perhubungan

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)		Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2018	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4	5	6	7
		12	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan (%)	100%	45%		Dinas Perhubungan
		13	Persentase Desa yang telah dapat diakses dengan Kendaraan Umum (%)	39,87%	28,48%		Dinas Perhubungan
		14	Tingkat Ketersediaan Halte Penumpang Angkutan Umum (%)	100%	80%		Dinas Perhubungan
41	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	15	Prosentase sawah yang terlayani Jaringan Irigasi (%)	60,20	42,50	PUPR	Dinas PUPR
		16	Panjang jaringan irigasi yang dibangun (m)	98.138,00	92.842,00		Dinas PUPR
42	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	17	Panjang talud/tanggul yang dibangun (m)	6.916.259,00	6.887.779,00	PUPR	Dinas PUPR
43	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	18	Persentase KK yang dapat mengakses air bersih (%)	92,29	87,79	PUPR	Dinas PUPR
44	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	19	Persentase KK yang dapat mengakses sarana sanitasi yang memadai (%)	90,00	79.95	PUPR	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup
45	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	20	Panjang saluran drainase yang dibangun (meter)	82.318,00	59.818,00	PUPR	Dinas PUPR
		21	Jalan lingkungan yang dibangun (meter)	117.110,00	96.110,00		Dinas PUPR

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)		Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2018	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4	5	6	7
46	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	22	Terwujudnya pembangunan komplek pendidikan di Islamic Center (unit)	100,00	30,00	PUPR	Dinas PUPR dan Disdik
		23	Sport center bertaraf nasional (%)	100,00	50,00		Dinas PUPR, Dispora
		24	Gedung perkantoran dan fasilitas umum yang dibangun (dalam kondisi baik) (%)	100,00	80,00		Dinas PUPR
47	Program Pengembangan Perumahan	25	Prosentase rumah layak huni (%)	95,58	91,62	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
48	Program Lingkungan Sehat Perumahan	26	Berkurangnya proporsi kawasan kumuh perkotaan (Ha)	6,02	12,02	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
MISI IV : PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (POTENSI LOKAL) BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN							
49	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1	Cakupan Penanganan Sampah Kabupaten (%)	36,01	30,27	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan dan Permukiman
50	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,25	58,00	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
51	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	3	Ketaatan terhadap RTRW (%)	100,00	85,00	PUPR	Dinas PUPR

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)		Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2018	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4	5	6	7
		4	Tersedianya Kawasan Perikanan yang lestari dan berkelanjutan (Ha)	300,00	145,00		Dinas Perikanan
		5	Perluasan Areal Pertanian (Ha)	32.500,00	32.300,00		Dinas Pertanian
		6	Luas Areal Tanam (Ha)				Dinas Pertanian
			a. Padi	40.600,00	40.300,00		Dinas Pertanian
			b. Jagung	1.500,00	1.200,00		Dinas Pertanian
			c. Kedelai	2.500,00	2.200,00		Dinas Pertanian
		7	Luas wilayah produktif perkebunan karet (Ha)	27.241,00	25.185,00		Dinas Pertanian
		8	Luas wilayah produktif Perkebunan sawit (Ha)	270,00	100,00		Dinas Pertanian
52	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	9	Produksi karet (ton)	29.848,00	27.748,00	Pertanian	Dinas Pertanian
		10	Produksi sawit (ton)	728,00	638,00		Dinas Pertanian
		11	Terbentuknya Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) (Unit)	18,00	12,00		Dinas Pertanian

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)		Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2018	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4	5	6	7
53	Program Peningkatan Pengelolaan Obyek Wisata	12	Dibangunnya tempat wisata yang berstandar nasional (%)	100,00	60,00	Pariwisata	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata
MISI V : MENGEMBANGKAN SOSIAL BUDAYA KEMASYARAKATAN							
54	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1	Rasio sarana ibadah (per 10.000 penduduk)	8,25	7,25	Trantibum dan Linmas	Badan Kesbangpol
55	Program Peningkatan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	2	Konflik masyarakat bernuansa SARA (kali)	-	-	Trantibum dan Linmas	Bagian Kesra Setda, Kesbangpol
56	Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan	3	Jumlah Sarana tempat ibadah yang mendapat bantuan operasional setiap tahun (buah)	495,00	170,00	Trantibum dan Linmas	Bagian Kesra Setda, Kesbangpol
57	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	4	Jumlah group kesenian yang berprestasi	50,00	35,00	Kebudayaan	Dinas Pendidikan
		5	Jumlah peristiwa budaya yang masuk kalender wisata provinsi	11,00	11,00		Dinas Pendidikan
		6	Pemeliharaan dan Pengembangan Seni dan Budaya Balangan (%)	100,00	30,00		Dinas Pendidikan
58	Program Pengembangan Nilai Budaya	7	Pengeloalaan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100,00	66,67	Kebudayaan	Dinas Pendidikan

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)		Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2018	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4	5	6	7
59	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	8	Organisasi kepemudaan berprestasi/ aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	4,00	3,00	Pemuda dan Olah raga	Dinas Pemuda dan Olahraga
60	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	9	Cabang Olahraga yang berprestasi ditingkat provinsi atau nasional	20,00	13,00	Pemuda dan Olah raga	Dinas Pemuda dan Olahraga
61	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	10	Diiikutinya pekan olahraga daerah (event)	20,00	10,00	Pemuda dan Olah raga	Dinas Pemuda dan Olahraga
62	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	11	Terselenggaranya Porda di Kabupaten Balangan (%)	100,00	-	Pemuda dan Olah raga	Dinas Pemuda dan Olahraga
63	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	12	Prosentase (%) penanganan keluarga miskin	10,10	7,57	Sosial	Dinas Sosial
		13	Prosentase (%) PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	11,16	8,77		Dinas Sosial
64	Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam	14	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran yang terstandar (unit)	18,00	15,00	Trantibum dan Linmas	BPBD
		15	Meningkatnya SDM, sarana dan prasarana tanggap darurat bencana (%)	21,00	12,00	Trantibum dan Linmas	BPBD, Dinas Sosial
MISI VI : OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH							

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)		Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2018	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4	5	6	7
65	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1	Prosentase jumlah SKPD yang mendapatkan predikat akuntabilitas baik (%)	100,00	80,00	Otda dan Pemerintahan Umum	Inspektorat
66	Program meninteksifkan penanganan pengaduan masyarakat	2	Penanganan tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan masyarakat (%)	100,00	100,00	Otda dan Pemerintahan Umum	Inspektorat
		3	Rekomendasi temuan pengawasan yang ditindaklanjuti (%)	100,00	95,00		Inspektorat
		4	Prosentase SKPD tanpa temuan pengembalian/finansial (%)	100,00	70,00		Inspektorat
67	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	Maturitas SPIP (%)	60,00	40,00	Otda dan Pemerintahan Umum	Inspektorat
68	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6	Tingkat Kapabilitas APIP (level)	3,00	2,00	Otda dan Pemerintahan Umum	Inspektorat
69	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	7	Terwujudnya intergrasi dan sinkronisasi aplikasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian secara online	100,00	50,00	Perencanaan	Bappeda
70	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	11	Kertas kebijakan/ policy brief/ policy papper dari penelitian yang digunakan, dan ditindaklanjuti/direalisasikan	100,00	100,00		Balitbangda
71	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	8	Penilaian Kinerja Pemerintah	64,30	57,65	Otda dan Pemerintahan Umum	SETDA (Bag. Organisasi& Tatalaksana)

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)		Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2018	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4	5	6	7
72	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	68.065.455.000,00	48.862.000.000,00	Keuangan	Badan Keuangan Daerah
		10	Penerapan SAKIP (Renstra, Renja, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain-lain) %	100,00	100,00		SETDA (Bag. Organisasi& Tatalaksana)
		11	Rata-rata capaian Urusan SPM (%)	68,00	60,00		SETDA
		12	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tepat ukuran dan Fungsi (%)	100,00	93,00		SETDA
		13	Ketersedian informasi jabatan yang dapat dijadikan acuan dalam penataan aparatur (%)	100,00	38,46		SETDA
		14	Unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan Standar Pelayanan Publik (buah)	8,00	5,00		SETDA
73	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	15	Aparatur yang telah mengikuti Diklat sesuai dengan persyaratan jabatan dan pemenuhan kebutuhan profesionalitas (orang)	87,00	72,00	Kepegawaian dan DIKLAT	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan
74	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	17	Penyediaan infrastruktur telekomunikasi untuk desa-desa terpencil (%)	100,00	55,00	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		18	Penyediaan jaringan dan infrstruktur e-government (%)	100,00	37,50		Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)		Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2018	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4	5	6	7
		19	Terintegrasinya aplikasi layanan SKPD dalam satu sistem data dan layanan (%)	100,00	30,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
75	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumentasi/Arsip Daerah	20	Cakupan layanan pengarsipan dokumen daerah (%)	100,00	65,00	Kearsipan	Dinas Arsip
76	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	21	Tersedianya sistem perencanaan, penganggaran dan money dana desa (%)	100,00	50,00	Pembermasdes	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
77	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	22	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dana desa (%)	100,00	80,00	Pembermasdes	DPMD, Inspektorat, Kecamatan, BKD
MISI VII : MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DAN KEPASTIAN HUKUM UNTUK TERCIPTANYA SUASANA YANG KONDUSIF							
78	Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	1	Persentase Konflik Yang Dapat Diatasi	100,00	100,00	Trantibum dan Linmas	Satpol PP
		2	Jumlah Polisi Pamong Praja (personil)	105,00	105,00		Satpol PP
		3	Persentase penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100,00	100,00		Satpol PP
79	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4	Dokumen pribadi masyarakat (%)	100,00	91,67	Adm. Penduduk dan Pencatatan Sipil	Disdukcatpil

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SOPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang berkontribusi dalam meningkatkan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Suatu program prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi:

1. Program Prioritas I :Merupakan program prioritas pembangunan daerah tahun 2017 sesuai dengan pentahapan tema RPJPD dan RPJMD atau program unggulan Kepala Daerah.
2. Program Prioritas II : Merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 serta indikatornya.
3. Program Prioritas III : Merupakan prioritas program ditingkat SOPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SOPD.

Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan. Dalam penyusunan prioritas kegiatan SOPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra SOPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan SOPD

Matriks Rencana program dan kegiatan SOPD tahun 2018 serta prakiraan maju tahun 2019 pada masing-masing SOPD dapat dilihat pada lampiran dari dokumen RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2018 ini.

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2018 disusun sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah. RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah untuk tahun ketiga RPJMD Tahun 2016-2021.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan partisipatif, Pemerintah Kabupaten Balangan berupaya mengoptimalkan peran publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui masukan pokok-pokok pikiran DPRD, forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). melalui berbagai tahapan. Musrenbang yang dimulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten

RKPD Kabupaten Balangan tahun 2018 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya dokumen RKPD ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum Anggaran tersebut dijadikan pedoman untuk menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan rancangan program prioritas bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Balangan sangat bergantung pada strategi berbagi peran antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam upaya untuk mewujudkan “Balangan yang Maju dan Sejahtera”.

BUPATI BALANGAN

Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si